

Memahami Cina: Perkembangan Cina Pasca-Era Keterbukaan



**Program
*In House Training***

**Pusat Penelitian Sumber Daya Regional
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
PSDR-LIPI**

2010

© 2010 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR)

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Memahami Cina: Perkembangan Cina Pasca-Era Keterbukaan/Paulus
Rudolf Yuniarto, Rita Pawestri Setyaningsih, Erlita Tantri, Devi
Riskianingrum, dan Upik Sarjiati. – Jakarta: LIPI Press, 2010.
vii + 144 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-602-4

1. Perkembangan ekonomi

2. Cina

338.9

Editor Bahasa : Devi Riskianingrum
Kopieditor : Heddy Suprihadi
Risma Wahyu Hartiningsih
Pewajah Isi : Devi Riskianingrum
Desainer Sampul : Emil Hakim



LIPI

Diterbitkan oleh:

LIPI Press, anggota Ikapi

Jln. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350

Telp. (021) 314 0228, 314 6942. Faks. (021) 314 4591

E-mail: bmrliipi@centrin.net.id

lipipress@centrin.net.id

press@mail.lipi.go.id

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR)

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Widya Graha Lt. 1

Jalan Jenderal Gatot Subroto No.10, Jakarta 12710

Telp.: 021-5265152

Faks.: 021-5265152

Pengantar

Penerbitan buku yang merupakan kumpulan tulisan dari balai penelitian Asia Pasifik ini merupakan sebuah karya dalam naungan program *in House Training* (IHT) pada Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR) LIPI. IHT sendiri merupakan salah satu program PSDR LIPI untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas peneliti di lingkungan Puslit PSDR yang awalnya ditujukan pada peningkatan kemampuan berbahasa asing para peneliti PSDR yang sesuai dengan bidang penelitian.

PSDR yang merupakan sebuah puslit yang memfokuskan pada kajian kewilayahan, merasa perlu untuk meningkatkan kemampuan peneliti baik dalam mengkaji wilayah fokus penelitian maupun menyebarkan pengetahuan yang telah diperoleh. Oleh karena itu, setelah beberapa tahun IHT memfokuskan pada kemampuan bahasa asing peneliti pada wilayah kajian peneliti-peneliti PSDR maka pada tahun 2010 akhir ini, IHT juga mencoba mempersembahkan sebuah buku yang menyajikan tulisan-tulisan peneliti-peneliti pada wilayah kajian Asia Pasifik.

Buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dan ilmu secara garis besar ataupun seksama bagi para pembaca yang juga memiliki minat ataupun kajian pada perkembangan wilayah Asia Pasifik.

Jakarta, 2010
Kepala Pusat Penelitian Sumber Daya Regional
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Drs. Dundin Zaenuddin, M.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
I. ABAD PARIWISATA CINA: Dari Perubahan Struktur Industri ke Perkembangan Industri Pariwisata Cina <i>Paulus Rudolf Yuniarto</i>	1
1.1 <i>Booming</i> Pariwisata Cina	2
1.2 <i>Industrial Upgrading</i> : Kasus Sektor Pariwisata	6
1.3 Perubahan Struktur Industri Cina	12
1.4 Skema Industrial Pariwisata Cina	17
1.5 Potensi dan Nilai Tambah Pariwisata Cina	20
1.6 Investasi dan Kerja Sama dalam Sektor Pariwisata	25
1.7 Penutup: Bahan Pembelajaran	27
Daftar Pustaka	30
II. Investasi Langsung Asing dalam Pembangunan Lima Tahunan Cina: Makna bagi Indonesia <i>Rita Pawestri Setyaningsih</i>	
2.1 Pendahuluan	35
2.2 Periode Pertama: Pembangunan Lima Tahun	36

ke-5 hingga ke-7(1976–1990)	
2.3 Periode II: Pembangunan Lima Tahunan ke-8 hingga ke-9 (1991–2000)	40
2.4 Pembangunan Lima Tahun ke-10 (2001–2005)	44
2.5 Periode Tiga: Pembangunan Lima Tahun Ke-11(2006–2010)	45
2.6 Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-12	48
2.7 Faktor Determinan	49
2.8 Tantangan Cina dalam Pengembangan Investasi Langsung	50
2.9 Memaknai Cina	52
Daftar Pustaka	54
III. Pertanian dan Industri Sebagai Pendorong Perkembangan Ekonomi Cina: Reformasi Ekonomi Cina 1978–2003	
<i>Erlita Tantri</i>	
3.1 Pendahuluan	59
3.2 Cina dan Reformasi Ekonomi	60
3.2.1 Pertanian Cina	63
3.2.2 Industri Cina	73
Daftar Pustaka	77
IV. Eksistensi Identitas Etnis Tibet dan Etnis Mongolia dalam Komunisme Cina: Sebuah Paparan Sejarah	79
<i>Devi Riskianingrum</i>	
4.1 Pendahuluan	80
4.2 Tibet dan <i>Inner-Mongolia</i> dalam Rangkaian Sejarah Negara Komunis Cina	81

4.2.1 Integrasi Tibet di Cina: Sebuah proses yang Berkelanjutan	82
4.2.2 <i>Inner-Mongolia</i> di bawah Naungan Cina	89
4.3. Eksistensi Etnis Tibet dan Mongolia dalam Komunisme Cina	97
4.3.1 Eksistensi Identitas Etnis Tibet di Cina	99
4.3.2 Representasi Etnis Mongol di Cina	103
4.4 Kesimpulan	108
Daftar Pustaka	111
V. Migrasi Tenaga Kerja Desa-Kota dan Implikasinya terhadap Tingkat Kemiskinan Kota di Cina	115
<i>Upik Sarjiati</i>	
5.1 Pendahuluan	115
5.2 Migrasi Tenaga Kerja dari Desa ke Kota dalam Proses Pembangunan di Cina	117
5.3 <i>Hukou System (Household Registration System)</i> sebagai Alat Kontrol Migrasi Pekerja dari Desa ke Kota	118
5.4 Tren dan Pola Internal Migrasi	120
5.5 Karakteristik Pekerja Migran	124
5.6 Migrasi dan Kemiskinan Kota	129
5.7 Pekerja Migran dan Pelayanan Sosial	130
5.7.1 Keterbatasan Akses terhadap Jaminan Sosial	131
5.7.2 Terbatasnya Akses terhadap Layanan Kesehatan	133
5.7.3 Terbatasnya Akses terhadap Pendidikan	134

5.8 Reformasi <i>Hukou System</i> : Sebuah Tantangan Bagi Cina	135
5.9 Penutup	140
Daftar Pustaka	141

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Tema Pariwisata Cina	8
Tabel 1. 2 Contoh Obyek Wisata Utama di Beijing	21
Tabel 3.1 Jumlah Produksi Padi Cina Periode 1978–2002 (dalam juta ton)	72
Tabel 3.2 Total Nilai Industri Cina (dalam 100 juta Yuan)	74
Tabel 5.1 Jumlah Migran di Perkotaan tahun 2000–2007	120
Tabel 5.2 Provinsi Asal Tenaga Kerja Migran	121
Tabel 5.3 Distribusi Tenaga Kerja Migran di Beberapa Provinsi Tujuan	123
Tabel 5.4 <i>Hukou dan non-Hukou Migrants</i>125
Tabel 5.5 Distribusi Jenis Pekerjaan (%)128
Tabel 5.6 Indikator Kemiskinan Kota Tahun 1981–2002	130
Tabel 5.7 Kondisi Pekerja Migran dalam Pasar Tenaga Kerja	132

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Hubungan Pembangunan Ekonomi dan Pariwisata	17
Gambar 2.1 Aliran Investasi Asing Langsung ke China	40
Gambar 5.1 Daerah Tujuan Internal Migrasi	123

I

ABAD PARIWISATA CINA:
Dari Perubahan Struktur Industri Ke Perkembangan
Industri Pariwisata Cina
Paulus Rudolf Yuniarto

Abstrak

Pembangunan kepariwisataan menjadi isu yang sangat menarik dan menjadi pusat perhatian baik pemerintah, akademisi, sekaligus para penikmat wisata Cina terutama pada kurun waktu satu dekade terakhir ini. Tidak dipungkiri bahwa industri pariwisata Cina telah menyumbang bagi devisa negara Cina sangat besar. Perkembangan pariwisata maupun besarnya devisa yang diperoleh merupakan pencapaian yang dihasilkan dari sebuah perjalanan panjang proses perubahan struktur industri yang berjalan sebelum, selama, dan sesudah era reformasi ekonomi 1978. Tulisan paper ini menjelaskan sejauh mana peran perubahan yang terjadi dalam struktur industri yang ada di Cina dan juga bagaimana proses perkembangan yang mengarah pada industri jasa lainnya, khususnya industri pariwisata. Industri pariwisata dalam hal ini adalah salah satu contoh hasil dari sebuah perkembangan berjalannya tahapan-tahapan perubahan struktur industri Cina. Melalui pendekatan yang menekankan pada sejarah industri dan perubahan yang terjadi, terlihat bahwa sektor pariwisata Cina tampaknya didorong oleh Pemerintah Cina sebagai *leading sector industry*. Industri pariwisata berjalan dengan melibatkan subsektor lainnya, seperti transportasi, telekomunikasi, keuangan, perdagangan, dan pelayanan jasa seperti hotel dan restoran. Dengan demikian, industri pariwisata Cina dalam perkembangannya kemudian tidak

hanya menjadi subyek pembangunan yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak namun lebih dari itu pariwisata Cina menjadi industri yang memperkenalkan ide budaya dan pembangunan Cina ke seluruh dunia.

Kata Kunci: reformasi ekonomi, perubahan struktur industri, industri pariwisata

1.1 *Booming* Pariwisata Cina

Negara Cina saat ini telah menempatkan diri sebagai ekonomi pariwisata terbesar ketiga dunia setelah Perancis dan Spanyol dan menggeser Amerika Serikat dalam kurun periode satu dasawarsa (Organisasi Pariwisata Nasional Dunia (UNWTO), 2009). Kondisi industri pariwisata Cina ini dinilai secara akumulatif melalui angka pertumbuhan yang mencapai angka 14% pada 2006, yaitu mengalami pemasukan sebanyak 346,3 miliar Dolar AS melampaui angka pertumbuhan dan pemasukan industri ini pada tahun-tahun sebelumnya (<http://www.opensubscriber.com/message/mediacare@yahoogroups.com/3962430.html>).

Selanjutnya, pada kurun tahun 2007, pendapatan pariwisata dari sektor wisatawan domestik juga mencapai angka yang cukup tinggi, yakni mencapai angka 777,1 miliar Yuan, sedangkan dari sektor wisatawan asing mencapai angka 312,9 miliar Yuan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa wisatawan domestik justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sementara wisatawan asing ke Cina mengalami penurunan. Konon untuk masalah penurunan di sektor wisatawan asing akibat melemahnya perekonomian

dunia sehingga mengurangi minat perjalanan wisata keluar negeri (Xinhua, 2007).

Gambaran *booming* pariwisata Cina dapat dilihat pula dari jumlah pendapatan sektor ini dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu periode selanjutnya, yaitu tahun 2008 industri pariwisata mencapai angka pendapatan sebesar 1,16 triliun Yuan atau sekitar 169,5 miliar Dolar AS. Angka ini secara statistik memperlihatkan kenaikan sebanyak 5,8% dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya (Administrasi Pariwisata Nasional Cina, 2008). Pendapatan sebesar itu sudah termasuk di dalamnya 874,8 miliar Yuan yang diperoleh dari sektor wisatawan domestik dan 289,9 miliar Yuan diperoleh dari wisatawan asing. Masih pada tahun 2008, menurut catatan dari Administrasi Pariwisata Nasional Cina, jumlah wisatawan lokal mencapai 130 juta orang, termasuk di antaranya yang berasal dari Hong Kong, Makao, dan Taiwan. Sementara itu, jumlah wisatawan asing yang datang ke Cina selama kurun waktu 2008 tercatat 24,3 juta orang, sedikit turun 6,8% dibanding tahun sebelumnya (Administrasi Pariwisata Nasional Cina, 2008). Pada kurun waktu tahun 2009, selama berjalannya semester pertama tahun tersebut, setidaknya ada 1 miliar wisatawan domestik melakukan perjalanan. Angka ini naik 10% dibanding tahun lalu, dan pendapatannya mencapai 500 miliar Yuan (Administrasi Pariwisata Nasional Cina, 2009). Wisatawan domestik pada tahun 2009 mencapai 1,9 miliar orang yang nantinya memiliki kenaikan 10% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Laporan Administrasi Pariwisata Nasional Cina juga menunjukkan sebanyak 22,5 juta perjalanan ke luar terjadi pada Januari—Juni, naik 1% dibanding periode sama tahun

sebelumnya. Diperkirakan warga Cina yang melakukan perjalanan keluar selama 2009 kurang lebih mencapai 47 juta orang.

Melihat hasil yang dicapai negara Cina selama periode 3 tahun belakangan ini dan dengan kondisi pertumbuhan nasional tahunan yang berjalan stabil di kisaran 8–10%-an dari 2006 sampai 2009, banyak pihak memproyeksikan Cina diperkirakan akan mencatat pertumbuhan tertinggi kedua terutama dalam industri di sektor pariwisata di dunia (WTTC 2006). Dewan Administrasi Pariwisata Nasional Cina menunjukkan bahwa setiap tahunnya Cina diperkirakan akan menerima sebanyak 137 juta pengunjung pada tahun 2019 dan menjadikan sebagai negara dengan kunjungan pariwisata terbesar dunia. Pusat Riset Pariwisata Akademi Ilmu Pengetahuan Sosial Cina menyebutkan bahwa ekonomi Cina yang tengah *booming* telah menarik pertumbuhan jumlah wisatawan. Cina juga menjadi salah satu sumber pariwisata terbesar untuk industri internasional. Cina membuat jutaan lawatan ke luar negeri dan akan diperkirakan terus tumbuh setiap tahunnya. Beberapa negara telah menerapkan berbagai kebijakan preferensial untuk menarik wisatawan Cina seperti penawaran bebas visa untuk memasuki kawasan pariwisata Cina maupun untuk lawatan ke luar negeri (<http://www.opensubscriber.com/message/mediacare@yahoo.com/3962430.html>).

Pariwisata Cina tampaknya telah menjadi titik tumbuh baru bagi perkembangan ekonomi masyarakatnya. Hal ini tampak pula dari peningkatan jumlah daerah objek wisata di berbagai tempat seluruh negeri Cina yang terus giat digalakkan dan terus bertambah, infrastruktur juga diperbaiki

serta dampak lain yang muncul adalah angka wisatawan asing dan domestik yang berwisata di/ke Cina semakin bertambah dari tahun ke tahun.

Menyimak apa yang terjadi dan sejumlah perkembangan yang menarik dari industri pariwisata Cina, tentunya menyiratkan beberapa pertanyaan mendasar yang ingin kita ketahui. Misalnya, untuk mengetahui sejauh mana sejarah perkembangan pariwisata Cina dapat berkembang sedemikian rupa. Lantas bagaimana pula gambaran tentang perubahan struktur industri di Cina yang ternyata membawa implikasi atau perubahan bagi berkembangnya sektor industri pariwisata. Kemudian keingintahuan mengenai bagaimana relasi yang terbentuk di antara lembaga atau aktor-aktor yang berperan di sektor pariwisata ini melalui mekanisme menjalankan kegiatan pariwisata mereka. Tulisan dalam artikel ini merupakan hasil pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian mengenai perubahan struktur industri di Cina yang dikaitkan dengan masalah pariwisata. Beberapa tahap penelitian dilakukan dari studi literatur, pengamatan langsung pada objek- objek wisata di lapangan dan melalui wawancara dengan informan terkait. Untuk data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang dilakukan dengan menelusuri perpustakaan di Jakarta, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Pusat Studi Cina Universitas Indonesia kemudian bahan yang didapat dari Asian Research Institute Singapore dan ISEAS Singapura serta browsing melalui internet. objek yang diamati antara lain adalah objek wisata besar yang merepresentasikan bagaimana industri pariwisata Cina terutama di kota Beijing. Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa narasumber, antara

lain: peneliti/akademisi, aktor pelaku (agen travel) sektor pariwisata Cina dan pegawai kantor pemerintah. Semua informan kami pilih secara purposive dengan mempertimbangkan pemahaman terhadap isu penelitian yang sedang dilakukan dan berkaitan dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh penulis.

1.2 *Industrial Upgrading*: Kasus Sektor Pariwisata

Perkembangan industri pariwisata di Cina sebenarnya harus merujuk pada periode masa sebelum dan sesudah era keterbukaan Cina pada kurun waktu 1978. Gambaran singkatnya, perubahan orientasi ekonomi Cina yang terjadi setelah era reformasi ekonomi Cina 1978 mendorong banyak masyarakat Cina memiliki pandangan baru bahwa berkarya di bidang bisnis (jasa) merupakan jenis profesi yang layak untuk dilakukan, tidak hanya menjadi buruh tani dan industri saja. Periode setelah 1978 ini dapat dikatakan sebagai awal kemunculan gejala “demam bisnis”, terlebih pada periode 1979 sampai 1997, banyak orang Cina memandang bisnis sebagai jalan terbaik untuk memperoleh uang, demikian kira-kira yang terjadi pada sebagian kalangan masyarakat Cina. Situasi ini juga menimpa kaum cendekiawan Cina yang tampaknya memilih bisnis sebagai pilihan karier terbaik dan menantang nilai-nilai tradisional yang memandang studi (belajar) sebagai jalan menuju birokrasi dan kesuksesan. Konon, pergeseran budaya ini telah menjadi pokok pembicaraan sebagian besar masyarakat Cina pada kurun waktu tahun 80’an. “Demam bisnis” mula-mula timbul pada 1984, yaitu ketika pasar kerja paruh waktu banyak melibatkan dan dilakukan oleh banyak karyawan perusahaan milik

negara, petani di pedesaan, mahasiswa, dan beberapa cendekiawan untuk mencari tambahan penghasilan selain dari jenis pekerjaan yang mereka miliki sebelumnya. Ledakan kedua, yaitu sekitar tahun 1990, hal ini ditandai dengan hengkangnya pejabat-pejabat pemerintah, kader partai, dan dosen-dosen perguruan tinggi untuk masuk ke sektor perdagangan atau industri jasa karena jenis usaha ini memberikan hasil yang jauh lebih menguntungkan bagi mereka (<http://yudhim.blogspot.com/2008/08/budaya-bisnis-rrc-pada-era-globalisasi.html> diakses pada 13/01/2009 12:06:31).

Salah satu jenis pilihan masyarakat Cina dalam mengembangkan sektor bisnis atau jasa adalah dengan/memasuki/mengembangkan sektor industri pariwisata. Di level pemerintahan, tengah gencar memperkenalkan sumber daya wisata Cina kepada wisatawan mancanegara. Pihak Pemerintah Cina melalui Biro Pariwisata Nasional Cina sejak tahun 1992 mengajukan berbagai konsep wisata Cina yang bertemakan budaya, adat istiadat, atau pemandangan, dan lain-lain untuk menarik dan mengembangkan pariwisata mereka. Dalam menjalankan kegiatannya, pemerintah melalui agen wisata lantas menawarkan berbagai rangkaian kegiatan wisata dengan rute wisata pilihan, wisata berciri khas negara atau daerah-daerah serta melakukan rangkaian program untuk melakukan promosi di luar negeri. Promosi pariwisata juga dibarengi dengan tema pariwisata Cina. Salah satunya pada tahun 2004 adalah "Wisata Kehidupan Warga Tiongkok".¹

¹ Pemilihan tajuk pariwisata tersebut diilhami oleh kisah panjang sejarah bangsa Cina. Sejarah peradaban bangsa Cina sepanjang 5.000 tahun telah

Beberapa tema pariwisata Cina dapat di lihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Tema Pariwisata Cina

1992	Visit Cina Friendship year	2000	2000 Year of Ancient Cina
1993	Natural Tourism in Cina	2001	Cina Health and Sport Tourism
1994	Heritage and Culture Tourism	2002	Cina Art Tourism
1995	Cina Culture Tourism	2003	Cina Food Tourism
1996	Recreation Tourism	2004	Cina Natural Culture Tourism
1997	Cina Tourism Year	2005	Visit Cina Year
1999	Ecotourism '99	2006	Amazing Cina

Source: Cina National Tourist Administration
<http://indonesian.cri.cn/Cinaabc/chapte5/chapter50102.htm>

memupuk moral tradisional rakyat Cina yang rajin, berani, polos dan berbudi, juga telah membentuk cara hidupnya sendiri, kebiasaan makan dan adat istiadat yang khas. Kehidupan warga Cina yang beragam dan berciri khas telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Cina, sekaligus menjadi sumber daya wisata yang sangat bernilai sosial budaya. Kehidupan warga Cina memiliki ciri khas ketimuran, baik rumah rakyat, makanan, busana dan hiasannya, maupun hiburan, hari raya dan adat istiadatnya mencerminkan wajah semangat, etika dan moral yang baik dari bangsa Cina. Menjadikan wisata kehidupan warga Cina sebagai tajuk adalah untuk memberikan kesempatan kepada wisatawan mancanegara untuk lebih mengenal masyarakat dan keadaan aktual di Cina, agar mereka dapat menyelami kehidupan warga Cina yang berciri khas, dan mengenal budaya terbaik yang diciptakan rakyat Cina
<http://indonesian.cri.cn/chinaabc/chapter5/chapter50102.htm>.

Pariwisata Cina memang sedang digalakkan oleh pemerintah. Hal ini selain di picu oleh kebangkitan ekonomi yang dirasakan oleh negeri ini, namun yang paling penting adalah menggali potensi-potensi yang terkandung dalam upaya mempopulerkan wisata di Cina. Di lihat sebagai sebuah negara yang besar, Cina memiliki potensi cakupan wilayah yang sangat luas—dengan tekstur geografi yang berbeda-beda disertai dengan kondisi sosial kemasyarakatan yang beragam, menjadikan Cina sebagai daerah tujuan wisata, baik yang bersifat nasional dan internasional.² Hal lain juga mendukung potensi geografi Cina, di antaranya adalah peta sosial budaya Cina yang memperlihatkan bahwa selain

² Kemajemukan yang diperlihatkan oleh Cina dengan luas wilayah mencapai 9.561.000 kilometer dan jumlah penduduk sebanyak 1.395.330 orang (sensus kependudukan Biro Statistik Nasional Cina tahun 2008) juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pariwisata. Lihat saja, Cina memiliki 55 etnis minoritas dengan Suku Han yang paling besar, yaitu sekitar 91% dari jumlah penduduk sebanyak 1,159,400.000 dan 9% sisanya adalah kaum minoritas yang kurang lebih sebanyak 106.430.000. Tentunya dengan keberagaman masyarakat disertai budaya yang berbeda-beda, hal ini juga menjadi aspek pariwisata yang menarik dalam melihat wisata Cina. Secara garis besar di Cina terdapat satu kelompok mayoritas, yaitu etnis Han yang rata-rata tinggal di daerah sungai Kuning, sungai Yangzte, sungai Mutiara, dan sebagian lagi di dataran Songliao. Sebaliknya, etnis minoritas tinggal tersebar di Mongolia Tengah, Xingjian, Tibet, Guangxi, Ningxia, Heilongjiang, Guilin, Liaoning, Ganshu, Qinghai, Sichuan, Yunnan, Quizhou, Quandong, Hunan, Hebel, Hubei, Fujian, dan Taiwan. Kelompok minoritas ini rata-rata memeluk agama Budha, Islam, Kristen Ortodoks, Kristen Protestan atau Daoisme/Taoisme. Mereka memiliki bahasa dan tulisan sendiri juga memiliki tradisi budaya yang berbeda dengan etnis Han mayoritas yang berbahasa Han dan menganut paham Konfusianisme.

keragaman masyarakat, daerah daratan Cina juga memiliki daya tarik pariwisata tersendiri.³ Warisan sejarah dan budaya yang terpelihara sampai sekarang turut menjadi sumber daya wisata yang amat bernilai.⁴ Selain itu, di Tiongkok terdapat 56 etnis, setiap etnis mempunyai sejarah, budaya dan adat istiadatnya sendiri yang khas sehingga membentuk sebuah lanskap budaya yang beragam dan menarik (<http://indonesian.cri.cn/Cinaabc/chapter5/chapter50101.htm>).

³ Memiliki luas wilayah 9.596.960 km persegi, wilayah Cina memiliki bentang alam berbeda. China bagian timur merupakan daerah perbukitan, dataran rendah, dan delta sungai, sedangkan dataran tinggi (plato) dan pegunungan terdapat di wilayah China Bagian Barat. Gurun Taklimakan di bagian barat China merupakan gurun terluas kedua di dunia. Selain itu, terdapat juga Gurun Gobi di China dan Mongolia Selatan. Dari sisi cuaca pun bervariasi. Di Hainan China bagian selatan penduduknya menikmati cuaca tropis yang hangat hingga mereka hanya mengenakan pakaian berbahan tipis. Provinsi Hainan terkenal dengan pemandangannya yang menakjubkan dan pantainya yang indah. Sebaliknya, di Manchuria di wilayah utara wilayah ini beriklim subarktik yang memiliki iklim panas dan dingin. Mayoritas 70% penduduk Cina menempati wilayah pedesaan. Provinsi Shandong di pantai timur Cina memiliki iklim sangat sejuk lebih kurang 91 juta jiwa penduduk tinggal di wilayah ini karena cuacanya cocok untuk bercocok tanam dan tinggal. Ada satu lagi kawasan yang cukup terkenal, yaitu Gunung Everest terletak di perbatasan Cina dan Nepal (<http://www.kontekaja.com/chinatown.php?p=article&id=255>).

⁴ Di antara petilasan sejarah yang ada di Cina, patung prajurit dan kuda (Terakota) serta kereta perang dari tembaga di makam kaisar Qinsihuang merupakan saah satu keajaiban kedelapan di dunia. Museum Terakota ini dikunjungi jutaan wisatawan setiap tahun. Kemudian Lukisan dinding Gua Batu Mogao juga diakui sebagai khazanah seni dunia. Tembok Besar yang terkenal merupakan pemandangan megah yang juga jadi daya tarik wisata bagi setiap tamu yang datang berkunjung.

Pertumbuhan ekonomi Cina yang sehat sangat mendukung industri pariwisata. Dampak reformasi ekonomi Cina meningkatkan keterbukaan dengan dunia luar dan telah membantu perekonomian Cina tumbuh dengan cepat. Perekonomian Cina memerlukan perbaikan lebih lanjut dalam bidang infrastruktur untuk pengembangan pariwisata sehingga mendorong lebih banyak turis Cina, baik domestik maupun internasional. Kebijakan pemerintah sangat positif untuk pengembangan pariwisata. Sejauh ini, lebih dari dua per tiga dari pemerintah provinsi mempunyai komitmen untuk membuat industri pariwisata sebagai salah satu pilar mereka. Dalam kampanye nasional untuk pengembangan Cina barat, pariwisata juga telah membuat prioritas antarsektor industri. Dalam laporannya pada Rencana Lima Tahun '10th Bidang Ekonomi Nasional dan Pembangunan Sosial', Perdana Menteri Zhu Rongji menekankan bahwa perkembangan sektor jasa harus dipercepat, dan harus memberikan lebih kepada industri jasa yang berkaitan langsung dengan penduduk seperti perjalanan dan pariwisata, hiburan, dan rekreasi. Pemerintah pusat juga meningkatkan hari libur, dan sengaja membuat tiga hari libur selama seminggu per tahun (masing-masing selama Festival Musim Semi, May Day Festival, dan Hari libur Nasional, yang dimulai 1 Oktober) untuk memberikan penduduk lebih banyak waktu luang. Memang, praktik ini telah membuktikan bahwa pariwisata domestik dapat menjadi kekuatan pendorong untuk meningkatkan konsumsi domestik, dan selanjutnya merangsang produksi (Zhang, Guangrui 1995: 3—4).

Dari uraian di atas, pengembangan pariwisata Cina sangatlah sejalan dengan arah perkembangan yang terjadi

secara gradual pada aspek pembangunan Cina. Kemungkinan besar pariwisata juga menjadi semacam dampak secara tidak langsung dari pertumbuhan dan perkembangan lingkungan sosial, budaya, sosial ekonomi, lingkungan atau politik Cina. Seperti industri lainnya di Cina, industri pariwisata telah berubah sesuai dengan orientasi politik umum negara. Dari pembentukan Republik Rakyat Cina sampai tahun 1978, pariwisata digunakan untuk tujuan ekonomi dan luar negeri urusan politik. Hanya mulai tahun 1986 pemerintah nasional menyatakan pariwisata menjadi suatu kegiatan ekonomi (Zhang, 1995). Pengembangan Pariwisata menjadi kebijakan industri dan ekonomi utama untuk tahun-tahun yang akan datang.

1.3 Perubahan Struktur Industri⁵ Cina

Sebelum beranjak lebih jauh, perbincangan mengenai pariwisata seharusnya tidak melupakan berbagai masalah perubahan yang terjadi pada sektor industri di Cina, terutama mengenai aspek sejarahnya. Sejak berdirinya pada tahun 1949, struktur industri negara Republik Rakyat Cina paling tidak telah mengalami tiga tahap perkembangan. Tahap perkembangan yang *pertama* berlangsung antara awal tahun 1950-an dan akhir 1970-an, Cina dengan pesat telah mengubah ekonomi yang berciri komunis. Tahap ini dapat

⁵ Yang dimaksud dengan struktur industri adalah proporsi faktor penting produksi antarsektor industri serta hubungan saling ketergantungan dan saling mengikat antara satu sama lain, antara lain, hubungan proporsi antara pertanian, industri dan usaha jasa serta hubungan proporsi antarsektor.

dikatakan sebagai awal atau tingkat pertama peletak dasar proses industrialisasi di Cina. Tahap *kedua* dimulai dari tahun 1979 dan berakhir pada awal tahun 1990-an, periode ini ditandai dengan dimulainya reformasi keterbukaan (*gaige kaifang*) di mana Cina dan PKC melaksanakan reformasi ekonomi dan politik keterbukaan terhadap dunia luar, yang diimplementasikan dengan mengadakan restrukturisasi industri sehingga Cina mulai memasuki tahap menengah industrialisasi. Tahap *ketiga* dimulai dari awal tahun 1990-an, Cina memberlakukan kebijakan sistem ekonomi pasar sosialis yang kemungkinan masih akan terus berlangsung sampai sekitar tahun 2020. Pada tahap ini, Cina akan memasuki tahapan lebih lanjut, yaitu mewujudkan industri jasa sejalan dengan meningkatnya tahapan industrialisasi di Cina.

Menyoal perubahan industri dalam konteks Cina, seperti yang telah diungkapkan pada sub-bab sebelumnya, terdapat suatu gagasan mengenai perubahan orientasi dan pembangunan industri yang oleh para ekonom sering disebut sebagai peningkatan tahap pembangunan, atau disebut *industrial upgrading*. *Industrial upgrading* dalam konteks Cina adalah suatu pengembangan pembangunan yang memindahkan suatu fokus perhatian pemerintah dari pengembangan sektor industri manufaktur ke sektor jasa. Menurut Pemerintah Cina, sektor jasa/tersier di Cina meliputi industri perbankan, asuransi, perdagangan besar dan ritel, perdagangan luar negeri, pariwisata, *catering*, transportasi dan pergudangan, akunting dan auditing, dan telekomunikasi. Sektor konstruksi dan *engineering* termasuk dalam industri sekunder, namun dalam kerangka WTO, kedua sektor ini termasuk di dalam sektor jasa/tersier. Salah satu yang

tergolong dalam *industrial upgrading* saat ini dan menjadi salah satu sektor jasa yang paling diminati oleh investor asing, antara lain perbankan, sektor manufaktur berbasis teknologi tinggi, dan pariwisata (Setyaningsih, 2007: 81). Salah satu bukti dari munculnya perubahan tersebut, antara lain di tahun 2005 FDI di sektor finansial Cina ini menurun dari \$12,1 miliar menjadi \$6,4 miliar pada tahun 2006, namun sektor ini diperkirakan akan meningkat sesuai dengan rencana jangka panjang Cina yang akan menjadi sebuah negara yang memiliki sektor industri jasa modern dan industri berteknologi tinggi (Setyaningsih, 2007: 81). Pembentukan Shenzhen dan Shanghai yang dijadikan sebagai pusat keuangan domestik (*domestic financial hub*) oleh Pemerintah Cina juga ditengarai sebagai sarana untuk mendukung arah perubahan pembangunan industri di Cina (Setyaningsih, 2007: 81).

Jika kita melihat pada data-data statistik, perubahan struktur industri di Cina akan terlihat jelas pada kurun waktu 50 tahun terakhir ini, hubungan proporsi antara tiga industri (pertanian, industri manufaktur, dan industri jasa) di Cina telah mengalami perubahan yang cukup besar. Antara masa awal tahun 1950-an hingga tahun 2002, proporsi pertanian Tiongkok menurun dari 45,4% menjadi 14,5% pada tahun 2002. Sementara itu, proporsi industri naik dari 34,4% menjadi 51,8%, sedangkan proporsi usaha jasa naik dari 20,2% menjadi 33,7% (<http://indonesian.cri.cn/1/2005/02/05/1@23813.htm>).

Sementara itu, selama lebih kurang 30 tahun sejak reformasi keterbukaan Cina 1978 dan proses pembangunan masyarakat modern, Cina telah menjalankan proses perubahan sistem ekonomi dari ekonomi terencana (terpusat) ke sistem ekonomi

pasar sosialisme. Hasilnya adalah ekonomi Tiongkok berkembang terus dengan tingkat pertumbuhan 9% ke-atas setiap tahun secara berkelanjutan dan tersistem. Tahun 2003, PDB negara Cina mencapai 1,4 triliun dolar AS—menyusul AS, Jepang, Jerman, Inggris dan Prancis—menduduki peringkat nomor 6 di dunia. Sampai akhir tahun 2003, PDB per orang Cina telah menerobos 1000 dolar AS (<http://indonesian.cri.cn/Cinaabc/chapter3/chapter30201.htm>).

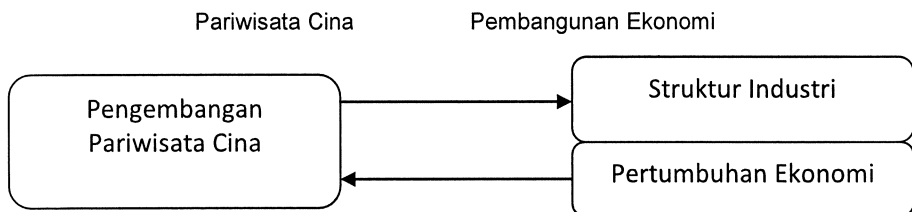
Pada rencana pembangunan lima tahunan ekonomi Cina ke 10 (*the 10th five year plan*), Pemerintah Cina melakukan langkah kebijakan, yaitu menetapkan program pembangunan dengan menggagas tentang *industrial upgrading* sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan persaingan di tingkat internasional, dan juga membangun industri modern dan meningkatkan nilai *output* dari industri sektor jasa serta mempercepat proses industrialisasi (Ma, 2004: 63). Dalam penelitian PSDR (2007) dinyatakan bahwa selama proses *industrial upgrading* tersebut terdapat indikasi terjadinya perubahan karakteristik PMA di Cina, antara lain terjadi peningkatan nilai investasi yang signifikan dalam sektor industri jasa. Sebaliknya, terjadi penurunan persentase pembiayaan di sektor manufaktur serta meningkatnya proporsi investasi asing dengan kepemilikan penuh (*wholly overseas-owned investment*) (Ya Shi, 2007).

Sejak 2006 proporsi PMA yang disetujui di sektor manufaktur menurun tajam sebanyak 60% dari total proyek dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, tidak ada proyek investasi yang banyak menyerap penggunaan energi yang tinggi, investasi di sektor industri berteknologi tinggi juga

meningkat 3.8% dibanding tahun 2005. Jumlah PMA tipe *joint venture* yang disetujui lebih sedikit, namun dalam nilai investasi yang besar. Meskipun PMA di sektor jasa menurun pada tahun 2006, namun diperkirakan akan meningkat sejalan dengan kebijakan pengembangan industri oleh Pemerintah Cina. Secara keseluruhan, perubahan karakteristik ini mengindikasikan terjadinya perubahan struktur industri dalam perekonomian Cina. Pemerintah tidak lagi menghendaki sekedar kuantitas, namun juga kualitas dan efisiensi dari PMA (Jiang Wei, 2007: 6).

Pada tahun 2000, Pemerintah Cina merevisi daftar industri, produk dan teknologi, dan mendorong pengembangannya oleh pemerintah dari 526 varitas menjadi 28 bidang (Ma, 2004: 69). Selain itu, sektor jasa yang meskipun sudah dikembangkan sejak 1978, perkembangannya mulai signifikan baru pada tahun 1980an yang tumbuh sebesar 12.4%. Sementara perannya dalam GDP mencapai 41%. Restruktursasi ekonomi dan restrukturisasi industri menjadi dua agenda penting dalam rencana lima tahunan ke 10. Dalam restrukturisasi industri, pemerintah menargetkan beberapa aspek, meliputi: percepatan reorganisasi industri dan transformasi, peningkatan dan pengoptimalisasian struktural serta pengembangan sektor jasa secara aktif (Ma, 2004: 67). Untuk mempercepat pengembangan sektor jasa maka pemerintah akan mengembangkan sektor jasa modern dan mereformasi sektor tradisional (Ma, 2007). Perubahan strategi dari industri ke jasa ini menunjukkan bahwa industrialisasi Cina berubah dari tahap awal menuju tahap menengah (*intermediate stage*) (Ma, 2007).

Sebuah hubungan timbal balik yang mungkin dapat dijadikan bahan untuk mengidentifikasi antara pembangunan Cina dan pengembangan pariwisata dapat dilihat pada pola di bawah ini, yang antara lain menghubungkan antara berbagai variabel proporsi. Dua proposisi ini dijadikan asumsi sebagai suatu bahan untuk mengkonstruksi hubungan timbal balik antara pembangunan ekonomi dan pariwisata Cina. Proposisi 1 menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata Cina akan membantu dalam penyesuaian struktur industri Cina. Proposisi 2: transformasi pola pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan dampak ekonomi dari pariwisata Cina.



Gambar 1.1 Hubungan Pembangunan Ekonomi dan Pariwisata

1.4 Skema Industrial Pariwisata Cina

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sistem ekonomi pasar sosialis yang diperkenalkan di RRC sejak tahun 1992 telah memberikan banyak sekali kemajuan bagi masyarakat Cina modern. Cina yang dulu sangat komunis dan menutup diri dari pengaruh globalisasi seakan mendapat pemahaman baru untuk bertransformasi. Saat ini ladang bisnis RRC yang potensial benar-benar digarap oleh pemerintahnya dan dibuka seluas-luasnya untuk berbagai pihak melalui investasi dengan

disertai kontrol ketat PKC. Dalam konteks pariwisata di Cina, struktur industri pariwisata Cina terdiri atas beberapa lembaga yang mengerucut pada satu lembaga tertinggi, yaitu Biro Administrasi Pariwisata Nasional yang membawahi biro-biro semacam itu yang berada di level provinsi, travel agen serta kelompok masyarakat. Struktur industri pariwisata dalam menjalankan kegiatan pariwisata tidak hanya mementingkan pengadaan modal infrastruktur, namun juga membuka proses partisipasi kelompok masyarakat wisata untuk memanfaatkan industri pariwisata di wilayah masing-masing. Walaupun masih terlihat Pemerintah Cina masih menerapkan prinsip ekonomi pasar bebas, dengan pengembangan industri pariwisata yang memberi kesempatan bagi pemilik modal besar dalam pengelolaan pariwisata. Namun, pengembangan pariwisata dengan target ekonomi besar juga dibarengi dengan pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat lokal. Sebagai gambaran umum saja, di bawah ini disebutkan beberapa poin penting mengenai berbagai institusi yang terlibat dalam kegiatan pariwisata Cina yang disertai dengan raihan angka-angka yang dihasilkan.

Dalam kerangka mendorong percepatan industri pariwisata Cina, menurut penanggung jawab biro perjalanan wisata Cina, berbagai institusi diharapkan berperan dan saling melengkapi dalam menjalankan industri pariwisata di Cina. Salah satunya adalah biro pariwisata Cina yang telah mengajukan konsepnya kepada pemerintah pusat untuk meningkatkan dana sektor pariwisata yang ditujukan untuk mendorong dan menyelamatkan perusahaan pariwisata agar lebih dapat berkembang lagi. Selain itu, juga mendorong pemerintah pusat maupun lokal untuk menghidupkan pasar

wisata masing-masing daerah. Langkah konkret yang diambil termasuk diantaranya adalah memberikan hadiah, potongan harga (*discount*) atau pelayanan khusus kepada setiap wisatawan dalam perjalanan wisata mereka ini.

Di samping itu, setiap biro-biro perjalanan diusahakan untuk memberikan keringanan biaya perjalanan, menurunkan separuh harga tiket dan mengizinkan perusahaan periwisata yang memberi dampak besar bagi pariwisata untuk memperpanjang jangka pembayaran kredit. Dalam kaitannya dengan sistem relasi sosial bidang pariwisata, biro-biro perjalanan diwajibkan untuk melakukan konsultasi dengan lembaga-lembaga lain seperti maskapai penerbangan; misalnya untuk menurunkan sebagian harga tiket pesawat kepada wisatawan yang terbang ke wilayah wisata yang sangat ramai dikunjungi seperti Tibet, Beijing, Xingjian, Shanghai hingga Hainan. Kemudian dengan pemerintah setempat yang mengelola pariwisata juga diharapkan saling mendukung dengan menjalankan aneka program pariwisata seperti dicontohkan pada wisata di Xingjian yang menawarkan konsep wisata dengan tema "Hari Buah Anggur Turfan", atau "Hari Pariwisata Kebudayaan Batu Giok He Tian" dan "Hari Fotografi Internasional Hu Yang" serta sejumlah hari raya lainnya. Dengan adanya kegiatan semacam ini diharapkan bahwa arus wisatawan akan semakin banyak dan perkembangan industri pariwisata itu sendiri juga akan jauh lebih meningkat.

Dari gambaran tersebut tampak bahwa sebenarnya dalam menjalankan kegiatan pariwisata, setiap institusi yang mewadahi masalah wisata bekerja dalam sebuah skema yang terkoordinasi dan sistematis. Kegiatan pariwisata terhubung

dalam suatu sistem relasi sosial yang tumbuh dari perkembangan struktur industri Cina itu sendiri. Hal ini bisa dijelaskan melalui institusi-institusi yang terkait di dalamnya dan saling terkoneksi/terhubung menjalin suatu pola relasi dalam struktur industri pariwisata.

1.5 Potensi dan Nilai Tambah Pariwisata Cina

Cina menerapkan strategi industri pariwisata yang berbasis sejarah, alam, dan budaya mereka yang melimpah. Isunya adalah bahwa bagaimana negara yang pernah miskin pada masa lampau itu harus dapat memanfaatkan situasi *booming* ekonomi yang sekarang dihadapi. Pariwisata Cina juga memberikan insentif bagi investasi swasta, baik domestik maupun asing untuk turut berperan serta, mengingat perkembangan pariwisata yang begitu pesat di negara tersebut. Terlebih lagi dengan adanya deregulasi kebijakan investasi di Cina yang menjadi insentif bagi investor-investor. Cina, setelah menerapkan kebijakan ekonomi pasar terbuka, perekonomian negara tersebut tumbuh dengan sangat cepat. Dengan warisan budaya dan sejarah serta keadaan alam yang sangat banyak dan masih alami serta masih terawat dengan baik adalah sangat tepat untuk menerapkan wisata budaya dan sejarah dalam artian tempat bersejarah serta ekotourisme. Sampai saat ini di Cina hal tersebut telah dilakukan dan berjalan dengan sangat baik terlihat dari pertumbuhan jumlah wisatawan yang datang ke negara tersebut, seperti misalnya yang tercermin dalam pariwisata yang ada di Beijing ibukota Cina.

Tabel 1.2 Contoh Objek Wisata Utama di Beijing

objek Wisata	Keterangan
Museum Istana Kuno	Museum Istana Kuno yang dulu disebut Kota Terlarang adalah istana kaisar dinasti-dinasti Ming dan Qing, dan merupakan kelompok bangunan kuno terbesar dan paling utuh yang ada di Tiongkok sekarang ini. Luas bangunan Kota Terlarang 155.000 m ² , merupakan benteng kota berbentuk persegi panjang, pada keempat sudutnya terdapat loteng bergaya indah, dikelilingi sungai pelindung selebar 52 m, membentuk benteng kota yang terjaga ketat dengan bangunan-bangunan yang indah megah, adalah intisari seni bangunan Tiongkok zaman kuno.
Taman Tiantan Beijing	Tiantan atau Kuil Langit adalah kuil yang terpenting dari kuil-kuil langit, bumi, matahari, dan bulan di Beijing, merupakan kelompok bangunan ibadah zaman kuno terbesar yang masih ada di Tiongkok maupun dunia sekarang ini. Kuil Tiantan dibangun pada tahun 1420 sebagai tempat kaisar dinasti-dinasti Ming dan Qing menyembah langit dan mohon panen raya, upacara sembahyang diadakan setiap musim semi untuk mohon panen raya, di musim panas untuk mohon hujan, dan di musim dingin adalah sembahyang untuk langit. Kuil Tiantan adalah karya bangunan yang sangat indah dan tak ada duanya di dunia, baik dilihat dari segi struktur, mekanika maupun estetika. Kuil Tiantan kini sudah menjadi taman umum yang berciri khas di Beijing.
Taman Beihai	Taman Beihai yang terletak di distrik pusat kota Beijing adalah taman kerajaan di Tiongkok zaman kuno. Luas taman ini 71 ha, merupakan taman istana di luar ibukota dari dinasti-dinasti Liao, Jin, dan Yuan, dan taman kerajaan dinasti-dinasti Ming dan Qing. Taman Beihai yang dijadikan taman umum tahun 1925 adalah salah satu taman kerajaan paling kuno, paling utuh, dan paling representatif yang ada di Tiongkok sekarang ini. Tata ruangnya yang unik sangat fantastik.
Tian An Men	Gerbang Tian An Men yang dibangun pada tahun 1417 adalah gerbang depan kota kerajaan dinasti-dinasti Ming dan Qing, semula disebut Gerbang Cheng Tian Men, kemudian dua kali musnah terbakar, dibangun kembali pada tahun 1651 dan diganti namanya menjadi Tian An Men. Tian An Men yang disebut sebagai "Pintu Negara" adalah tempat berlangsungnya upacara penting pada zaman dinasti-dinasti Ming dan Qing. Tian An Men adalah intisari bangunan Tiongkok zaman kuno,

	dan karya seni bangunan terbaik yang memmanifestasikan kecerdasan rakyat Tiongkok.
Taman Yihe	Taman Yihe (Taman Musim Panas) adalah taman zaman kuno yang terbesar dan terpelihara paling utuh di Tiongkok sekarang ini. Taman Yihe terletak di Distrik Haidian, Kota Beijing, luas 290 ha, 20 km lebih dari Tian An Men.
Tembok Besar	Tembok Besar Badaling sepanjang lebih 6.000 km, adalah lambang bangsa Tionghoa dan salah satu bangunan yang terbesar di dunia. Tembok Besar Badaling yang terletak di Kabupaten Yanqing merupakan bagian dari tembok besar, proyek pertahanan yang besar di Tiongkok zaman kuno. Tembok Besar Badaling yang dibangun pada tahun 1505 itu adalah sektor dan intisari dari Tembok Besar Dinasti Ming yang terpelihara paling baik. "Bukan Kesatria Sebelum Sampai di Tembok Besar", demikian kata pepatah di Tiongkok. Tembok Besar adalah objek wisata yang pasti dikunjungi wisatawan domestik dan asing dalam perjalanannya di Beijing. Sejauh ini banyak tokoh terkemuka di dunia telah berkunjung ke Tembok Besar Badaling.
13 Makam Dinasti Ming	13 Makam Dinasti Ming (Shisanling), yang merupakan makam dari 13 kaisar Dinasti Ming terletak di kaki Gunung Yanshan, Distrik Changping, Kota Beijing, luasnya sekitar 120 km persegi. Dalam kurun waktu 230 tahun sejak pembangunan Makam Changling (tahun 1409) oleh Kaisar Yongle, Dinasti Ming sampai dimakamkannya Kaisar Chengzhen, kaisar terakhir Dinasti Ming, telah dibangun 13 makam kaisar yang sangat megah, 7 makam selir, dan sebuah makam kasim. Di sini dimakamkan 13 kaisar, 23 permaisuri, 2 putra mahkota, 30 lebih selir, dan seorang kasim.

Bila kita mengikuti suatu rangkaian kegiatan pariwisata yang ada di Cina, para anggota rombongan perjalanan bisnis sedari awal dan selama perjalanan akan merasa disadarkan bahwa selain mengembangkan pasar, sekaligus juga mengamati bagaimana penanganan turis oleh pramuwisata, bagaimana objek dan *outlet* wisata dikelola. Kisah ini didapat ketika penulis melakukan kegiatan dalam rangkaian kegiatan seminar ekonomi dan dan kebudayaan Cina. Pengalaman ini

dapat menjadi suatu 'nilai tambah' dalam pemaknaan mengenai industri pariwisata Cina. Salah satu contohnya adalah sang pramuwisata atau *guide*, mereka lancar berinteraksi dalam bahasa Inggris, menguasai sedemikian banyak pengetahuan sejarah, setiap rute dan objek yang dilewati maupun dikunjungi. Interaksi dengan turis tamunya mengalir menyenangkan. Tentu saja antara lain berkat penguasaan bahasa tamu yang amat memadai. *Tourist spot* di Great Wall di pegunungan yang tak jauh dari kota Beijing, misalnya, setiap hari dikunjungi oleh ratusan bus pariwisata. Ribuan orang datang dan pergi, naik dan turun di dinding raksasa (yang secara keseluruhan panjangnya lebih 2600 KM.) Para pengunjung tampak menikmati suasana *care free*. Tiada pedagang asongan, para supir bus memarkir mobil dengan rapi bahkan tanpa adanya penjaga parkir. Suasana serupa sebenarnya ditemukan di setiap objek dan *outlet* wisata, di restoran besar atau penjual souvenir.

Dalam rangkaian berwisata, selain mengunjungi objek tempat wisata juga diperkenalkan tradisi yang mereka miliki, sebut saja teh atau obat-obatan Cina. Obat-obat herbal Cina sudah terdunia baik di dunia maka di Beijing diperlihatkan, bagaimana obat-obat herbal itu dikemas, ditawarkan, dan menjadi objek turis untuk dikunjungi. Pada sebuah kunjungan setelah menikmati lelahnya mendaki Tembok Besar, para pengunjung diajak untuk beristirahat sambil menikmati hidangan makan dan teh Cina yang terkenal. Di salah satu restoran yang dikunjungi, disediakan ruangan-ruangan kelas, khusus untuk menerima rombongan wisatawan. Di kelas tersebut disediakan sekitar lima ruangan dengan kursi tersusun. Di tempat tersebut, tamu disambut, diberi penjelasan

awal dalam bahasa tetamu. Kemudian setelah itu, beberapa dokter dan professor memasuki ruangan, memberi pelayanan demonstrasi memeriksa kondisi kesehatan tamu. Satu per satu turis yang bersedia diperiksa, didatangi ke kursi tempat duduk mereka.

Berdasarkan pemeriksaan itu, tamu mendapatkan penjelasan mengenai kondisi kesehatan fisik. Dan, diberikanlah *advis*, obat herbal mana yang perlu dikonsumsinya. Daftar obat diperlihatkan. Sang ‘turis pasien’ boleh membeli atau tidak membeli. Harga obat-obat herbal yang terkemas secara modern itu, bervariasi dari US\$ 50 sampai ratusan dollar. Pola serupa dilaksanakan para pelaku bisnis di Cina pada pengemasan, pengelolaan, dan penjualan “objek wisata teh”. Di lantai dua sebuah gedung “teh”, tersedia beberapa *meeting room* untuk 20 orang. Wisman duduk mengelilingi sebuah meja persegi yang rendah, di tengahnya seorang gadis mendemonstrasikan penyiapan minuman teh, menuturkan riwayat maupun manfaatnya, lalu menyajikan untuk dicicipi tetamu. Nah, setelah itu, grup turis dibawa ke lantai satu: sebuah toko teh, para turis pun “terayu” untuk membeli. Ada teh yang bermanfaat bagi perbaikan kondisi bagian-bagian dalam tubuh manusia, mulai dari ginjal, hati, darah, dan lain sebagainya. Begitu pulalah di *tourist spot* penjualan keramik khas buatan Cina. Lantainya luas memajang produk, sebelum dan setelah memasuki ruang penjualan, wisman tamu menyaksikan *handycrafter* sedang mengerjakan berbagai bentuk kerajinan tangan itu: guci besar dan kecil, vas bunga, teko, dan gelas untuk acara minum teh dan lain sebagainya. Maka para wisatawan yang berkunjung kemudian menyadari, betapa cara-cara yang apik seperti itu,

membuat para turis merasa “diperhatikan dan disenangkan”, kemudian merogoh kantong untuk berbelanja.

1.6 Investasi dan Kerja Sama dalam Sektor Pariwisata

Pertumbuhan ekonomi Cina yang cepat dan peningkatan struktur industri telah mendorong pertumbuhan sektor jasa dengan cepat. Pada tahun 2007 industri jasa berperan 11.4% dalam perekonomian Cina. Meskipun demikian, pertumbuhan sektor jasa masih tergolong rendah dan bahkan rasionya terhadap GDP menurun. Dalam beberapa tahun mendatang diperkirakan industri ini akan berkembang dengan rata-rata 10.4%. Dengan proporsi pendapatan sektor ini terhadap GDP yang terus meningkat dari 5.44% menjadi 8% pada tahun 2010, diperkirakan Cina akan menjadi negara dengan tujuan wisata sekaligus pengeksport wisatawan terbesar di tahun 2020. Di dalam sektor jasa, investasi di sektor hotel dan agen perjalanan adalah yang paling menonjol, yaitu sejak tahun 2000-2008 mencapai 29.23% dari total investasi. Investasi asing di sektor hotel dan agen perjalanan ini baru dibuka pemerintah pada tahun 1996 dalam bentuk *joint venture* dan pemerintah daerah bisa menyetujui proyek investasi. Selain insentif khusus, investor juga bisa memperoleh izin beroperasi selama 30 tahun. Kebijakan ini telah meningkatkan jumlah hotel sebanyak 419 hotel sejak 1985 hingga 1997, namun karena kelebihan pasokan, sehingga pada tahun 2003 jumlah hotel menurun menjadi 267. Sebaliknya, investasi hotel dari Hongkong, Macau dan Taiwan meningkat dari 270 menjadi 411 hotel pada tahun 2003. Kebijakan ini berubah setelah Cina bergabung dengan WTO. Investor bisa memiliki saham

dengan kepemilikan penuh setelah 4 tahun beroperasi di Cina. Namun investor hotel mewah masih dilarang hingga tahun 2004 dan baru diizinkan pada tahun 2007, kecuali untuk hotel kelas tinggi (Setyaningsih, 2009).

Dibandingkan dengan industri hotel, agen perjalanan merupakan bidang yang paling lemah dalam industri perjalanan dalam hal pendiriannya. Investasi asing untuk agen perjalanan baru diizinkan pada tahun 1996 khususnya dalam bentuk *sino foreign equity*, tetapi hanya terbatas pada agen perjalanan yang bisa bekerja sama dengan agen perjalanan nasional berskala besar, dan mereka dilarang untuk membuka cabang. Sayangnya persyaratan yang ditawarkan sangatlah rumit. Pada tahun 2003 agen perjalanan asing tidak berkembang dengan baik karena Cina hanya mengizinkan investor asing untuk beroperasi di perjalanan *inbound* saja, tetapi bukan untuk *outbound* agen perjalanan sehingga sebagian ada yang masih berjalan meskipun dengan keuntungan terbatas, sementara yang lain tutup, seperti kebanyakan agen perjalanan dari Eropa. Pada tahun 2006 jumlah agen perjalanan meningkat menjadi 22. Akan tetapi, terbukanya pasar pariwisata Cina tampaknya menjadi trend yang bersejarah dan kecepatan untuk memasuki pasar Cina tidak pernah berhenti. Maka untuk mempertahankan usaha ini mereka beroperasi dalam perjalanan *cicborder* dengan risiko mendapatkan sedikit keuntungan atau malah defisit. Beberapa agen mencoba melakukan strategi "*Deep blue sea*" untuk mencegah persaingan harga yang terlalu rendah, yaitu dengan menjual produk lain seperti beralih ke pemesanan tiket atau hotel untuk menghindari hambatan kebijakan dan membuka cabang di beberapa kota (Setyaningsih, 2009).

Keberhasilan pembangunan pariwisata Cina tidak lepas dari upaya membangun kerja sama baik berupa intra daerah, antardaerah maupun antarnegara, serta kerja sama dengan pihak swasta. Karena setiap daerah diberikan kewenangan untuk membangun sektor pariwisatanya maka mereka saling berlomba-lomba untuk membuat prestasi. Prestasi ini selanjutnya akan menentukan kinerja sektor pariwisata suatu daerah. Misalnya, Guangdong International Tourism and Culture Festival, Shanghai Expo, dan lain-lain (Setyaningsih, 2009).

1.7 Penutup: Bahan Pembelajaran

Pembangunan kepariwisataan menjadi isu yang sangat menarik dan menjadi pusat perhatian di Cina sejak reformasi ekonomi tahun 1978. Hasil yang dicapai oleh perkembangan industri pariwisata selama ini mendorong pemerintah untuk menjadikan sektor ini sebagai *leading sector* yang akan melibatkan subsektor lainnya, seperti transportasi, telekomunikasi, keuangan, perdagangan, dan pelayanan jasa seperti hotel dan restoran. Dengan demikian, industri pariwisata di Cina merupakan hasil dari mekanisme pembangunan ekonomi jangka panjang yang berkembang menjadi industri pariwisata. Industri pariwisata Cina adalah suatu industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang berbeda dalam ukuran, tempat, tugas, jenis organisasi, deretan jasa pelayanan yang diberikan dan cara yang digunakan untuk memasarkan dan menjualnya. Saat ini pariwisata Cina telah berubah menjadi salah satu obat bagi kejenuhan dan dapat memberikan kestabilan jasmaniah dan

rohaniah setelah melakukan berbagai rutinitas sehari-hari. Pariwisata kemudian menjadi sarana pertemuan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya termasuk orang Barat, wisatawan lokal (domestik), elit pemerintahan lokal, dan masyarakat sekitarnya. Berwisata tidak hanya menjadi milik kalangan atas, tetapi juga dapat dilakukan dan dinikmati oleh masyarakat kelas bawah.

Pariwisata itu sendiri menurut Robert McIntosh bersama Shashinant Gupta adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan serta para pengunjung lainnya (dalam Oka A. Yoeti, 1992: 8), sedangkan Salah Wahab (1975: 55) menyatakan bahwa pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Selanjutnya, sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga merealisasi industri-industri klasik seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan dan transportasi. Terkait dengan konsepsi industri pariwisata itu sendiri, Schmoll menyatakan bahwa "tourism is a highly decentralized industry consisting of enterprises different in size, location, function, type organization, range of service provided and method used to market and sell them." (Yoeti, 1985, p.5).

Dari berbagai urutan konsep mengenai pariwisata di atas, tampaknya kegiatan pariwisata—yang bisa dimaknai sebagai salah satu obat bagi kejenuhan, dapat memberikan kestabilan jasmaniah dan rohaniah setelah melakukan

berbagai rutinitas pekerjaan sehari-hari—merupakan sebuah arena kegiatan yang sarat dengan nilai filosofi maupun ekonomi. Di satu sisi pariwisata merupakan industri, di sisi yang lain juga bukanlah merupakan industri yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu industri yang terdiri dari serangkaian perusahaan yang menghasilkan jasa atau produk yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu tidak hanya dalam jasa yang dihasilkan, tetapi juga besarnya perusahaan, lokasi tempat kedudukan, letak geografis, fungsi, bentuk organisasi yang mengelola, dan metode atau cara pemasarannya. Oleh karena itu, tampaknya bahwa pariwisata mengindikasikan berbagai macam gagasan tentang tindakan kepariwisataan, kegiatan wisata serta dukungan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Bian, Y. 1997. 'Bringing Strong Ties Back in: Indirect Ties, Network Bridges, and Job Searches in China', *American Sociological Review*, 62: 366–385.
- Chen, Xiangming. 2005. *'Magic or Myth? Social Capital and Its Consequences in the Asian, Chinese, and Vietnamese Contexts'*. University of Illinois: Chicago.
- China National Tourism Administration. 2007. China Tourism Industry Statistics Report.
- China National Tourism Administration. 2009. China Tourism Industry Statistics Report.
- China National Tourism Office. 2007. *China Tourism Statistics*, CNTO Beijing.
- Choi, Hee Jung Jamie. 2002. *Ethnic Tourism in Southwestern China: The Politics of Development and Minority Identity*. Rhode Island: Providence.
- Cohen, Erik. 1984. 'The Sociology of Tourism: Approaches, Issues, and Findings,' in *Annual Review of Sociology*. vol. 10: 373–392.
- Diewert, W. E. and Nakamura, A. O. 2002. 'The Measurement of Aggregate Total Factor Productivity Growth'. In Heckman, J.J and Leamer, E.E (Eds). 2002. *Handbook of Econometrics*, 6, The Elsevier Science.
- Hakam, Syaiful. 2007. *The role of the Overseas Chinese in the FDI in the PRC*, Jakarta: PSDR-LIPI
- Hall, Colin Michael. 1994. *Tourism in the Pacific Rim: Development, Impacts and Markets*. Melbourne: Longman.
- Kynge, J. 2006. *'China Shakes the World'*. New York: Houghton Mifflin.

- Lindbeck, A. 2007. 'China's reformed economy'. *CESifo Forum*, 8(1): 8–14.
- Liu, X and Yang, Z. 2002. 'Several considerations on "tourism alleviating poverty"', *Economical Geography*, 22 (2): 241–44.
- Garnaut, Ross. 2004. 'The Origins of Successful Economic Reform in China', paper presented at the Tenth Anniversary of the China Centre for Economic Research, Peking University, Beijing, 16–17 September.
- Ma, Ke, Li Jun et. al. 2004. *China Business*. Beijing: China Intercontinental Press.
- McGregor, J. 2005. *One Billion Customers*. London: Nicholas Brealey Publishing.
- Nan, Lin. 2001. 'Guanxi: A conceptual analysis'. In A So, N Lin, and D. Poston (eds.), *The Chinese triangle of mainland China, Taiwan and Hong Kong: Comparative institutional analysis*. London: Greenwood Press, 153–166.
- Naisbitt, J. 1995. *Megatrends Asia*. London: Nicholas Brealey Publishing Limited.
- Oakes, Timothy S. 1995. 'Tourism in Guizhou: The Legacy of Internal Colonialism.' In Alan Lew and Lawrence Yu (eds.). *Tourism in China: Geographic, Political and Economic Perspectives*. Westview Press.
- Park, S and Y Luo 2001, 'Guanxi and organizational dynamics: Organizational networking in Chinese firms', *Strategic Management Journal*, 22: 455–477.
- Qiao, Yuxia. 1995. 'Domestic Tourism in China'. *Tourism in China: Geographic, Political and Economic*

- Perspectives*. In Alan Lew and Lawrence Yu (eds.). Westview Press.
- Research Center for Regional Resources–The Indonesian Institute of Sciences (PSDR-LIPI). 2008. *The Development Of Tourism In Cambodia: Cultural Conservation, History And Environment*. Research Center for Regional Resources–The Indonesian Institute of Sciences, Jakarta.
- Setyaningsih, Rita Pawestri. 2007. "The Improving Quality of FDI in China". In *Impact of the Market Economy on Foreign Direct Investment in the PRC*. Jakarta: PSDR LIPI.
- Tantri, Erlita. 2007. "Chinese Social Capital". In *Impact of the Market Economy on FDI in the PRC*. Jakarta: PSDR LIPI.
- United Nations World Tourism Organization. 2007. *Another Record Year for World Tourism* (News release), from <http://www.worldtourismorg/newsroom/Releases/2007/january/recordyear.htm> (accessed 31 January 2007).
- Urry, John. 1990. *The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies*, Sage Publications, London: Newbury Park and New Delhi.
- Uzzi, B. 1999. 'Embeddedness in the making of financial capital: How social relations and networks benefit firms seeking financing'. In *American Sociological Review*, 64: 461–505.
- Uzzi, B. 1997. 'Social Structure and Competition in Interim Networks: The Paradox of Embeddedness'. In *Administrative Science Quarterly*, Vol. 42: 35–67.
- Wank, David. 1998. 'Embedding Greater China: Kin, Friends and Ancestors in Overseas Chinese Investment

Networks'. Paper presented at the International Conference on 'City, State and Region in a Global Order: Toward the 21st Century', Hiroshima University, Hiroshima, Japan, December 19-20 in Chen, Xiangming 2005, *Magic or Myth? Social Capital and Its Consequences in the Asian, Chinese, and Vietnamese Contexts*. University of Illinois, Chicago.

Xiao, Honggen. 2005. The discourse of power: Deng Xiaoping and tourism development in China.

Ya, Shi. 2007. 'New Characteristics Emerge in Foreign Investment in China'. *China Economic News*, no. 20, May 28.

Zhang, Guangrui. 1995. 'China's Tourism since 1978: Policies, Experiences, and Lessons Learned'. In Alan Lew and Lawrence Yu (eds.). *Tourism in China: Geographic, Political and Economic Perspectives*. Westview Press.

Zhang, Yongwei. 1995. 'An Assessment of China's Tourism Resources.' In Alan Lew and Lawrence Yu (eds.). *Tourism in China: Geographic, Political and Economic Perspectives*. Westview Press.

Internet on line:

China Org. 2003. Criteria of Market Economy, Business, Report on the Development of China's Market Economy 2003. General Introduction of Market Economy Development Report, China.org.cn November 7, 2003, <http://www.China.org.cn/english/2003Chinamarket/79507.htm>

- Fuchun, Tang. 2004. China Strives for Market Economy Recognition, June 21, 2004, China.org.cn, <http://www.China.org.cn/english/BAT/98789.htm>
- Jiang, Wei. 2007. 'Imports to Hit \$1 Trillion by 2010', *China Daily*, updated: 2007-06-29 08:24, available on line on www.Chinadaily.cn
- <http://indonesian.cri.cn/1/2005/02/05/1@23813.htm>
- <http://indonesian.cri.cn/Chinaabc/chapter3/chapter30201.htm>
- <http://yudhim.blogspot.com/2008/08/budaya-bisnis-rrc-pada-era-globalisasi.html> 13/01/2009 12:06:31
- <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0307/01/ln/401743.htm> 13/03/2009 9:27:19
- <http://www.kontekaja.com/Cinatown.php?p=article&id=255>
- <http://indonesian.cri.cn/Chinaabc/chapter5/chapter50101.htm>
- http://www.researchandmarkets.com/reportinfo.asp?report_id=220246
- Hutabarat, Arifin. 13 Juli 2010. Mengembangkan Pasar Negeri Cina. <http://traveltourismindonesia.wordpress.com/2010/07/13/mengembangkan-pasar-negeri-cina/>
- World Tourism Organization. 2008. <http://unwto.org/facts/eng/barometer.htm>.

II
**Investasi Langsung Asing dalam Pembangunan Lima
Tahunan Cina:
Makna bagi Indonesia**
Rita Pawestri Setyaningsih

Abstract

This paper explains about the development of FDI in the five-year development plan of Cina, starting from the 5th to the 11th of the five year plan and the plan for the 12th five year development. In particular, it discusses how investment policies in each five year development plan was implemented and give effects on the investment in flows. This will also explain how Indonesian can learn from Cina's experiences in managing FDI, what kind of aspects that are still constrain Indonesia to attract more FDI.

Keywords: *Investasi Langsung Asing, Pembangunan Lima Tahunan Cina.*

2.1 Pendahuluan

Investor saat ini sedang menanti pengumuman resmi dari Pemerintah Cina tentang Rencana Pembangunan Lima Tahunannya ke-12 (2011–2015) yang akan didiskusikan kepada Dewan Pusat Partai Komunis yang dijadwalkan Oktober 2010 ini. Rencana pembangunan lima tahunan ini akan menentukan arah kebijakan pengembangan investasi langsung asing dalam lima tahun ke depan.

Artikel ini akan membahas mengenai tren perkembangan investasi langsung asing di Cina dalam paparan pembangunan lima tahunan. Bagaimana perkembangan investasi langsung asing, kebijakan investasi pemerintah serta pengaruhnya akan diulas dalam bahasan ini dan pada akhirnya adalah bagaimana Indonesia memaknai pengalaman Cina tersebut? perkembangan investasi langsung asing dibagi ke dalam beberapa periode. Pembagian ini didasarkan pencapaian yang sangat signifikan oleh Pemerintah Cina dalam menarik investasi asing serta kebijakan-kebijakan penting yang sangat memengaruhi investasi asing Cina.

Periode pertama adalah pembangunan lima tahun kelima hingga ke tujuh (1976–1990), dan pada pertengahan periode tersebut untuk pertama kalinya Cina mengimplementasikan kebijakan pintu terbukanya. **Periode kedua** adalah mulai dari pembangunan lima tahun Cina ke-8 hingga ke-9 (1991–2000). Periode III merupakan periode pembangunan lima tahun ke-10 (2001–2005) dan terakhir merupakan periode pembangunan lima tahun ke-11 (2006–2010).

2.2 Periode Pertama: Pembangunan Lima Tahun ke-5 hingga ke-7 (1976–1990)

Pembangunan lima tahun ke-5 ini dikenal sebagai periode reformasi ekonomi Cina. Keberhasilan reformasi ekonomi membawa dampak tidak hanya kepada peningkatan nilai *output* industri, dan pertanian, namun juga GDP Cina yang mencapai \$147 miliar pada tahun 1978 atau meningkat

12,3% dibanding tahun sebelumnya (World Development Indicators database, 2010).

Periode ini juga merupakan periode di mana Cina melakukan pembangunan ekonominya secara cepat. Panitia pusat partai Komunis melakukan sidang pleno ke-3, memutuskan untuk mengalihkan fokus pembangunan pada modernisasi Cina dan ini menandai era baru bagi pembangunan ekonomi Cina.

Keran investasi yang sebelumnya tertutup bagi investor asing mulai dibuka melalui penerapan kebijakan pintu terbuka (*open door policy*). Hasilnya, pada tahun tersebut investasi langsung asing mulai meningkat, meskipun dengan pertumbuhan rendah. Antara 1979–1990 tercatat hanya 29.049 proyek yang disetujui, dengan total nilai investasi sebesar \$39 miliar dengan nilai investasi riil \$23 miliar.

Hampir sebagian besar investasi langsung asing merupakan *joint venture* dengan BUMN Cina dan hanya terbatas dari Hong Kong, Taiwan dan Singapura. Namun diduga, modal ini merupakan investasi yang bersifat "*round tripping*" (Yasheng 1998: 56 dan Xiaolu 2004: 82), sebagaimana ditunjukkan oleh tidak adanya aliran investasi asing langsung riil dari Data MOFTEC. Artinya, dana yang sebenarnya berasal dari Cina dialirkan dulu ke Hong Kong kemudian masuk kembali ke Cina dalam bentuk investasi langsung asing. Perusahaan asing tersebut banyak mengadopsi strategi ini demi mendapatkan keuntungan atas kebijakan investasi saat itu. Dengan demikian, modal '*round*

*tripping*⁶ ini merupakan modal ilegal yang bisa menjadi 'uang panas' (Yasheng, 1998: 83) atau 'pencucian uang' (Xiaolu, 2004: 82). Dengan demikian, perkembangan investasi langsung asing selama dua periode pembangunan lima tahunan Cina lebih didorong oleh perubahan kebijakan pemerintah ketimbang fundamental ekonomi jangka panjang (Yasheng 1998: 63).

Selain itu, hubungan budaya yang kuat⁷ antara investor di negara Asia Timur tersebut dengan investor Cina (Chung dan Bruton, 2008) serta kondisi infrastruktur yang buruk (OECD, 2000) menjadi faktor utama pembentuk pola investasi asing langsung di Cina saat itu. Investasi Hong Kong banyak ditanamkan di Provinsi Guangdong—wilayah di bagian selatan Cina, sementara investasi Taiwan mendominasi wilayah Fujian yang mendekati selat perbatasan Taiwan-Cina dan sebagian Provinsi Zhejiang.

Untuk menarik lebih banyak investor asing, pemerintah membangun Special Economic Zones (SEZs). Kurang lebih dalam dua periode pembangunan lima tahun, Cina berhasil mengembangkan jumlah SEZs dari empat daerah menjadi empat belas daerah.

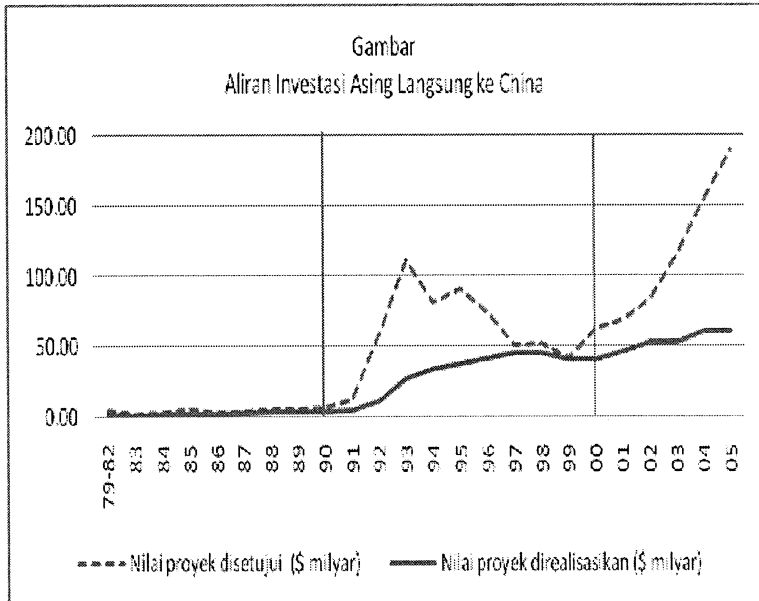
⁶ Ahli-ahli ekonomi keuangan internasional juga menyebutkan bahwa sekitar 30–50% dari investasi langsung asing saat itu termasuk dalam kategori "*round tripping*". Namun sebagian yang lain menyebutnya hanya sekitar 10–20% (Xiaolu 2004: 83). FDI kategori ini bahkan diyakini masih terjadi hingga tahun 1997–1998. Jika diasumsikan pada tahun 1997–1998 terdapat 20% dari investasi jenis ini, maka setidaknya ada \$9 miliar modal ilegal.

⁷ Tipe investasi jenis ini muncul di Cina di mana dialek bahasa atau hubungan *kinship* merupakan faktor dominan (Child, Chung, & Davies, 2003).

Ketika pemerintah kembali mencanangkan rencana pembangunan lima tahunannya ke-6 (1980–1985), pembangunan ekonomi lebih stabil dan sehat. Peningkatan investasi langsung asing secara signifikan terjadi karena kebijakan insentif. Namun, efek dari insentif ini baru terlihat mencolok pada periode pembangunan lima tahun ke-8, mencapai US\$ 110.852 miliar (1993). Dilihat dari industri yang berkembang, investasi langsung asing lebih fokus pada industri padat tenaga kerja. Perusahaan asing Taiwan dan Hong Kong menggunakan teknik dan proses sederhana untuk membuat baju, payung, dan sepatu (Yasheng 1998: 5).

Saat pembangunan lima tahun ke-7, reformasi ekonomi masih menjadi agenda utama pembangunan Pemerintah Cina. Secara khusus, peningkatan efisiensi ekonomi, modernisasi ekonomi serta perubahan struktur industri menjadi fokusnya. Untuk meningkatkan investasi langsung asing, pemerintah melakukan pembenahan peraturan perundang-undangan serta struktur investasi. Sebagai pendukungnya, dilakukan percepatan pembangunan energi, komunikasi, dan telekomunikasi serta industri-industri hulu. Secara bersamaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sayangnya, periode pembangunan lima tahun ke-7 ini diwarnai oleh peristiwa Tiananmen yang secara negatif memengaruhi pertumbuhan investasi langsung asing (Ping, 2009). Namun, sisi positifnya terlihat pada masuknya investor non etnis Cina–Jepang sehingga menambah variasi investor asing di Cina. Hanya saja, nilai investasinya relatif masih rendah bila dibandingkan dengan investasi asal Taiwan.



Gambar 2.1 Aliran Investasi Asing Langsung ke China

2.3 Periode II: Pembangunan Lima tahunan ke-8 hingga ke-9 (1991–2000)

Pada periode ini Cina mengalami fase baru dalam pembangunan ekonominya. Pemimpin Cina—Deng Xiaoping—yang menggantikan Mao Zhe Dong, berhasil membawa Cina pada perubahan yang mencolok. Pada Maret 1991, pemerintah menyetujui rancangan 10 tahun pembangunan ekonomi dan sosial nasional serta rencana pembangunan lima tahunan ke-8. Hasilnya, perekonomian nasional tetap tumbuh dua digit per tahun, di mana GDP pada

tahun 1995 mencapai \$728 miliar atau 4,3 kalinya dibanding tahun 1980.

Untuk memperbaiki iklim investasi, Pemerintah Cina membangun berbagai infrastruktur, termasuk jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan, bandara serta tenaga listrik. Akibatnya, *output* industri sekunder meningkat 17.3%, diikuti oleh kenaikan di bidang sektor jasa sebesar 9.5%. Sumbangan industri sekunder terutama manufaktur terhadap negara mencapai 47.7% dari total bidang usaha.

Selain itu, investasi langsung asing meningkat secara signifikan, dan mencapai puncaknya pada tahun 1993 sebesar \$110.852 miliar. Sebanyak 845 proyek berskala besar dan menengah selesai dilaksanakan. Investor Asia mulai mendominasi dan berinvestasi dalam berbagai sektor, tidak hanya dalam produk padat tenaga kerja namun juga di real estate, pembangunan infrastruktur, jasa keuangan, dan manufaktur (Yasheng, 1998: 6). Meskipun pada tahun 1994–1999 pertumbuhan investasi melemah, namun masih tergolong tinggi.

Sejak saat itu, Cina menjadi negara terbesar di antara negara-negara sedang berkembang sekaligus menjadi negara terbesar kedua di dunia yang berhasil menarik investasi langsung asing (UNCTAD, 1995). Fakta ini menunjukkan bahwa lokasi strategis Cina yang berada di tengah negara-negara di dunia menjadi faktor penting dalam pertumbuhan investasi langsung asing di Cina. Inilah yang menjadi keuntungan komparatif Cina dibandingkan negara lain di dunia (Zhang, 2001a).

Sektor jasa yang dulunya masih dibatasi mulai banyak dilirik investor asing, namun masih terbatas pada bentuk *joint venture*. Bukan hanya sektor pariwisata, investor asing juga

mulai memasuki sektor-sektor lain seperti perbankan, asuransi, ritel, real estat, komunikasi dan transportasi, konsultasi informasi, jasa khusus, pos dan telekomunikasi, perdagangan domestik dan perdagangan luar negeri dan media massa serta eksplorasi minyak.

Selain karena perbaikan infrastruktur, peningkatan investasi langsung asing yang signifikan merupakan hasil dari penghapusan hambatan-hambatan dalam FDI (Yasheng, 1998: 15). Tiga faktor utama yang memengaruhi peningkatan tersebut adalah tenaga kerja yang murah dan terlatih, membaiknya lingkungan bisnis, dan perubahan dalam kebijakan preferensial (Xiaolu, 2004: 81). Reformasi sistem keuangan membuat sistem pasar lambat laun mulai memainkan peran yang lebih besar dalam pengalokasian sumber daya. Dominasi BUMN dalam perekonomian mulai digantikan oleh swasta. Keterbukaan Cina makin terasa ketika lebih dari 1.100 kota pada tingkat *county* (setaraf kabupaten) membuka diri terhadap dunia luar, di mana beberapa di antaranya merupakan kawasan berikat serta zona pengembangan ekonomi. Perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di dalam zona-zona tersebut diberikan tarif preferensial, seperti tingkat pajak yang rendah, bebas pajak impor dan ekspor (Xiaolu, 2004: 80).

Dampak dari meluasnya keterbukaan itu tampak pada meningkatnya total nilai perdagangan luar negeri Cina yang mencapai \$ 1,01 miliar selama periode tersebut atau meningkat hampir 20% dari periode sebelumnya. Nilai total ekspor per tahun mencapai RMB 100 miliar atau sama dengan 3% proporsi perdagangan dunia. Dengan pencapaian tersebut, pada tahun 1995 Cina menduduki posisi ke-11 di

dunia dalam hal volume ekspor dan impor (www.China.org.cn, 2010).

Bahkan ketika negara-negara di Asia Tenggara mengalami krisis keuangan sekalipun, pertumbuhan ekonomi Cina masih stabil, bahkan mencapai dua digit. Ini mengindikasikan kuatnya fundamental perekonomian Cina saat itu sehingga semakin menarik investor asing.

Meskipun liberalisasi ekonomi serta kebijakan investasi langsung asing memberikan dampak positif bagi perkembangan investasi asing, namun di satu sisi kondisi lingkungan politik investasi saat itu masih lemah (www.China.org.cn, 2010). Kondisi ekonomi yang tidak transparan⁸ serta perlindungan pasar domestik oleh pemerintah memengaruhi investasi langsung asing secara negatif (Xiaolu 2004: 81).

Untungnya Pemerintah Cina segera tanggap akan pentingnya menciptakan lingkungan politik yang kondusif agar dapat menarik investor asing. Pemerintah berjanji untuk menghilangkan praktik-praktik yang tidak adil antara perusahaan lokal dan asing, memperkuat perundang-undangan, membuka lingkungan pasar yang adil, menyatu serta melindungi hak-hak kepemilikan (*property rights*) dari perusahaan asing (Ali dan Wei, 2005).

⁸ Secara khusus, hubungan antara Cina dan Amerika yang tidak jelas serta kondisi politik Cina yang tidak menentu mempengaruhi investasi asing asal Amerika (Chen *et al.*, 2000).

2.4 Pembangunan Lima Tahun ke-10 (2001–2005)

Dalam pembangunan lima tahun yang ke-10 pertumbuhan ekonomi Cina mencapai 7% dan GDP meningkat hingga \$1,3 triliun dengan pendapatan per kapita \$1,041.64 sehingga menempatkan Cina di ranking 117 di tingkat dunia. Guna meningkatkan daya saing industri, pemerintah meningkatkan dan mengoptimalkan struktur industrinya melalui perbaikan di bidang informasi teknologi dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah mulai mengaitkan perlunya keselamatan lingkungan dalam pembangunan ekonomi. Perhatian pemerintah itu diwujudkan dalam rencana pengurangan polutan sebesar 10% dibandingkan pada tahun 2000.

Selain itu, kuantitas investasi langsung asing tidak diimbangi oleh kualitas lingkungan yang baik. Investasi langsung asing serta kegiatan ekspor-impor telah menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan dan degradasi kesehatan lingkungan. Untuk itu, Pemerintah Cina mengupayakan untuk lebih mengutamakan kualitas investasi asing melalui program *industrial upgrading*.

Satu hal penting yang menandai periode ini adalah bergabungnya Cina ke dalam keanggotaan WTO sehingga menghilangkan tarif-tarif yang menghambat masuknya investasi asing. Hal ini ditanggapi positif oleh investor, tercermin dari meningkatnya nilai investasi langsung asing selama periode tersebut. Dari \$69,20 miliar nilai investasi yang disetujui, \$46,88 miliar di antaranya berhasil direalisasikan. Bahkan sektor jasa menjadi "*hot spot*" bagi investor asing.

Namun, salah satu tantangan Cina adalah adanya tuduhan mengenai praktik antidumping atas produk-produk

Cina di luar negeri. Maka pada tahun 2004, hasil investigasi anggota-anggota WTO menemukan adanya 103 tindak antidumping serta mengeksekusi 91 kasus antidumping yang dilakukan Cina sehingga Cina harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibatnya, terjadi reaksi berantai dari negara-negara pengimpor produk Cina dengan cara mengurangi kuantitas produk impor serta pengalihan produksi di luar Cina (*The story*, 2001: 80–82).

2.5 Periode Tiga: Pembangunan Lima Tahun ke-11 (2006–2010)

Dalam pembangunan lima tahun ke-11 ini, upaya modernisasi Cina terus dilanjutkan. Namun satu hal khusus yang menandai periode ini adalah dibuatnya rencana pembangunan lima tahun secara lebih transparan. Hal ini tercermin dari sejak awal perencanaannya yang melibatkan kalangan publik, industriawan, berbagai ahli serta pemaparan dalam *web site* sehingga bisa diketahui oleh khalayak umum. Langkah ini merupakan satu upaya untuk menciptakan sistem manajemen investasi asing yang transparan, adil serta menciptakan kebijakan yang bisa diprediksi (Xinhua News Agency, 2006).

Namun sayang, dunia dilanda krisis keuangan global yang membawa dampak pada menurunnya aliran investasi langsung asing ke Cina. Seperti halnya yang terjadi di Amerika, India, Brazil, dan Federasi Rusia, investasi langsung

asing di Cina juga harus menghadapi masa pemulihan.⁹ Meski demikian, Cina tetap diprediksi memiliki prospek yang menjanjikan, baik dalam jangka menengah maupun panjang (UNCTAD, 2009).¹⁰

Namun, bila dilihat dari pencapaian selama ini terlihat bahwa kualitas investasi asing di Cina tidak dibarengi oleh keseimbangan aspek ekonomi lainnya. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi Cina yang tinggi berhasil menarik investasi langsung asing secara signifikan. Namun di sisi lain, investasi langsung asing tidak secara signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Cina (Changwen, 2007). Hanya sekitar 72% investasi mampu meningkatkan pembangunan ekonominya. Selain itu, 30% dari investasi langsung asing di Cina bergerak di sektor industri padat polusi sehingga Cina harus mendesain sistem akses lingkungan yang lebih ketat.

Untuk menanggulangi situasi lingkungan yang lebih buruk lagi, pemerintah menetapkan pembaharuan industri di mana restrukturisasi ekonomi sebagai agenda utamanya. Aspek yang menjadi perhatian pemerintah meliputi percepatan reorganisasi dan transformasi; pembaharuan struktur industri dan pengoptimalisasian, dan pembangunan sektor jasa secara cepat (Ma, 2004: 67).

⁹Hal ini diindikasikan oleh respon dari perusahaan besar multinasional dalam World Investment Prospect Survey (WIPS) 2009–2011 (UNCTAD, 2009).

¹⁰Industri yang kurang sensitif terhadap lingkaran bisnis dan yang di dalam pasar permintaannya tetap (seperti produk pertanian dan beberapa jasa) serta yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk bertumbuh (seperti farmasi) cenderung akan menjadi mesin penggerak booming FDI di masa mendatang (UNCTAD, 2009).

Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah antara lain meningkatkan penggunaan teknologi tinggi dalam menciptakan industri manufaktur berskala besar termasuk dalam membangun kelompok perusahaan besar, mendorong perusahaan-perusahaan untuk memproduksi barang berkualitas lebih baik. Pembangunan sektor jasa pun dilakukan secara modern. Selain itu, Pemerintah Cina juga berusaha mengurangi konsumsi energi per unit GDP sebesar 20% pada tahun 2010 untuk mengurangi efek pemanasan global, melarang industri agar tidak boros sumber daya serta melarang proyek-proyek baru yang akan melakukan perluasan energi intensif, seperti pembangkit listrik termal serta industri yang padat polusi (seperti industri semen, kimia, baja, besi) berskala kecil.

Relatif rendahnya biaya ekspor dan implementasi kebijakan pajak *rebate*, pajak ekspor selama ini yang ditujukan untuk mendorong ekspor produk Cina sebagian besar menghasilkan polusi yang volumenya semakin meningkat. Untuk mengurangi produksi produk-produk yang bersifat padat polusi (*pollution-intensive products*) dan yang boros bahan baku (*resource-consumption products*), pemerintah perlahan-lahan mengurangi *rebate* pajak ekspor (Setyaningsih, 2007). Pajak lingkungan, perdagangan emisi, sistem perizinan, dan sistem moneter serta fiskal juga dilakukan untuk mencegah dan menghindari peningkatan polusi. Sebagai akibatnya, terjadi perubahan karakteristik dari investasi asing langsung di Cina, yang meliputi penurunan persentase modal dalam sektor industri manufaktur, peningkatan investasi di sektor jasa serta meningkatnya proporsi investasi dengan kepemilikan saham penuh (Ya Shi, 2007).

2.6 Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-12

Hingga saat ini investor masing menunggu pengumuman mengenai Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-12. Namun berbagai kalangan sudah menduga-duga mengenai apa yang akan dilakukan pemerintah pada lima tahun ke depan. Mengapa?

Dalam pidatonya di Tianjin¹¹ September lalu, presiden Cina Wen Jiabao mengatakan bahwa Cina masih akan melaksanakan pembangunan yang seimbang, yaitu memperluas pembangunan domestik dan kebutuhan luar negeri secara simultan (<http://id.China-embassy.org/indo/xwdt/t752314.htm>, 2010). Artinya, pemerintah akan terus melaksanakan kebijakan yang bermanfaat bagi keterbukaan, termasuk menyambut investasi asing dan memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya. Melalui pengembangan inovasi, kemajuan teknologi, peningkatan struktur industri, perbaikan regulasi dan standardisasi, diharapkan tujuan ini akan berhasil.

Sebagai upaya menciptakan lingkungan investasi yang ramah lingkungan, pemerintah mengharapkan pada rencana pembangunan lima tahun ke-12 ini Cina bisa memenuhi target efisiensi penggunaan energi sebesar 20% dari GDP. Diperkirakan konsumsi energi per unit nilai tambah industri akan menurun 6% pada tahun ini (*China Daily*, 2010). Konsistensi Pemerintah Cina terhadap efisiensi energi ini sudah tercermin sejak 2006 lalu, di mana penggunaan energi

¹¹ Dalam Sidang Tahunan Kampiun Baru 2010 Forum Ekonomi Dunia, atau Forum Davos, Musim Panas yang digelar di Tianjin (<http://id.china-embassy.org/indo/xwdt/t752314.htm>, 2010)

selalu menurun sebesar 1.9% (2006) menjadi 5.4% (2007), kemudian 8.4% (2008) dan terakhir 6.6% (2009).

Dalam praktiknya, sebanyak 18 *municipalities*, provinsi dan daerah otonom bersama-sama berupaya mencapai target tersebut, sementara enam hingga tujuh provinsi lainnya telah berhasil mengatasi masalahnya. Restrukturisasi ekonomi, konservasi energi dan meningkatkan efisiensi penggunaan merupakan cara-cara yang bisa ditempuh. Selain itu, pemerintah juga akan membangun energi terbarukan dan meningkatkan *carbon sink* di hutan (Lin and Li Jing, 2010). Hasilnya, pada tahun 2010 ini, Cina sudah bisa mengurangi konsumsi energinya sebanyak 5% (China daily (a), 2010). Bahkan angka ini melebihi target dari yang direncanakan sebelumnya.

Cina merupakan produsen gas emisi terbesar di dunia, namun di sisi lain Cina juga sangat aktif dalam mendukung perkembangan investasi ramah lingkungan. Pada tahun 2009 Cina menjadi pemimpin dalam *green investment* pada tahun 2009, di mana sepertiga dari paket stimulus ekonomi sebesar \$221 miliar digunakan untuk membangun infrastruktur yang dapat meningkatkan efisiensi energi .

2.7 Faktor Determinan

Keberhasilan Cina dalam menarik investasi langsung asing, patut diapresiasi karena Pemerintah Cina memang telah berupaya untuk menyediakan apa yang dibutuhkan investor asing. Jumlah tenaga kerja yang melimpah serta tingkat upah yang murah, ukuran pasar yang besar, ketersediaan infrastruktur yang memadai serta kebijakan investasi yang liberal menawarkan daya tarik bagi investor

asing. Ditambah lagi dengan kemampuan Cina dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil serta keterlibatan Cina dalam keanggotaan WTO yang menandakan kepercayaan diri Cina untuk bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Namun itu semua tidak akan ada artinya bila situasi politik negara tidak stabil. Untungnya, selama ini Cina dapat menekan suasana politik yang kadang-kadang memanas.¹²

2.8 Tantangan Cina dalam Pengembangan Investasi Langsung Asing

Enam periode pembangunan lima tahunan Cina hampir terlewati secara keseluruhan. Perkembangan investasi langsung asing ikut berperan dalam membangun Cina menjadi negara *superpower*. Namun demikian, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi Cina di masa depan. Sebuah bukti empiris menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Cina memang berhasil menarik investasi langsung asing dengan signifikan. Namun sebaliknya, investasi langsung asing hanya secara perlahan-lahan meningkatkan perekonomian Cina (Changwen, 2007). Hanya sekitar 70% investasi langsung asing mempunyai pengaruh positif bagi pembangunan ekonomi Cina. Fakta ini mematahkan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan overestimasi atas peran investasi langsung asing dalam pembangunan ekonomi Cina (Changwen, 2007).

¹² Seperti pernah terjadi di Tibet, Xian jiang, dan Inner Mongolia yang memunculkan isu-isu separatisme.

Secara teori dijelaskan bahwa bila perusahaan multinasional terkonsentrasi di suatu wilayah, maka secara keseluruhan pendapatan dan produktivitas daerah tersebut akan lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Dan terbukti bahwa investasi langsung asing masih terkonsentrasi di wilayah Cina bagian timur sehingga produktivitas hanya terjadi di wilayah Cina bagian timur saja. Dengan kata lain, pertumbuhan investasi langsung asing masih belum dapat memberikan efek pemerataan bagi seluruh daerah di Cina (Xiaolan, 2007).¹³ Beberapa hal yang menyebabkan ketimpangan ini antara lain karena perbedaan tingkat teknologi, keterampilan, tingkat penyerapan investasi langsung asing serta perkembangan ekonomi daerah (Du and Dong, 2004). Selain itu, sebuah bukti empiris menunjukkan terjadinya disparitas antara investasi lokal dan perusahaan asing, meskipun tidak begitu signifikan (Xing, Keqiang dan Chan, 2008)

¹³ Struktur ekonomi antara Cina bagian pedalaman dan Cina bagian pantai timur) tidak merata. Cina bagian pantai timur masih mendapatkan manfaat yang lebih besar dalam hubungan ekonomi yang dilakukan di dalam wilayah. Sementara perdagangan dan investasi langsung asing juga menjadi dualism dalam beberapa bentuk di sepanjang garis pantai. Meningkatnya ketidakmerataan modal manusia (sumber daya manusia) yang dihasilkan dari hubungan ekonomi inter-regional tersebut dan disertai dengan *brain drain* akibat *trade-cum*-FDI telah menyebabkan peningkatan disparitas pendapatan yang lebar, yang dalam jangka panjang akan memengaruhi pemetaan pembangunan regional (Xiaolan, 2007)

2.9 Memaknai Cina

Bagi Indonesia, memaknai keberhasilan Cina dalam mengembangkan investasi langsung asingnya adalah dengan memahami perkembangan kebijakan investasi Cina yang dituangkan dalam program pembangunan lima tahunannya. Satu hal penting yang patut dicontoh adalah mengenai bagaimana Cina mengupayakan pengelolaan “*green investment*”; mementingkan kualitas dari investasi langsung asing ketimbang sekadar kuantitas. Tentu hal ini menjadi pelajaran baik bagi Indonesia yang terus berusaha meningkatkan aliran investasi asing.

Secara umum, untuk beberapa faktor, Indonesia juga tidak kalah dari Cina. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah sekaligus sumber daya manusia yang banyak dengan kualitas yang memadai dan tingkat upahnya pun relatif murah. Pasar domestik cukup besar dan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, terutama dibuktikan dengan pertumbuhan yang tetap positif di saat krisis global. Namun, faktor-faktor lain seperti stabilitas politik dan sosial, kepastian hukum, dan kebijakan ekonomi yang kondusif kadang sulit sekali tercapai sepenuhnya, bahkan terhitung sejak krisis 1997 (Tambunan, 2007). Selain itu, fasilitas infrastruktur yang belum memadai serta birokrasi yang kurang efisien menyebabkan meningkatnya biaya produksi, dan pada akhirnya menurunkan daya saing produk Indonesia. Kurangnya kemampuan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan penting untuk meningkatkan iklim investasi bahkan telah menempatkan Indonesia di posisi paling rendah di antara negara-negara di Asia Pasifik (Thee, n.d).

Berbagai hambatan yang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini menunjukkan masih perlunya usaha keras pemerintah Indonesia untuk menarik investasi langsung asing lebih banyak lagi. Artinya, saat ini kuantitas masih lebih penting dibandingkan kualitas, seperti pernah dialami Cina sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Ali, S. dan Wei, G. 2005. "Determinants of FDI in China". *Journal of Global Business and Technology*, Volume 1, Number 2, Fall 2005.
- Changwen, Zhao dan Jiang, Du. 2007. "Causality between FDI and Economic Growth in China". *The Chinese Economy*, vol. 40, no. 6, November–December 2007, pp. 68–82. M.E. Sharpe, Inc.
- Chen, L.B.; Zhou, Z.Y., dan Wan, G.H. 2000. "Why is U.S. direct investment in China so small?". *Contemporary Economic Policy*, 18(1), pp.95–106 dalam Ali S dan Wei, G. 2005. Determinants of FDI in China, *Journal of Global Business and Technology*, Volume 1, Number 2, Fall 2005.
- Child, J., Chung, L., dan Davies, H. 2003. "The performance of cross-border units in China: A test of natural selection, strategic choice and contingency theories." *Journal of International Business Studies*, 34, 242–254 dalam Chung Ming Lau and Garry D. Bruton. 2008. FDI in China: What We Know and What We Need to Study Next. *Academy of Management Perspectives*, November.

- China Daily. 2010(a). Green targets to be met as Five-Year Plan effective, http://www.Chinadaily.com.cn/Cina/2010-10/09/content_11387523.htm, accessed on Oct 9, 2010.
- China Daily. 2010(b). Roadmap to draw green investments, http://www.Chinadaily.com.cn/imqq/bizCina/2010-09/30/content_11370148.htm, accessed on Oct 9, 2010
- China.org.<http://www.China.org.cn/english/MATERIAL/157625.htm>, accessed on Oct 1, 2010.
- Chung, M. L. and Bruton, G. D. 2008. FDI in China: What We Know and What We Need to Study Next. *Academy of Management Perspectives*. November.
- Cole, Matthew A. , Elliott, Robert J. R. and Zhang, Jing. 2009. 'Corruption, Governance and FDI Location in China: A Province-Level Analysis'. In *Journal of Development Studies*, 45: 9, 1494–15.
- Du, J., J. Ying, and T.W. Dong. 2004. "The Empirical Analysis of Foreign Direct Investment and Regional Economic Growth." *Journal of Sichuan University* (social science edition) 2: 27–31 (Bahasa Cina). Dalam Changwen Zhao, Jiang Du. 2007. Causality Between FDI and Economic Growth in China, *The Chinese Economy*, vol. 40, no. 6, November–December 2007, pp. 68–82. M.E. Sharpe, Inc.
- FDI inflows into China 1984–2009, <http://www.Chinability.com/FDI.htm>, accessed Oct, 4, 2010
- Lan, Lan and Li, Jing. 2010. China on target to achieve green goals, China Daily,

- http://www.Cinadaily.com.cn/imqq/bizCina/2010-09/30/content_11370148.htm, accessed on Oct 9, 2010.
- Ma, Ke dan Li, Jun *et al.* 2004. *China Business*, Beijing: China Intercontinental Press.
- OECD. 2000. Main Determinants and Impacts of Foreign Direct Investment on China's Economy, Working papers on International Investment. <http://www.oecd.org/dataoecd/57/23/1922648.pdf>.
 Dalam Ali S. dan Wei, G. 2005. Determinants of FDI in China. *Journal of Global Business and Technology*. Volume 1, Number 2, Fall 2005.
- Ping, Z. 2009. A Comparison of FDI Determinants in China and India, Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com), Wiley Periodicals, Inc.
- Setyaningsih, R. P. 2007. "The Improving Quality of FDI in China". Dalam PSDR. *Impact of the Market Economy on Foreign Direct Investment in People's Republic of China*. Jakarta: LIPI Press.
- Tambunan, T. 1997. Daya Saing Indonesia dalam Menarik Investasi Asing. Jakarta: Pusat Studi Industri dan UKM - Universitas Trisakti, paper.
- The 6th Five-Year Plan (1981–1985) <http://www.China.org.cn/english/MATERIAL/157619.htm>. accessed Oct 4, 2010.
- The Economist, Reaching for a Renaissance, 31 March 2007, http://www.economist.com/node/8880918?story_id=8880918.
- The Story of Made in China. 2006. Beijing: Foreign Languages Press.
- Thee, K.W. n.d. Foreign Direct Investment From Northeast Asia to Southeast Asia, a paper.

- UNCTAD, World investment report 2009:
http://www.unctad.org/en/docs/wir2009_en.pdf,
 diakses 10 oktober 2010.
- UNCTAD. 1995. *World Investment Report, Transnational Corporations and Competitiveness*, New York and Geneva: United Nations dalam Ali S dan Wei, G. 2005, Determinants of FDI in China, *Journal of Global Business and Technology*, Volume 1, Number 2, Fall 2005.
- World Development Indicators database, economy statistics, GDP (1978) by country,
http://www.nationmaster.com/graph/eco_gdp-economy-gdp&date=1978
- Xiaolan, Fu. 2007. Trade-cum-FDI, Human Capital Inequality and Regional Disparities in China: the Singer Perspective, Published (on line) Springer Science+Business Media B.V.
- Xiaolu, Wang. 2004. *People's Republic of China*, dalam Brooks dan Douglas, H; dan Hill, Hall.tahun. *Managing FDI in a Globalizing Economy: Asian experiences*. Newyork: Palgrave, Macmillan.
- Xing Li, Keqiang, Hou and Chan M.W. 2008. An Empirical Study of Foreign Direct Investment Location in Eastern China, *The Chinese Economy*, vol. 41, no. 6, November–December 2008, pp. 75–98. M.E. Sharpe, Inc.
- Xinhua News Agency, 2006, New Policy Stresses Quality of Foreign Investment, Xinhua News Agency November 10, tersedia on line di
<http://www.China.org.cn/english/BAT/188506.htm>,
 diakses Oktober 2, 2010.
- Ya, Shi. 2007. *New Characteristics Emerge in Foreign Investment in China*. Beijing: China Economic News No. 20, 28 May 2007.

- Yasheng, Huang. 1998. *FDI in China: an Asian Perspective*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, dan Hong Kong: the Chinese University Press.
- Zhang, K. H. 2001a. What Attracts Foreign Multinational Corporations to China?. *Contemporary Economic Policy*, 19(3), 336–346 dalam Ali Ali S dan Wei, G. 2005. Determinants of FDI in China. *Journal of Global Business and Technology*, Volume 1, Number 2, Fall 2005.
- www.China.org.cn, 2010.

III
Pertanian dan Industri Sebagai Pendorong Perkembangan
Ekonomi Cina:
Reformasi Ekonomi Cina 1978–2003¹⁴
Erlita Tantri

Abstrak

Cina merupakan sebuah negara sosialis yang sentralistik. Dalam reformasi ekonominya pada tahun 1978, Cina berusaha memodernisasikan sistem pertanian dan industri, yang menyebabkan negara tersebut mampu meraih dan mempertahankan kestabilan perekonomiannya. Paper ini membahas mengenai bagaimana Cina menjadi salah satu negara yang berhasil mengembangkan pertanian dan industri.

Kata Kunci: *reformasi ekonomi Cina, pertanian, industri.*

3.1 Pendahuluan

Ada beberapa hal menarik untuk dipetik dari perjalanan reformasi ekonomi di Cina yang berlangsung sejak 1978 hingga 2003. Dari hasil penelitian tim Cina 2005 terdapat beberapa poin yang diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi perbaikan ekonomi Indonesia, meskipun beberapa hal mungkin telah mengalami perubahan atau penurunan pada saat ini. Namun, kebangkitan kekuatan ekonomi Cina merupakan sebuah cermin yang penting untuk diketahui

¹⁴ Disadur dari hasil penelitian tim Cina PSDR LIPI tahun 2005, *the Impact of Market Economy on the Development of Communism: A Study of Economic Reform in the People's Republic of China (1978–2003)*, PSDR-LIPI, 2005, hlm. 99–132.

secara seksama oleh negara-negara yang sedang bergerak atau berusaha mengangkat kualitas atau perbaikan kondisi perekonomiannya.

Cina merupakan sebuah negara sosialis yang sentralistik dalam penentuan kebijakan ekonomi yang kemudian berubah menjadi sebuah negara yang berorientasi terhadap pasar. Dalam reformasi ekonominya, Cina berusaha memodernisasikan sistem pertanian dan industri, yang menyebabkan negara tersebut mampu mempertahankan kestabilan perekonomiannya.

Dalam beberapa dekade, produk domestik bruto (*gross national bruto*—GDP) Cina selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Peningkatan GDP ini juga disertai dengan kenaikan perdagangan nasional dan investasi asing yang menyebabkan Cina menjadi salah satu negara industri yang penting di dunia. Keinginan untuk menjadikan Cina menjadi sebuah negara maju telah menuntun negeri ini untuk juga mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang pada akhirnya Cina juga mampu menghadapi globalisasi dan persaingan ekonomi dunia.

3.2 Cina dan Reformasi Ekonomi

Jika ditarik ke belakang, kemajuan ekonomi Cina memiliki sejarah yang panjang. Sejak abad ketiga sebelum Masehi hingga abad ke-18, Cina merupakan sebuah negeri penting dalam perekonomian dunia termasuk juga dalam bidang budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sejarah panjang yang dimiliki Cina dengan peradaban yang maju kembali dibangkitkan melalui reformasi ekonomi 1978.

Reformasi ekonomi 1978 dilakukan dengan menerapkan kebijakan pintu terbuka (*open door policy*) di mana beberapa daerah pantai dibuka sebagai tujuan investasi asing, seperti Provinsi Guangdong dan Fujian yang menuai aliran investasi dari Cina perantauan Hong Kong dan Macao dan menjadi wilayah pembuka untuk kontak dengan dunia luar. Oleh karena itu, daerah-daerah pantai merupakan wilayah yang paling pesat mengalami kemajuan dalam pergerakan ekonomi.

Tahun 1984, restrukturisasi ekonomi Cina mulai bergerak dari daerah perkotaan ke daerah pedesaan dan setelah 10 tahun reformasi ekonomi dengan sistem ekonomi pasar sosialisnya, Pemerintah Cina membentuk enam dasar bagi reformasi struktural ekonomi yang menyentuh semua sektor dan secara garis besar sebagai berikut:¹⁵ Pertama, mengembangkan diversifikasi atau penganeekaragaman faktor-faktor ekonomi seperti penganeekaragaman sumber daya alam, modal dan kemampuan sumber daya manusia. Kedua, untuk menuju ekonomi pasar, maka perusahaan-perusahaan milik negara harus dirubah mengikuti sistem perusahaan yang modern. Ketiga, sistem pasar terbuka dan bersatu dibangun untuk menghubungkan antara pasar perkotaan dan pedesaan dan antara pasar domestik dan internasional serta menerapkan penggunaan sumber daya seefektif mungkin. Keempat, mengubah fungsi negara yang sebelumnya ikut sebagai pengelola ekonomi. Kelima, membangun sistem

¹⁵ *Economic System: China through a Lens*, china.org.cn, <http://www.china.org.cn/english/features/china2004/106995.htm>, PSDR LIPI, hlm. 101.

distribusi dengan memberikan prioritas pada efisiensi dan keadilan. Dengan kata lain, seseorang yang menjadi kaya harus bisa membantu yang lainnya untuk menjadi kaya pula. Keenam, membangun ketahanan sosial (*social security*), baik bagi penduduk desa maupun penduduk kota untuk menciptakan dampak positif pembangunan dan menjaga kestabilan sosial secara menyeluruh. Oleh karenanya, Pemerintah Cina cenderung dapat menekan gejolak sosial maupun gejolak pekerja-pekerja industri yang jumlahnya bersifat masif (sangat besar).

Terus berkembangnya ekonomi Cina menyebabkan negeri ini semakin terbuka untuk melakukan kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain, termasuk dengan Indonesia dan ASEAN. Dalam kerja sama ini, Cina lebih mampu mengelola kesempatan atau memperoleh keuntungan dibandingkan Indonesia misalnya, produk-produk Cina lebih banyak membanjiri Indonesia yang berakibat pada melemahkan perekonomian rakyat atau nasional. Cina juga terus meningkatkan produk ekspor dan komoditas pertaniannya dengan Indonesia yang menjadi pangsa pasar Cina yang paling potensial dibanding partner dagang yang seimbang.

Kebijakan pintu terbuka inilah yang telah memberikan peluang bagi Cina untuk terus meningkatkan kuantitas eksportnya, dengan sebagian besar ekspor Cina adalah ke negara-negara Asia. Indonesia sendiri merupakan negara yang memberi peluang pasar yang cukup besar bagi Cina karena jumlah penduduk Indonesia yang besar. Selain itu, Indonesia juga terdapat cukup banyak pengusaha Cina perantaraan yang menjadi partner usaha bagi pengusaha Cina Daratan. Produk manufaktur ringan dan tekstil Cina selalu saja

membanjiri pasar Indonesia yang pada akhirnya melemahkan produk nasional sejenis.

Sesungguhnya, reformasi Cina dengan hasil produksi yang masif sangat didukung oleh investasi asing dan nasional yang besar dengan jumlah tenaga kerja yang potensial dan murah. Di samping itu, negeri Cina sendiri merupakan daerah pangsa pasar bagi produk-produknya sehingga memperkecil kesempatan bagi produk impor dari negara Asia lainnya untuk ikut bersaing di negeri ini.

Reformasi ekonomi Cina juga dilakukan dalam beberapa bidang seperti pada pertanian dan industri. Perbaikan kebijakan politik dan sosial yang kondusif bagi terpeliharanya kegiatan ekonomi yang aman dan stabil juga menjadi perhatian Pemerintah Cina. Dalam tulisan ini, perhatian Pemerintah Cina dalam reformasi di bidang pertanian dan industri akan dicoba untuk disajikan secara ringkas sebagai gambaran umum tentang kondisi kedua sektor ini pada kurun waktu 1978–2003.

3.2.1 Pertanian Cina

Reformasi pertanian Cina secara garis besar telah melalui tiga tahapan, yaitu pertama, dari tahun 1978 hingga 1984 yang merupakan tahapan yang menjadi pondasi bagi proses selanjutnya. Pada tahap pertama ini, secara bertahap Cina mengimplementasikan sistem tanggung jawab (*contract responsibility system*) berdasarkan satuan rumah tangga dan dengan sistem remunerasi yang berdasarkan hasil produksi di daerah pedesaan. Pada tahapan pertama ini pemerintah menekankan pada sumber daya manusia dalam hal ini petani. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, beban-beban petani haruslah dikurangi, berupa pajak, masalah alam, dan

sebagainya. Kemudian merangsang inisiatif petani dalam bidang pertanian, dan berusaha membebaskan mereka dari kekhawatiran dan tekanan dalam mengelola lahan dan produk pertanian, seperti kegagalan panen, hama, pajak, dan sebagainya. Untuk melengkapi usaha memperbaiki produktivitas pertanian ini, pemerintah juga mencoba memberikan kebebasan dan hak kepemilikan (*property rights*) pada petani (dalam hal ini lahan pertanian) sehingga mereka dapat mengembangkan diversifikasi (penganekaragaman) produk pertanian dan peningkatan hasil produksi pertanian.

Kemudian pada tahapan kedua, yaitu dari tahun 1985 hingga 1991, Cina mereformasi sistem monopoli negara terhadap pembelian dan quota, dan secara bertahap meninggalkan sistem kontrol terhadap pemasaran dan harga-harga dari produk-produk pertanian. Pada tahapan ini pembelian gabah oleh negara berubah dari sistem kontrak ke sistem pasar. Perubahan ini tentunya akan memberikan dampak positif di mana petani dapat ikut serta dalam proses penjualan (seperti penentuan harga jual gabah), namun petani yang tidak mampu ikut dalam persaingan pasar akan tetap bergantung pada peran pemerintah untuk membeli gabah mereka, jika tidak, hasil produk gabah akan tetap menumpuk di petani. Pada tahap ketiga, yaitu dari tahun 1992 hingga 1994, negara berusaha menjalankan perekonomian pasar di pedesaan. Permasalahan yang muncul pada tahapan-tahapan sebelumnya adalah keterbatasan modal, pasar yang lambat, administrasi yang kurang baik, dan buruknya perkembangan usaha pedesaan serta pendapatan petani yang mengalami naik turun. Oleh karena itu, dilakukan perbaikan kembali khususnya pada produksi gabah, yaitu dalam sistem

pembelian dan pemasaran. Pada April 1991, perbaikan gabah dilakukan berdasarkan inisiatif petani yang hasilnya dapat meningkatkan harga penjualan gabah, seperti pada tahun 1992, harga gabah naik sebesar 140%, disamping tumbuhnya pasar-pasar penjualan hasil produk-produk pertanian.¹⁶

Melalui kebijakan reformasi ekonomi, Cina melakukan reformasi pada sistem tanah pedesaan. Perubahan sistem pertanian yang berdasarkan komune menjadi sistem keluarga yang berbasis pada pertanian (*system of family based farming*) di mana petani akan memperoleh keuntungan berdasarkan hasil kerja yang mereka lakukan, telah mendorong antusiasme petani untuk bekerja lebih giat. *Family based farming system* juga mendorong perkembangan usaha keluarga pada produk peternakan dan perikanan. Hal ini pula yang juga mendorong perkembangan industri-industri di pedesaan. Perhatian negara Cina terhadap pertanian ini sudah dimulai sejak tahun 1981 ketika Menteri Zhao dalam rapat Perencanaan Kerja Pemerintah untuk Pembangunan Ekonomi mengatakan bahwa Pemerintah Cina merasa perlu untuk meningkatkan pembangunan pertanian dengan menerapkan kebijakan yang tepat dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁷

Teknologi dan pengetahuan menjadi pilar penting untuk mendukung perkembangan pertanian. Banyak penelitian yang dilakukan untuk membantu perbaikan hasil pertanian,

¹⁶ Gao Shangquan dan Chi Fulin, *the Reform and Development of China's rural Economy*, Foreign Language Press, Beijing, 1997, hlm. 1–14 dan 27.

¹⁷ Poltak Partogi Nanggolan, *Reformasi Ekonomi RRC Era Deng Xiophing: Pasar Bebas dan Kapitalisme Dihidupkan Kembali*, Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 147.

selain pelatihan dan pengiriman para tenaga ahli dan terdidik dalam ilmu-ilmu hayati atau pertanian ke pedesaan untuk membantu program ini. Hal ini tentunya didasarkan bahwa potensi pertanian pedesaan Cina cukup besar, dengan sebagian besar lahan pertanian dan penduduk terkonsentrasi di pedesaan. Dengan kondisi pertanian yang baik dan stabil maka diharapkan negeri Cina pun akan stabil. Oleh karena itu, dirasa penting untuk meningkatkan semangat kerja di daerah pedesaan. Penerapan hak pengelolaan tanah bagi petani atau hak pemilikan tanah yang stabil bagi petani serta perbaikan lahan-lahan pertanian, telah menjadi daya dukung bagi perbaikan kondisi pertanian dan ekonomi pedesaan di Cina sehingga pada akhirnya diharapkan hal ini dapat ikut meningkatkan pendapatan penduduk desa dan investasi di pedesaan yang tentunya juga akan bisa meningkatkan produktivitas pertanian, suplai produk-produk pertanian yang stabil, dan kesinambungan peningkatan pendapatan pertanian.¹⁸

Untuk mendukung perbaikan pertanian, secara intensif Cina juga memperbaiki sistem irigasi pertanian, penggunaan pestisida dan obat pembasmi hama dengan tepat, serta perbaikan mutu bibit tanaman pertanian. Dari hasil ini, maka Cina dapat terus meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertaniannya dan menjadi salah satu negara yang memimpin

¹⁸ Chi Fulin, *China's Economic Reform at the Turn of the Century*, China Institute for Reform and Development, Foreign Language Press Beijing, 2000, hlm. 281.

dalam jumlah produk pertaniannya di dunia,¹⁹ selain negara ini terus mampu meningkatkan hasil panen dan menyediakan produk-produk pangan bagi pasar domestik.

Saat ini, Cina menjadi negara yang mampu menyediakan kebutuhan pertanian atau pangan bagi 1,3 miliar masyarakatnya. Cina merupakan negara yang cukup memperhatikan ketersediaan pangan dalam negerinya terlebih dahulu sebelum produk tersebut menjadi produk ekspor. Dengan kata lain, produk pertanian yang diekspor Pemerintah Cina merupakan surplus pertaniannya setelah memenuhi kebutuhan pangan dalam negerinya. Cina bisa hanya mengekspor padi dalam jumlah yang kecil agar dapat memenuhi kebutuhan domestik. Ketika kebutuhan domestik tidak terpenuhi dengan produk pangan dalam negeri, maka Cina akan memutuskan mengimpor padi dari pasar internasional.²⁰

Keberhasilan Cina untuk tetap memperhatikan potensi pertanian—terutama terhadap ketersediaan dan perbaikan lahan-lahan pertanian—meskipun ledakan industri telah merambah ke daerah pertanian dan perhatian pemerintah terhadap kualitas pendapatan, kemampuan, dan ketersediaan petani, bisa menjadi pelajaran bagi negara berkembang lainnya yang memiliki potensi pertanian. Pemerintah Cina mendorong petaninya untuk ikut dalam kegiatan sirkulasi dan pertukaran komoditas pertanian serta meningkatkan harga

¹⁹ PSDR LIPI, *the Impact of Market Economy on the Development of Communism: A Study of Economic Reform in the People's Republic of China (1978–2003)*, PSDR-LIPI, 2005, hlm. 110.

²⁰ Weng Ming, *the International Competitiveness of China's Agricultural Products*, Chief Editor Weng Ming, Foreign Languages Press, 2006, hlm. 26.

pembelian hasil-hasil pertanian dari petani. Hal ini menarik dicermati karena perkembangan pertanian juga sejalan dengan pembangunan sektor-sektor industri. Pentingnya pertanian bagi Cina sebagai pilar pembangunan ekonomi dan pemasok utama kebutuhan pangan bagi penduduknya yang besar merupakan hal yang semakin memelihara kepercayaan masyarakat Cina terhadap reformasi ekonomi negaranya yang berorientasi pasar.

Perkembangan industri hasil produksi pertanian diusahakan sejalan dengan produk pertanian yang dihasilkan sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh penduduk, memperbaiki struktur pangan Cina, dan juga untuk membantu petani dalam penjualan dan pembelian hasil pertanian. Pemerintah Cina juga memfasilitasi petani dengan membangun komunikasi dan transportasi pertanian yang baik sehingga memperlancar sirkulasi komoditas pertanian dari daerah ke kota.

Dalam periode 1996–2000 saja, hasil pertanian Cina telah berhasil menyumbang 7.129,18 triliun Yuan bagi GDP negara ini.²¹ Produk pertanian seperti padi dan gandum misalnya, terus mengalami peningkatan dalam jumlah produksi dari tahun ke tahun. Pada tahun 1949, hasil produk ini sekitar 113.180.000 ton dan sekitar 512.300.000 ton pada tahun 2003. GDP Cina dari pertanian mengalami peningkatan sekitar 45,6 persen pada periode 1979–2002, yang

²¹ *Ibid*, hlm. 111.

merupakan peningkatan yang sangat besar dibandingkan rata-rata dunia.²²

Selain itu, Pemerintah Cina juga membangun sistem penyimpanan produk-produk pangan secara khusus pada tahun 1990 dengan kapasitas penyimpanan bisa mencapai 40 juta ton. Kuota ini belum mencakup 10 juta ton kapasitas penyimpanan yang dilakukan oleh pemerintah lokal di samping para petani juga melakukan penyimpanan hasil pertaniannya sendiri di rumah yang bisa mencapai 150 kilogram per keluarga atau secara keseluruhan dari simpanan keluarga tersebut sekitar 120 juta ton sehingga Cina merupakan salah satu negara yang memiliki sistem ketahanan pangan yang baik.²³

Selain itu, penerapan teknologi dan ilmu pengetahuan yang efektif dan murah juga telah menyebabkan perkembangan produktivitas pertanian yang pesat setaraf perkembangan sektor industri. Seperti telah disebutkan sebelumnya, Cina cukup memberi perhatian untuk melatih dan mengirim para peneliti dan ahli pertanian ke pedesaan dalam rangka membantu produktivitas petani.

Meskipun Cina memiliki keterbatasan dalam beberapa hal, namun hal ini tidak menghalangi Cina untuk terus berusaha mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Cina memiliki keterbatasan dalam ketersediaan atau kesinambungan lahan-lahan yang subur atau potensial sebagai lahan pertanian untuk pemenuhan kebutuhan pangan

²² Wang Mengkui and others, *China's Economy*, China Basic Series, 2004, China Intercontinental Press, 2004, hlm. 6.

²³ PSDR LIPI, hlm. 116 dan Wang mengkui and others, *China's Economy*, 2004, hlm. 6.

populasinya yang besar. Peningkatan industrialisasi dan jumlah penduduk juga ikut mengurangi jumlah lahan-lahan pertanian. Hal inilah yang mendorong untuk dikembangkannya diversifikasi produk pertanian yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Keterbatasan jumlah petani yang bergerak dalam pertanian juga menjadi sebagian kendala untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Sebagian besar penduduk lebih memilih untuk migrasi ke perkotaan dan terjun dalam perusahaan dan industri besar dengan pendapatan yang lebih jelas. Hal ini menyebabkan banyaknya angkatan muda yang lebih memilih meninggalkan desa. Oleh karenanya, intensif dan peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani bisa menjadi perangsang bagi antusiasme penduduk pedesaan untuk tetap tinggal di desa dan mengelola potensi pertanian di daerahnya.

Investasi dalam bidang pertanian juga tidak sebesar dalam bidang-bidang produksi, meskipun kebutuhan pangan merupakan kebutuhan primer bagi negara Cina. Oleh karenanya, Pemerintah Cina perlu terus meningkatkan investasi di pedesaan. Namun, Cina juga memiliki persoalan alam berupa perubahan iklim dan cuaca yang mengganggu kestabilan hasil pertanian, selain persoalan bencana alam yang sering tidak dapat diprediksi seperti banjir dan gempa bumi yang masih terjadi hingga saat ini. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh Cina termasuk Indonesia, sebagai negara yang kaya akan bencana alam selain bencana buatan manusia.

Pada tahun 2001 pertumbuhan pertanian dan industri pertanian Cina terus meningkat namun pasar hasil pertanian ini berjalan lambat. Harga gabah dan kapas menurun, harga sayuran juga mengalami fluktuasi. Namun, Pemerintah Cina

terus mengadakan perbaikan-perbaikan mutu produk pertaniannya seperti padi, kelapa sawit, dan sayuran dengan memegang prinsip "*high quality for high prices*".²⁴ Namun, bagaimana kondisi pertanian Cina pada beberapa tahun mendatang? Apakah akan tetap stabil? Cina terus berusaha menekan angka kelahiran penduduk atau penambahan penduduk dengan membatasi jumlah anak dalam sebuah pasangan atau keluarga. Hal ini juga memiliki maksud untuk membatasi meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat. Industrialisasi yang pesat tentunya juga bisa mengurangi jumlah lahan pertanian yang subur, ketersediaan air bersih untuk pertanian, dan pencemaran udara yang memengaruhi iklim dan berdampak pada hasil pertanian, tentunya bisa menjadi ancaman bagi Cina selanjutnya.

Pada saat ini, Cina terus meningkatkan produksi pangannya, namun ketersediaan lahan justru semakin berkurang, misalkan saja menurut perhitungan Biro Pusat Statistik Cina, lahan pertanian Cina pada tahun 1996 melingkupi 130,04 juta hektar dan berkurang menjadi 121,72 juta hektar pada tahun 2008.²⁵ Berkurangnya lahan pertanian ini bisa diakibatkan oleh jumlah penduduk yang terus bertambah disertai dengan tingkat urbanisasi penduduk yang mulai menduduki lahan pertanian serta masalah bencana

²⁴ Green Book, *the Analysis and Forecast of China's Rural Economy Situation 2001–2002*, Rural Development Institute, Chinese Academy of Social Sciences Rural Survey Organization, National Bureau of Statistics, Foreign Languages Press Beijing, 2002, hlm. 42.

²⁵ China Agricultural View, "Shortage of Farms and Water Threatens Grain output Targets," <http://www.all-china-agriculture.com/>, accessed 29 September 2010.

alam yang mengikis lahan-lahan subur. Selain itu, kegiatan manusia yang cepat dan luas juga ikut merusak lahan-lahan pertanian menjadi gurun atau semakin berkurangnya ketersediaan pasokan air bagi pertanian yang mengurangi kesuburan tanah. Tentunya semua ini juga tidak terlepas dari kegiatan industri Cina yang pesat hingga di pedesaan yang akhirnya memengaruhi kondisi dan sumber daya alam.

Dari periode ke periode, hasil pertanian Cina mengalami fluktuasi mengikuti kondisi alam dan situasi nasional yang menggenjot sektor industri. Hasil pertanian primer berupa padi cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya begitu pula dengan gandum yang mulai mengalami kemerosotan, sedangkan variasi lain seperti jagung dan kedelai agak berfluktuasi meningkat.

Tabel 3.1 Jumlah Produksi Padi Cina Periode 1978–2002 (dalam juta ton)

Tahun	Total Produk	Variasi Produk Pertanian			
		Padi	Gandum	Jagung	Kedelai
1978	304,47	136,93	53,84	55,95	7,57
1980	320,56	139,91	55,21	62,62	7,94
1985	379,11	168,57	85,81	63,83	10,50
1990	446,24	189,33	98,23	96,82	11,00
1991	435,29	183,81	95,95	98,77	9,71
1992	442,66	186,22	101,59	95,38	10,30
1993	456,49	177,70	106,39	102,70	15,30
1994	445,10	175,93	99,30	99,28	15,60
1995	466,62	185,23	102,21	111,99	13,50
1996	504,54	195,20	110,57	127,47	13,22
1997	494,17	200,73	123,29	104,31	14,73
1998	512,30	198,71	109,73	132,95	15,15
1999	508,39	198,49	113,88	128,09	14,25
2000	462,18	187,91	99,64	106,00	15,41
2001	452,64	177,58	93,87	114,09	15,41
2002	457,06	174,54	90,29	121,31	16,51

Sumber: Weng Ming, *the International Competitiveness of China's Agricultural Products*, Chief Editor Weng Ming, Foreign Languages Press, 2006, hlm. 21; dari *China Agricultural Development Report* (annually), China Agriculture Press.

Kebutuhan pangan domestik yang tinggi menyebabkan Cina saat ini hanya mampu mengimpor hasil pertanian dalam jumlah kecil. Setelah persaingan pasar internasional pada produk pertanian mulai didasarkan pada kemampuan impor dalam jumlah yang besar, maka secara tidak langsung membatasi Cina untuk ikut dalam persaingan internasional dalam ekspor padi ini.²⁶ Untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat akan bahan pangan dan menurunnya jumlah lahan pertanian, mendorong Cina untuk meningkatkan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam bidang pertanian, kemudian keahlian dan pemberdayaan petani serta penganekaragaman pangan, yang semuanya bertujuan untuk menjaga kestabilan persediaan pangan nasional pada tahun-tahun mendatang.

3.2.2 Industri Cina

Kemudian, bagaimana dengan kondisi industri Cina sejak reformasi ekonomi hingga tahun 2003? Industri Cina sejak reformasi ekonomi 1978 hingga 2003 telah meningkatkan pendapatan Bruto (GDP) Cina sebesar rata-rata 15% per tahun. Perkembangan industri yang cepat menyebabkan Cina juga ditetapkan sebagai salah satu negara industri dengan sistem industri yang menggunakan teknologi yang cukup tinggi.²⁷

²⁶ Weng Ming, *the International Competitiveness of China's Agricultural Products*, 2006, hlm. 31.

²⁷ Wang Mengkui and others, *China's Economy*, 2004, hlm. 131.

Perubahan struktur industri Cina merupakan evolusi dari dua faktor, yaitu: tingkatan pendapatan per kapita dan suplai dari elemen-elemen utama seperti modal, mesin, tenaga kerja, dan sumber daya alam.²⁸ Dalam sektor manufaktur ini, pasar berdasarkan sistem intensif yang pertama kali diperkenalkan untuk pabrik-pabrik kecil dikontrol oleh daerah atau desa. Pada tahun 1980an hingga awal tahun 1990an, secara bertahap pemerintah meluaskan sistem intensif untuk perusahaan-perusahaan besar. Pasar ekspor ditingkatkan dengan menggunakan modal asing secara intensif dan struktur kepemilikan pribadi, di mana usaha ini berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat bagi Cina dengan rata-rata 7,8% per tahun.²⁹

GDP Cina yang datang dari sektor industri berasal dari industri-industri primer, sekunder, dan tertier yang terekam dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Total Nilai Industri Cina (dalam 100 juta Yuan)

Item	1978	1989	1997	2002	2003
GDP	3624	16909	74463	105172	116898
Industri Primer	1918	4228	14211	16117	17092
Industri Sekunder	1745	7178	37223	52980	61131
Industri	1607	6484	32412	45975	52963
Konstruksi	138	794	4811	7005	8168
Industri Tertier	861	5403	23029	36075	38675

Sumber: People's Republic of China Yearbook 2004, Vol. 2.

²⁸ Li Jingwen, *the Chinese Economy into the 21st Century*, Foreign Language Press, Beijing, 2000, hlm. 8.

²⁹ The Conference Board/Grononingen Growth and Development Centre Total Economy Data Base, in H. MsGuckin and Matthew Spielgeman, *Restructuring China's Industrial Sector: Productivity and Jobs in China, East Asian Economy Perspective*, Vol. 15, No. 2, Agustus 2004, hlm. 60.

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada periode awal, GDP terbesar datang dari sektor primer yang berupa produk-produk pertanian yang kemudian berikutnya didominasi oleh sektor industri sekunder pada bidang industri manufaktur dan konstruksi, terutama setelah peningkatan penerapan teknologi dan investasi. Antara tahun 1978 hingga 2002, industri primer berdasarkan hasil pertanian meningkat sekitar 200 persen dan industri sekunder meningkat sebesar 420 persen serta industri tertier meningkat 370 persen.³⁰ Untuk industri ringan (seperti produk makanan, dan tekstil) mengalami peningkatan sekitar 790 persen sepanjang periode 1978 dan 1992 dan industri berat meningkat sebesar 530 persen.³¹ Dari sini, sektor pertanian bergerak tidak secepat atau sebesar sektor industri.

Potensi industri Cina berhasil banyak menarik investasi asing. Tenaga kerja yang murah, sumber daya alam yang besar, birokrasi yang mulai efektif, regulasi yang jelas, dan kondisi politik yang stabil telah menarik investor-investor Eropa dan lainnya yang berada di negara-negara Asia seperti Indonesia untuk memindahkan investasinya ke Cina. Banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang memindahkan pusat-pusat industrinya ke Cina dikarenakan Cina memiliki tenaga kerja yang efektif, dapat bekerja dalam tekanan, dan murah untuk menghasilkan produksi yang memenuhi pasokan pasar internasional. Dalam beberapa kesempatan, Cina juga berusaha meningkatkan kemampuan tenaga kerjanya melalui pelatihan-pelatihan keahlian dan profesional.

³⁰ Ling Jingwen, *the Chinese Economy into the 21st Century*, hlm. 34

³¹ *Ibid*, hlm. 57.

Namun, persoalan yang muncul pada tingkat sosial akibat kegiatan industri yang cepat dan masif di Cina adalah munculnya kelas menengah baru yang dulunya cenderung tidak terlihat. Kesenjangan pendapatan pun mulai terlihat antara pekerja profesional, pemilik modal, dan buruh-buruh pabrik di perkotaan. Kesenjangan juga muncul antara daerah pedesaan dan perkotaan, di mana desa menjadi basis industri pertanian dan kota adalah basis industri ringan dan berat serta bertemunya investasi-investasi asing berskala besar.

Pembangunan-pembangunan di perkotaan juga bergerak cepat mengikuti perkembangan ekonomi, penduduk, dan teknologi. Semua ini menciptakan kota sebagai sumber mata pencaharian, hiburan, dan tempat tinggal sehingga hal ini menciptakan migrasi yang cukup signifikan dari desa ke kota yang nantinya mengurangi produktivitas dan ketersediaan sumber daya manusia di pedesaan.

Problem lain yang paling besar adalah berkaitan dengan lingkungan. Pembangunan yang cepat, penggunaan sumber daya alam yang tinggi, dan perubahan gaya hidup penduduk menyebabkan Cina memiliki masalah lingkungan yang serius dan krisis kesinambungan sumber daya alam. Polusi Cina berada pada titik mencemaskan dan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi sumber daya alam seperti air, energi, hutan, dan bahan tambang menyebabkan Cina bisa menghadapi bencana alam buatan manusia seperti banjir.

Namun, sebagai negara yang terus bergerak dalam ekonomi dan pembangunan disertai dengan sistem pertahanan nasional, Cina kini menjadi negara yang disegani oleh negara-negara dunia lainnya, baik secara ekonomi maupun politik. Kestabilan politik dan sumber daya manusia

yang besar menjadi salah satu pertahanan Cina untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi khususnya dalam bidang pertanian dan industri. Dalam bidang pertanian, usaha Pemerintah Cina bisa menjadi cerminan bagi negeri Indonesia yang memiliki potensi pertanian yang besar namun belum muncul sebagai kekuatan ekonomi yang salah satunya disebabkan oleh kelemahan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang menyokong atau melindungi sektor pertanian

Daftar Pustaka

- Bei, Jin. 2007. *the Industrial Competitive of China Industry*, Focus on China Series. Beijing: Foreign Languages Press.
- Fulin, Chi. 2000. *China's Economic Reform at the Turn of the Century*. China Institute for Reform and Development. Beijing: Foreign Language Press.
- Green Book. 2002. *the Analysis and Forecast of China's Rural Economy Situation 2001–2002*. Rural Development Institute, Chinese Academy of Social Sciences Rural Survey Organization, National Bureau of Statistics. Beijing: Foreign Languages Press.
- Jingwen, Li. 2000. *the Chinese Economy into the 21st Century*. Beijing: Foreign Language Press.
- Mengkui, Wang and others. 2004. *China's Economy*. China Basic Series. China Intercontinental Press.
- Ming, Weng. 2006. *the International Competitiveness of China's Agricultural Products*. Beijing: Foreign Languages Press.

- Partogi, Poltak Nanggolan. 1995. *Reformasi Ekonomi RRC Era Deng Xiophing: Pasar Bebas dan Kapitalisme Dihidupkan Kembali*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- PSDR LIPI. 2005. *the Impact of Market Economy on the Development of Communism: A Study of Economic Reform in the People's Republic of China (1978–2003)*. Jakarta: PSDR-LIPI.
- Shangquan, Gao and Chi Fulin. 1997. *the Reform and Development of China's rural Economy*. Beijing: Foreign Language Press.
- H. MsGuckin and Matthew Spielgeman. 2004. "Restructuring China's Industrial Sector: Productivity and Jobs in China", *The Conference Board/Grononingen Growth and Development Centre Total Economy Data Base, in East Asian Economy Perspective*, Vol. 15, No. 2, Agustus.

Internet:

China Agricultural View, "Shortage of Farms and Water Threatens Grain output Targets," (<http://www.all-China-agriculture.com/>, accessed 29 September 2010.)

"Economic System: China through a Lens", *China.org.cn*, 2004, (<http://www.China.org.cn/english/features/China2004/106995.htm>).

IV

Eksistensi Identitas Etnis Tibet dan Etnis Mongolia dalam Komunisme Cina:

Sebuah Paparan Sejarah

Devi Riskianingrum

Abstrak

Sebagai sebuah negara multietnis, Pemerintah Cina berkewajiban menjaga keutuhan bangunan kenegaraannya demi kelangsungan pemerintahan komunis. Melalui kebijakan asimilasi berbasiskan budaya mayoritas, dalam hal ini budaya Han, pemerintah merangkul seluruh etnis minoritasnya yang berjumlah 55 etnis untuk melebur ke dalam budaya mayoritas. Pelarangan penggunaan bahasa lokal di tempat-tempat umum, migrasi etnis Han ke wilayah-wilayah minoritas, dan kaderisasi etnis minoritas adalah langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam mempersatukan etnis minoritasnya. Cara-cara ini pula yang diaplikasikan pada etnis Tibet dan etnis Mongol. Secara nyata kebijakan ini mampu mengikis identitas budaya kedua etnis tersebut. Namun demikian, seiring melunaknya kebijakan Cina terhadap minoritasnya, jalur diskusi dan representasi identitas ke-etnis-an pun juga terbuka bagi Etnis Mongol dan Etnis Tibet, selama agama dan etnisitas tidak dijadikan sebagai senjata untuk disintegrasi dari negara Cina. Artikel ini akan membahas secara mendalam perjalanan sejarah bernaungnya Tibet dan Mongol ke dalam bangunan negara Cina dan eksistensi identitas mereka di Cina.

Kata Kunci: Sejarah, identitas, etnis Tibet, etnis Mongol

4.1 Pendahuluan

Cina merupakan sebuah negara dengan penduduk yang pluralistik karena negara ini tersusun atas masyarakat yang multietnis. Ada sekitar 55 etnis grup diakui keberadaannya oleh Pemerintah Cina. Namun demikian, etnis Han menjadi etnis mayoritas yang populasinya menduduki peringkat teratas, yaitu sekitar 91% dari total populasi negara Cina. Etnis lainnya, termasuk di antaranya etnis Tibet dan etnis Mongolia, hanya berjumlah 9% dari total populasi. Kondisi pluralistik yang sempurna ini bisa tercipta karena luasnya wilayah teritorial Cina, yang merupakan negara terbesar keempat di dunia. Terkait dengan kondisi tersebut, Pemerintah Cina yang mendasarkan diri pada sistem pemerintahan komunisme, terus berusaha melakukan upaya asimilasi dalam rangka menjaga keharmonisan bangunan integrasi nasionalnya yang telah terbentuk sejak tahun 1949.

Kebijakan Pemerintah Cina untuk menyatukan komponen masyarakat adalah dengan menempatkan seluruh kelompok masyarakat dalam satu negara menjadi tidak terpisahkan, terutama dalam pengertian kesamaan legalitas kewarganegaraan maupun kesamaan kebangsaan Cina. Kebijakan ini dikenal dengan *cinization* atau sinoisasi, yaitu internalisasi kebudayaan Cina ke dalam kebudayaan etnis minoritas. Dengan kata lain, transformasi struktural model ini menempatkan entitas nasionalisme etnis Han, yang notabene

etnis mayoritas, sebagai konstruksi dasar dari nasionalisme dan modernisasi Cina.³²

Upaya asimilasi dan modernisasi berbasiskan *sinoisasi* berdampak pada ketidakharmonisan hubungan antara negara dan masyarakat etnisnya, termasuk antara etnis mayoritas dengan etnis minoritas, seperti yang terjadi di Inner-Mongolia dan Tibet. Dominasi mayoritas Han di berbagai sektor kehidupan terhadap kedua etnis ini berpengaruh pada kelanggengan identitas keetnisan mereka sehingga menyebabkan perlawanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai upaya mempertahankan dan merekonstruksi identitasnya. Selanjutnya, artikel ini secara mendalam akan mendeskripsikan bagaimana proses inkorporasi kedua etnis ini ke dalam nasionalisme Cina dan bentuk-bentuk eksistensi identitas mereka dalam proses modernisasi Cina.

4.2 Tibet dan Inner-Mongolia dalam Rangkaian Sejarah Negara Komunis Cina

Tibet dan Inner-Mongolia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Komunis Cina melalui sebuah proses yang panjang. Jika Tibet diinkorporasikan ke dalam wilayah Cina melalui Tentara Pembebasan Cina yang dikirim ke Tibet pada tahun 1951, maka Inner Mongolia pada awalnya secara sukarela bersatu dengan Cina karena kesamaan ideologi komunisnya. Namun demikian, akibat perbedaan persepsi dan

³² Dru C. Gladney, *Representing Nationality in China: Refiguring Majority and Minority Identities*, in <http://www2.hawaii.edu/~dru/exotic.htm>, 1994, p. 108.

ketidakuasaan, para pemimpin Inner-Mongolia berniat untuk memisahkan diri dari Cina pada tahun 1967. Hal ini membuat dimulainya tekanan dan tindak militer dari Cina atas wilayah ini. Oleh karena itu, bab ini akan membahas perjalanan panjang etnis Mongol dan etnis Tibet menjadi bagian dari negeri yang kini semakin kuat di sektor ekonominya.

4.2.1 Integrasi Tibet di Cina: Sebuah proses yang Berkelanjutan

“....Pasukan keamanan Cina meningkatkan tindak kekerasan di ibukota Tibet, Lhasa, dua tahun setelah demonstrasi yang memperingati pemberontakan gagal 1959 meletus dalam kekerasan mematikan, kata polisi dan laporan, Kamis. Mulai 3 Maret, lebih dari 1.500 polisi dan personil keamanan tambahan telah dikerahkan, dan lebih dari 4.100 apartemen atau rumah sewaan telah diperiksa, menurut Lhasa Evening News. Lebih dari 400 orang telah ditangkap, tapi hanya 14 dari mereka yang ditangkap secara resmi dengan tuduhan tak ditentukan, kata laporan itu...”³³

Sejarah Tibet dimulai dengan seorang tokoh bernama Songtsan Gambo. Beliau berhasil mempersatukan berbagai suku etnis Tibet dan mendirikan kerajaan Tubo di wilayah yang

³³ “China Tingkatkan Tindakan Keras di Tibet” Edisi Jumat, 12 Maret 2010 02:22 WIB <http://www.antaraneews.com/berita/1268335321/china-tingkatkan-tindakan-keras-di-tibet>. diakses pada 10 Agustus 2010.

sekarang disebut Lhasa. Dia juga merupakan tokoh pertama yang tercatat menjalin kerja sama dengan pemerintahan Cina, yaitu pemerintahan dinasti Tang (618–907), dengan menikahi putri dinasti Tang yang bernama Putri Wencheng. Hal ini menjadi indikasi bahwa telah terjalin hubungan politik, ekonomi, dan budaya antara Tibet dan Cina.³⁴

Dalam perjalanan sejarahnya, wilayah Tibet dikuasai oleh etnis Mongol pada abad ke-13. Meskipun demikian, penguasa Mongol justru tertarik dengan agama Buddha yang menjadi nilai-nilai penting dalam kehidupan etnis Tibet. Dari sinilah muncul relasi *cho-yon* di antara kedua belah pihak, yaitu relasi antara para pemimpin agama Tibet, yang disebut Lama, dengan para petinggi Mongol atau *Khan*. Para penguasa Mongol tersebut dengan sukarela menyumbangkan kekayaannya kepada kuil-kuil tempat para Lama, sebaliknya, para Lama akan berdoa dan membacakan kitab Buddha serta setia kepada mereka. Hubungan *cho-yon* ini menjadi dasar atas terbentuknya hubungan yang unik antara para Lama Tibet dengan para penguasa Manchu di era penguasaan Manchu di Cina.³⁵

Kemajuan dicapai Tibet di era kepemimpinan Dalai Lama kelima pada tahun 1642. Dia berhasil mentransformasikan sistem perpolitikan Tibet yang dipakai menjadi sistem pemerintahan yang berlaku sampai saat ini.

³⁴ Wang Jiawei & Nyima Gyaincain, *The Historical Status of Tibet*, Beijing: Intercontinental Press, 1997, pp. 7–13.

³⁵ Sönam Tenzin, 'The Historical Status of Tibet: A Summary,' in <http://www.dharmakara.net/> published in December, 1989, synopsis of *The Status of Tibet. History, Right and Prospect in International Law*, Van, Michael C 1987, Westview, Van Praag.

Lebih jauh, beliau juga mengunjungi kaisar Ming untuk meminta pengakuan atas wilayah Tibet. Melalui kunjungan ini, Cina bukan hanya mengakui Tibet sebagai sebuah wilayah independen, tetapi juga sebagai *divinity on earth* atau Titah Dewa di Bumi. Sebaliknya, Dalai Lama kelima juga berhasil membuat para petinggi Mongol mengakui kekuasaan Kaisar Ming di Cina. Sejak saat itu, muncul hubungan *Priest-Patron* antara Tibet, Cina, dan Mongolia.³⁶

Etnis Manchu berhasil menguasai Cina dengan mengalahkan dynasty Ming dan mendirikan dynasty Qing (1644–1912). Kaisar Qing membantu mengusir pasukan Mongol keluar dari Tibet dan menunjuk Dalai Lama ketujuh menduduki kekuasaan di Tibet pada tahun 1727 dan menghentikan perpecahan antarpara Lama. Lebih lanjut, Kaisar Qing juga memberikan Plakat Emas atau *Golden Seal* dan inskripsi dalam tiga bahasa, yaitu bahasa Cina, Tibet, dan Manchuria, sebagai bentuk pengakuan otoritas Tibet atas wilayahnya. Sejak saat itu Kaisar Qing juga menempatkan dua utusannya di Lhasa—disebut dengan *ambans*—dengan berdalih untuk melayani dan melindungi Dalai Lama, yang pada kenyataannya keberadaan mereka adalah untuk menjaga kepentingan bangsa Manchu di Tibet. Titik ini menjadi awal dimulainya interfensi Manchu dalam kehidupan

³⁶ 'Brief History of Tibet', www.friends-of-tibet.org/html see also 'Tibet: The Gap between Fact and Fabrication', <http://www.tibetanyouthcongress.org/publication/history%20Part1.html> accessed on 25 March 2007. Namun demikian, lain halnya dengan sumber-sumber Cina yang mengasumsikan bahwa relasi yang terjalin antara Ming dengan Tibet adalah sebuah relasi patron-klien, dimana Tibet berada dalam perlindungan Ming. Untuk detail lihat Wang Jiawei and Nyima Gyaincain 1997, *The Historical Status of China's Tibet*. China Intercontinental Press: 39–44.

kenegaraan Tibet. Lebih lanjut, *ambans* juga melakukan supervisi yang ketat terhadap kondisi finansial, mengatur hubungan diplomasi dan perdagangan antara Tibet dengan wilayah lain. Dengan kata lain, kondisi ini menunjukkan status Tibet yang merupakan wilayah vassal dari Dinasti Manchu.³⁷

Memasuki abad ke-19, kekuasaan dinasti Qing semakin melemah. Hal ini menyebabkan lemahnya pula perhatian mereka terhadap Tibet. Pada saat inilah Tibet mulai membuka hubungan dengan penguasa Inggris yang ada di India. Merespon hal ini, Cina mengirim pasukannya ke Tibet untuk mencegahnya. Seiring meletusnya revolusi di Cina pada 1911, pasukan Cina yang dikirim ke Tibet mengalami perpecahan, sebagian menyerang para pemimpin Manchu mereka, sebagian lainnya memilih kembali ke Cina.

Keadaan yang tidak menentu di Cina akibat revolusi dan perpecahan berkepanjangan, memberikan kesempatan bagi Dalai Lama ke-13 membenahi negaranya. Beliau mulai menjalin kerja sama internasional, membangun pelayanan telegram dan kantor pos yang modern serta pembangunan infrastruktur lainnya. Pada periode inilah Tibet bertindak sebagai sebuah negara yang utuh dan berdaulat penuh.

Dalai Lama ke-13 meninggal dunia pada tahun 1933 dan pemerintahan dilanjutkan dengan penunjukan Dalai Lama ke-14. Beliau meneruskan misi Dalai sebelumnya dengan

³⁷ Menurut sumber-sumber Cina, keberadaan Plakat emas menjadi tanda kepatuhan Tibet kepada penguasa Qing-Cina. Lebih lanjut, keberadaan *Ambans* dianggap sebagai representasi penguasa Cina di Tibet. Padahal, menurut sumber Tibet dan menurut Dalai Lama ke-13, posisi *ambans* di Tibet adalah seperti seorang duta besar. Beliau juga menegaskan bahwa hubungan Qing-Cina dan Tibet saat itu adalah *priest-patron* atau antara pendeta-patron-nya, bukan dalam bentuk subordinasi. Wang Jiawei, pp. 34–36 dan pada "*Brief history of Tibet*".

membangun kantor perwakilan luar negeri, seperti di Hongkong, India, Amerika Serikat, dan Nanjing. Walaupun pada saat itu Tibet benar-benar menjalankan peranannya sebagai sebuah negara independen, namun demikian, Tibet melupakan pengakuan *de facto* dari negara-negara lain, dan hal ini menjadi masalah di kemudian hari. Tibet mengabaikan pentingnya pengakuan *de facto* independensi Tibet dari negara-negara lainnya dan memilih tidak bergabung dalam Liga bangsa-bangsa. Oleh karena itu, secara formalitas yudisial, keberadaan Tibet sebagai sebuah negara independen menjadi ambigu karena tidak adanya pengakuan dari bangsa-bangsa lain. Selanjutnya, sampai saat ini hal ini menjadi permasalahan inti dari konflik antara Cina dan Tibet.³⁸

Pada saat Cina mendirikan Republik Cina di tahun 1912, Cina mengundang Tibet untuk bergabung dalam republik ini. Alasan utama ajakan ini karena berdasarkan bukti sejarah sejak dinasti Ming Cina sampai dengan dinasti Qing, Cina menganggap Tibet merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Cina. Oleh karena itu, Presiden Republik Cina pertama, Yuan Shih Kai, pada 12 April 1912 membuat sebuah deklarasi kemerdekaan yang di dalamnya menyatakan bahwa Tibet, Mongolia dan Xinjiang merupakan wilayah yang teintegrasi dengan Cina dan setara dengan sprovinsi-provinsi lainnya di Cina.³⁹

Kejadian serupa kembali terjadi saat Mao Zedong bersama Partai Komunisnya berhasil menguasai Cina dan mendirikan Republik Rakyat Cina pada 1 Oktober 1949.

³⁸ Raja Hutheesing (ed.) *A White Book: Tibet Fight For Freedom*, 1960, p. 5.

³⁹ Tieh-Tseng Li, *The Historical Status of Tibet*, New York: King's crown Press, 1952, pp. 53, 130–131.

Segera setelah secara efektif memerintah, Mao memaksa Tibet untuk terinkorporasi ke wilayah Cina dengan mengirimkan pasukan militernya ke Tibet pada September 1949. Melalui *pasukan pembebasan rakyat*, Cina beralih membebaskan rakyat Tibet dari cengkraman sistem feodalisme para Lama yang dianggap *borjuis* dan menyengsarakan para petani Tibet.

Menyikapi masuknya pasukan Cina, Dalai Lama ke-14 segera mengadakan siaran radio berbahasa Inggris perdananya untuk meminta dukungan dari negara lain dan untuk menegaskan status independen mereka. Lebih lanjut, beliau juga mengirimkan utusannya ke Beijing untuk membuat sebuah pembicaraan. Hasilnya, sebuah keputusan bersama bernama *17 points of agreement* ditandatangani pada bulan Mei 1951, yang di dalamnya menyatakan beberapa hal antara lain kesediaan Tibet atas masuknya pasukan Cina di wilayah Tibet dan pengakuan Cina atas pemerintahan Dalai Lama di Tibet di bawah kepemimpinan Cina. Segera setelah penandatanganan keputusan bersama tersebut, Cina menempatkan pasukan dalam jumlah yang besar di Tibet dan mulai mengintervensi pemerintahan Tibet, mulai dari penghapusan sistem *serfdom* (perbudakan) dan feodalisme dengan mengimplementasikan doktrin-doktrin komunis.⁴⁰

Masuknya militer Cina dalam ranah kehidupan rakyat Tibet, terutama kepada sikap mereka yang melecehkan kuil

⁴⁰ Serfdom atau sistem perbudakan merupakan hal yang umum di Tibet. Di Tibet hanya sekitar 5% warga Tibet yang memiliki budak dan sisanya merupakan budak-budak. Oleh Cina, sistem ini dianggap tidak manusiawi sehingga Pemerintah Cina sangat mengecam sistem ini dan menghapuskannya dengan dalih tidak sesuai dengan asas komunisme. Wang Jiawei and Nyima Gyaincain, pp. 223–245.

dan para biksu dan Lama, memicu munculnya berbagai sikap anti Cina yang berbentuk kekerasan dan kerusuhan. Namun demikian, aksi kekerasan dan kerusuhan anti Cina ini dapat diredam oleh pihak militer Cina di Lhasa. Kondisi ini menyebabkan Tibet dalam keadaan yang kacau dan tidak menentu di awal maret 1959. Akibatnya, para Lama merasa khawatir akan keselamatan Dalai Lama ke-14 karena berkembang rumor bahwa pasukan Cina akan menangkapnya. Berkat bantuan para pendukung dan pelindungnya, Dalai Lama ke-14 berhasil melarikan diri dan meminta perlindungan politik kepada pemerintah India pada tanggal 17 Maret 1959. Kepergian Dalai Lama ke-14 diikuti oleh sebagian besar warga Tibet dan para pengikutnya. Di tanah pengungsian inilah mereka membentuk pemerintahan Tibet di pengasingan dalam rangka untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Tibet.

Kepergian pemimpin spritual dan pemerintahan tertinggi Tibet ini membuat Cina semakin mudah untuk menguasai Tibet. Selanjutnya, Cina membuat sebuah komite pemerintahan baru di Tibet yang terdiri atas orang-orang pro-Cina dan mereformasi sistem administrasi yang berdasarkan doktrin komunis. Pada tanggal 9 September 1965, secara formal Cina mendirikan Tibet Autonomous Regional government, dengan wilayah mencakup of U-Tsang dan sebagian area Kham. Segera setelah berdirinya provinsi Tibet, pemerintahan Mao mengaplikasikan kebijakan sinoisasi, yaitu bukan hanya membuka dan menempatkan etnis Han Cina di wilayah Tibet secara besar-besaran, mentransformasikan budaya dan bahasa Tibet ke dalam bahasa Mandarin, tetapi juga membentuk kader-kader partai Komunis baik dari kalangan etnis Han di Tibet maupun dari etnis Tibet sendiri.

Etnis Tibet di provinsi Tibet telah mengalami berbagai pasang surut kebijakan sinoisasi, baik yang bersifat sangat keras di era Mao maupun yang bersifat kooperatif dan membuka diri untuk perundingan seperti pada era Deng Xiaoping, Jiang Zemin, dan HU Jintao. Tercatat sejak era Jiang Zemin, Pemerintah Cina kembali membuka hubungan dialog dengan Dalai Lama ke-14 sejak tahun 1998 sampai pada tahun 2001.⁴¹ Saat ini di bawah kepemimpinan Hu Jintao, Cina menekankan *masyarakat yang harmoni* pada kebijakan domestiknya dan *pembangunan perdamaian* pada kebijakan internasionalnya.⁴² Berlandaskan hal tersebut Hu juga membuka diri bagi perundingan damai dengan Dalai Lama. Namun demikian, sikap keras Cina tetap ditunjukkan kepada Tibet dengan mengirimkan kekuatan militernya ke Tibet pada awal tahun 2010 ini akibat maraknya kembali tuntutan merdeka dari rakyat Tibet. Oleh karena itu, sampai saat ini proses integrasi Tibet di Cina tetap berlanjut.

4.2.2 Inner Mongolia di bawah Naungan Cina

Kebesaran Mongolia mulai tercatat dalam sejarah saat Temujin, atau yang lebih dikenal dengan Chinggis Khan menguasai berbagai wilayah di Asia dan sebagian Eropa, baik melalui diplomasi maupun dengan peperangan. Selanjutnya,

⁴¹ Tashey Rabgey and Tseten Wangchuk Sharlo, *Sino-Tibetan Dialogue In The Post-Mao Era: Lessons and Prospects*, Policy Studies Vol. 12, Washington: East-West Center, 2004, pp. 31–38. pada <http://www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored/pdfs/PS012.pdf> diakses pada 12 Maret 2010.

⁴² Khun, Robert Lawrence, *HU's Political Philosophies*, pada www.esnips.com diakses pada 13 Maret 2010.

pada tahun 1206 beliau mendirikan kekaisaran Mongolia di atas kekuasaannya yang tersebar, termasuk di sebagian besar wilayah Cina.

Pada tahun 1280, di bawah kepemimpinan Kubilai Khan, cucu dari Chingghis Khan, Etnis Mongolia berhasil mendirikan *empire* terbesar yang tercatat di dalam sejarah dunia yang menyebar dari Korea ke Cina Selatan, wilayah Asia Tengah, dan wilayah yang saat ini disebut Rusia. Lebih lanjut, Kubilai Khan adalah kaisar Mongol pertama yang berhasil menduduki seluruh wilayah Cina, dan mendirikan Dinasti Yuan pada tahun 1271 serta mengeluarkan kebijakan untuk menyebarkan budaya Mongolia di Cina untuk menggantikan kebudayaan Han. Langkah ini diambil dalam rangka mencegah bersatunya kembali bangsa Han Cina dan untuk semakin memperkuat posisi Kubilai Khan di Cina.⁴³

Kemunduran bangsa Mongolia dimulai saat bangsa Han berhasil menggulingkan kedudukan dinasti Yuan dari Cina dan mendirikan dinasti Ming pada tahun 1368. Lebih lanjut, transfer kekuasaan dari Mongol ke Han di pertengahan abad ke-14 ini menjadi awal perpecahan bangsa Mongol yang

⁴³ Menurut Owen Lattimore, Chinggis Khan adalah orang pertama yang menanamkan kebijakan ini di wilayah kekuasaannya. Beliau memerintahkan orang-orang Uighur Turks untuk menciptakan tulisan Mongol untuk membedakannya dari tulisan bangsa Han Cina. Selanjutnya, penguasa-penguasa Mongol pun menggunakan bangsa Uighur Turks yang berbahasa Turkish, Persian, dan Arabic dalam administrasi pemerintahannya sehingga tidak dimengerti oleh bangsa Cina. Hal ini membuat Chinggis Khan dapat dengan mudah menguasai Cina. Untuk jelasnya lihat Owen Lattimore, *Inner Asian Frontiers of China*, Capitol Publishing Co., New York, 1951, pp. 80–82, Also see Sanderson Beck, *China, Korea, and Japan to 1875*. 2005. accessed on 23.03.06.

selanjutnya mereka terjebak dalam konflik antarsuku yang berkepanjangan atau dikenal dengan *Mongol Dark Ages*.⁴⁴

Memasuki abad ke-16, terjalin hubungan yang baik antara Tibet dengan penguasa Mongol yang bernama Altan Khan (1530–1583). Selain memeluk agama Budha, beliau juga mengganti sistem pemerintahannya dengan sistem Budhisme Tibet, dengan mengganti gelar *Khan* menjadi Lama. Langkah ini diambil oleh Altan Khan untuk menghindari teradopsinya budaya Cina oleh bangsa Mongol. Menurutnya, budaya Cina yang terserap oleh bangsa Mongol menjadi sebuah tanda subordinasi Cina yang nyata atas bangsa Mongol. Namun demikian, pada kenyataannya bangsa Mongol semakin terpuruk dan terdesak, bukan oleh bangsa Han, melainkan oleh ekspansi bangsa Manchuria yang pada tahun 1635 semakin meluas.⁴⁵ Kejayaan bangsa Mongol benar-benar terkubur saat bangsa Manchuria berhasil menguasai Cina dan mendirikan dinasti Qing. Untuk menghindari bangkitnya kembali kejayaan Mongol, kaisar Qing yang berkuasa membagi wilayah Mongolia menjadi beberapa wilayah administratif. Lebih lanjut, etnis Mongol pun dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, untuk mencegah mereka bersatu kembali.

Secara umum, etnis Mongolia mendapat perlakuan diskriminasi di bawah hegemoni bangsa Manchuria. Dari

⁴⁴ Asia Watch Report, *Crackdown In Inner Mongolia*, July 1991, p. 2

⁴⁵ Etnis Manchuria adalah suku bangsa yang hidup di wilayah Manchuria, yang berbeda dengan etnis Han. Bangsa ini terkait dengan etnis Tungus, yang merupakan nenek moyang dari etnis Jurchen, sebuah suku yang telah di kenal di Asia sejak abad ke-7. Oleh karena itu, penguasaan Manchuria atas wilayah Cina dengan mendirikan dynasty Qing diasumsikan sebagai sebuah kolonisasi asing oleh etnis Han.

sinilah dimulai periode panjang perlakuan tidak adil yang terus diterima oleh etnis Mongol sampai berkuasanya Komunis di Cina. Mereka mulai dilarang untuk hidup secara nomaden dan keluar dari wilayah tempat tinggal mereka, padahal nomaden adalah salah satu kebiasaan yang telah lama dilakukan oleh bangsa Mongol. Lebih jauh, pemerintahan Qing juga mengubah sistem perekonomian bangsa Mongol, yang hal ini merupakan dampak atas berkembangnya aktivitas perdagangan akibat masuknya bangsa Han dan Manchuria ke wilayah bangsa Mongol. Selain perdagangan, para petani bangsa Han pun mulai masuk ke wilayah Mongolia dan membuka lahan pertanian baru, menggeser kedudukan bangsa Mongol yang lebih menggantungkan hidup pada penggembalaan ternak.

Pada abad ke-19 muncul pembagian wilayah Mongolia, yang terpisah menjadi dua bagian, yaitu *Inner* Mongolia yang terdiri atas Mongolia bagian Selatan dan Timur, dan *Outer* (bagian luar) Mongolia yang terdiri atas Mongolia bagian Utara, yang berbatasan langsung dengan Rusia. Hal ini terjadi karena friksi di antara para penguasa Mongol, perbedaan sistem pemerintahan dan letak geografis yang berjauhan. Sejak saat itu, *Inner-Mongolia* yang awalnya muncul sebagai terminologi wilayah administratif kemudian berkembang menjadi terminologi geopolitik.

Akibat kedekatan letak geografis dan kedekatan personal antara para petinggi Qing dengan bangsawan Mongol di wilayah *Inner-Mongolia*, wilayah ini mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintahan Qing. Lebih lanjut, akibat kesuburan tanahnya, *Inner-Mongolia* juga menjadi salah satu tujuan migrasi etnis Han sehingga banyak terbentuk pemukiman-pemukiman etnis Han. Fenomena ini tidak terjadi

di Outer-Mongolia karena jaraknya yang jauh menyebabkan pemerintahan Qing menggunakan sistem *indirect rule* dalam mengawasi wilayah ini, dan pemukiman etnis Han pun sangat jarang muncul di wilayah ini. Kondisi ini menyebabkan kedekatan di antara suku-suku yang ada di Outer-Mongolia dan memunculkan ide untuk independen dari penguasaan Qing. Selanjutnya, keinginan ini terwujud saat dinasti Qing runtuh pada tahun 1912 dan Outer-Mongolia mendeklarasikan diri menjadi satu negara yang merdeka di tahun 1913 berkat bantuan dari Rusia.⁴⁶

Keruntuhan Qing disambut baik oleh etnis Han, yang seperti halnya Mongol dan Tibet, yang juga mengalami penindasan. Di bawah kepemimpinannya, etnis Han segera mengambil alih tampuk kepemimpinan dan mendirikan Republik Cina dengan mengangkat Yuan Shih K'ai sebagai presiden pertama.⁴⁷ Di bawah pemerintahan yang baru, wilayah Inner-Mongolia di klaim sebagai bagian dari Cina. Selain itu, kedekatan letak geografis antara Inner-Mongolia dan Ibukota Peking menyebabkan mudahnya pemerintah

⁴⁶ Sechin Jagchid, "The Inner Mongolia Response to The Chinese Republic 1911–1917" p. 102 in *Studies on Mongolia Proceedings of The First North American Conference on Mongolian Studies*. Western Washington

⁴⁷ Dr. Sun Yat Sen adalah seorang revolusioner Cina yang tujuan utamanya adalah mempersatukan seluruh Cina dalam sebuah bendera republik, sedangkan Yuan Shih K'ai adalah komando tertinggi militer saat itu. Pada awalnya terjadi kerja sama antara Dr. Sun Yat Sen dan Yuan Shih K'ai, namun melalui intrik internal dan perjuangan perebutan kekuasaan, Yuan Shih K'ai memaksa Dr. Sun Yat Sen untuk mundur dari jabatan "presiden sementara" dan menjadikan dirinya sebagai Presiden Republik Cina pada tanggal 14 Februari 1912. Lihat detail pada see Sechin Jagchid, *The Inner Mongolia Response to The Chinese Republic 1911–1917*. p. 102 In *Studies on Mongolia Proceedings of The First North American Conference on Mongolian Studies*. Western Washington.

mengontrol wilayah ini, baik dalam bentuk administratif maupun dengan mengirimkan pasukannya. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah Inner-Mongolia menjadi wilayah independen maupun bersatu kembali dengan wilayah Outer-Mongolia.⁴⁸

Kenyataan bahwa Outer-Mongolia telah menjadi negara merdeka membuat para bangsawan di Inner-Mongolia ingin juga menjadi negara merdeka yang lepas dari Cina. Selain itu, Outer-Mongolia, yang kini bernama negara Mongolia, juga ingin mempersatukan kembali Inner Mongolia ke dalam wilayahnya. Akan tetapi, ide ini ditentang oleh Rusia yang merupakan sekutu utama Mongolia sehingga Mongolia memilih untuk tidak ikut campur dengan perjuangan para bangsawan di Inner-Mongolia. Melihat hal tersebut, Pemerintah Cina berjanji akan tetap memberikan dan menjaga jabatan kebangsawanan dan kekuasaan kepada para bangsawan Mongol, asalkan mereka tetap setia kepada Pemerintah Cina.⁴⁹ Di bawah penguasaan Cina, wilayah Inner Mongolia direorganisasi menjadi 7 provinsi baru dan menetapkan kebijakan asimilasi terhadap budaya Cina.⁵⁰

Pemerintahan Republik Cina telah membawa kesengsaraan bagi etnis Mongol di Inner-Mongolia. Pembukaan lahan dan pemukiman bagi etnis Han semakin menyebarluas sehingga menggusur etnis Mongol ke wilayah

⁴⁸ Uradin E. Bulag, *The Mongols at China's Edge. History and The Politics of National Unity*. London : Rowman & Littlefield Publishers, 2002, p. 7.

⁴⁹ Robert B. Valliant. "Inner Mongolia: 1912 The Failure of Independence" In *The Mongolia Society Bulletin*. Volume 4. 1977. pp. 57–58, 60.

⁵⁰ Morris Rossabi, *China and Inner Asia: From 1368 to the Present Day* (London: 1975), p.246–47.

yang tidak subur dan ke pedalaman. Hal ini menyebabkan rakyat Mongol menjadi semakin miskin. Keadaan ini menimbulkan kemarahan dan kebencian, awalnya kepada para bangsawan Mongol yang menjual lahan mereka kepada para petinggi dan pedagang Han, namun kemudian berkembang menjadi gerakan anti Cina sehingga kembali menimbulkan gejolak untuk memisahkan diri dari kolonialisme Cina.⁵¹

Memasuki akhir perang dunia kedua pada 1945, muncul tokoh bernama Ulanfu yang pro terhadap perjuangan komunisme di Cina. Beliau berhasil menguasai beberapa wilayah di timur Inner-Mongolia. Pada tanggal 1 Mei 1947 beliau mengumumkan mendirikan Inner-Mongolia Autonomous Regional (IMAR). Beliau menyatakan bahwa IMAR adalah bagian dari perjuangan Partai Komunis Cina dan mengangkat dirinya sebagai pemimpin IMAR.⁵² Selanjutnya, secara sukarela Inner Mongolia di bawah Ulanfu ikut merayakan berdirinya negara Komunis Cina pada tahun 1949 dan serta merta menjadi bagian dari negara baru tersebut.

Kekecewaan demi kekecewaan muncul di benak Ulanfu melihat kegagalan Mao menciptakan kesejahteraan di wilayah Inner-Mongolia. Kebijakan *Lompatan Jauh ke Depan* atau *the Great Leap Forward* pada tahun 1956 yang memaksa etnis Mongol meninggalkan kebiasaan mereka mengembalakan

⁵¹ William Heaton. "Chinese Communist Administration And Local Nationalism in Inner Mongolia" in *The Mongolia Society Bulletin*. Volume X, No.1, Spring 1971. pp. 19

⁵² Robert A. Rupen, *Mongols of The Twentieth Century*, Part I (Bloomington, Indiana: Indiana University Publications, 1964), pp. 69–72. This matter also stated in Hal William Heaton , 1971, pp. 21

ternak ke pertanian menyebabkan kelaparan besar di Inner-Mongolia dan kebijakan Revolusi Budaya tahun 1966 yang menyebabkan kehancuran budaya Mongol menyebabkan Ulanfu keluar dari keanggotaan Partai dan berkeinginan memerdekakan diri dari Cina dengan mendirikan *New Inner Mongolia People's Revolutionary Party* (NIMPRP). Mendengar hal tersebut, pada tahun 1967 Mao segera mengirimkan pasukannya ke Inner Mongolia, menghancurkan Huhhot, ibukota inner Mongolia, dan menangkap seluruh aktivis dan pendukung Ulanfu. Akibat tindak kekerasan ini dilaporkan sekitar 346.000 orang Mongol ditahan dengan tuduhan sebagai pendukung NIMPRP accuse dan 16.222 di antaranya mendapatkan hukuman mati.⁵³

Saat ini, pembangunan yang merajalela di Huhhot dan kawasan lain di Inner-Mongolia menunjukkan keberhasilan pemerintahan Komunis Cina dalam menekan gerakan perlawanan etnis Mongolia. Sayangnya, pembangunan tersebut lebih banyak dinikmati oleh etnis Han yang semakin banyak bermigrasi ke wilayah ini. Etnis Mongol semakin terpinggirkan. Sampai saat ini, masih ada gerakan bawah tanah yang terus memperjuangkan kebebasan Inner-Mongolia dari Cina. Namun demikian, kecilnya jumlah dan intensitas kegiatan mereka, dibandingkan dengan Tibet dan Xinjiang, membuat Pemerintah Cina sedikit mengabaikan perjuangan mereka. Lebih lanjut, Pemerintah Cina justru menganggap telah berhasil mengatasi permasalahan etnisitas di Inner-

⁵³ Asia Watch Report, *ibid* pp. 59–61.

Mongolia, karena Etnis Mongol telah berhasil berasimilasi dengan etnis Han.⁵⁴

4.3 Eksistensi Etnis Tibet dan Mongolia dalam Komunisme Cina

Sebagai entitas sosial, setiap individu membutuhkan identitas. Identitas individu dalam interaksi sosial merupakan hal yang fundamental dalam setiap interaksi sosial. Lan (2000) mengatakan bahwa setiap individu memerlukan identitas untuk memberikan *sense of belonging* dan eksistensi sosial.⁵⁵ Lebih lanjut, identitas merupakan sebuah proses pengadopsian identifikasi diri. Karena hal ini merupakan sebuah proses yang berkelanjutan, identitas bersifat dinamis dan prosedural, sebagian merupakan konstruksi-pribadi, sebagian lainnya merupakan kategorisasi dari entitas lainnya.⁵⁶ Identitas individu yang tampil dalam setiap interaksi sosial disebut dengan identitas sosial, yaitu bagian dari konsep diri individu yang terbentuk karena kesadaran individu sebagai anggota suatu kelompok sosial, di mana di dalamnya

⁵⁴ Devi Riskianingrum, Erni Budiwanti, et al., *Multiculturalism and Nation State Building in China Case Study: Cultural Identity and Minority Conflict of the Mongolians*, (Jakarta: Research Center for Regional Resources, 2006), pp. 34–35.

⁵⁵ Lan, *Susahnya Jadi Orang Cina. Ke-Cina-an sebagai Konstruksi Sosial*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2000), pp. 56–60.

⁵⁶ Anand, Dibyesh, '(Re)imagining nationalism: identity and representation in the Tibetan Diaspora of South Asia', Paper presented to British Association of South Asian Studies (BASAS) Conference in London, and British International Studies Association (BISA) Conference in Manchester, 1999, p. 273 in <http://staff.bath.ac.uk/ecsda/Danand-Reimagining%20nationalism.pdf> published in 2000.

mencakup nilai-nilai dan emosi-emosi penting yang melekat dalam diri individu sebagai anggotanya.⁵⁷

Terkait dengan hal tersebut, baik identitas Tibet maupun identitas Mongol muncul sebagai sebuah proses identifikasi diri. Identitas etnis Tibet dan Mongol dibangun atas simbol-simbol dan atribut, seperti pengalaman sejarah atau *collective memory* tentang masa lalu sebagai sebuah kekuasaan yang otonom dan independen, bahasa, dan kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat lokal. Akan tetapi, kondisi terkini menjadi sangat kontradiktif akibat penguasaan Cina yang mengaplikasikan *sinoisasi* melalui berbagai macam program asimilasi, seperti melalui kewajiban berbahasa Mandarin dan pelarangan budaya dan pemakaian bahasa lokal, migrasi etnis Han ke kedua wilayah tersebut serta perubahan budaya penggembala yang nomaden ke budaya pertanian yang menetap.⁵⁸ Hal tersebut mengakibatkan terkisusnya identitas kedua etnis tersebut. Beralih modernisasi dan pembangunan, eksistensi identitas kedua etnis ini pun semakin terpinggirkan, baik di wilayah mereka sendiri di Lhasa dan Huhhot, maupun saat mereka menjadi penduduk urban di kota-kota besar lainnya seperti di Beijing.

⁵⁷ Stuart Hall, 'Introduction: Who Needs Identity?', in Stuart Hall and Paul Du Gay (eds), *Questions of Cultural Identity*, London: Sage, 1996, p. 10.

⁵⁸ Devi Riskianingrum, "The Identity Dispute Continues: History of Tibet in China" in *The Tibetan Identity in China: History, Policy and Practice*, (Jakarta: Research Center For Regional Resources LIPI, 2007), pp. 73–75.

4.3.1 Eksistensi Identitas Etnis Tibet di Cina

Bentuk identitas Tibet tertuang dalam ajaran Budhisme dan pesona keindahannya. Keindahan tergambar dari lukisan alamnya yang menakjubkan dan kentalnya ajaran Budhisme. Budhisme bukan hanya sekedar agama bagi etnis Tibet, melainkan sebagai sebuah *way of life* dan identitas diri karena mewarnai setiap aspek kehidupan etnis Tibet. Hal tersebut merupakan konstruksi pribadi yang direpresentasikan ke dalam kehidupan dan interaksi sosial mereka sehari-hari, yang tertuang dalam pola makan, etika kerja dan sosial, berbagai festival keagamaan dan pernikahan serta menjalin hubungan mereka dengan tanah dan bumi. Lebih lanjut, karya sastra, pengobatan tradisional, seni dan astrologi bernafaskan ajaran Budha pun berkembang pesat di Tibet. Hal ini menjadi tanda tingginya rasa budaya etnis Tibet.⁵⁹

Kuil-kuil, biara, dan tempat-tempat pertapaan menjamur di berbagai wilayah di Tibet, berfungsi bukan hanya menjadi rumah bagi para biarawati dan biarawan, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan etnis Tibet. Budhisme bukan hanya diajarkan, namun juga diaplikasikan dan dikembangkan oleh rakyat Tibet, ternyata memengaruhi masyarakat sekitar Tibet, di antaranya Mongolia. Penguasa Mongolia pun tertarik dengan ajaran Budha dan menjadikan Budha sebagai agama resminya. Hal ini menyebabkan terjalinnya ikatan antara penguasa Mongol dengan Dalai Lama Tibet.

Segera setelah Tibet terinkorporasi dalam negara Komunis Cina, perubahan besar pun terjadi di wilayah ini.

⁵⁹ Devi Riskianingrum, "The Identity Dispute Continues:...", pp. 75–76.

Pengembalaan ternak dan hidup berpindah yang menghormati tanah dan makhluk hidup di dalamnya sedianya mewarnai pola perekonomian etnis Tibet. Hal ini mulai berubah akibat pertambangan, pembukaan lahan pertanian yang menetap, dan pembangunan perumahan secara besar-besaran yang mengabaikan kesucian tanah sebagai dalih modernisasi di Tibet. Hal ini menyebabkan kegiatan pengembalaan pun terpinggirkan dan memaksa etnis Tibet untuk mengikuti pola-pola pertanian tersebut.

Pemerintahan Cina menilai bahwa agamalah yang menyebabkan Tibet sulit dikendalikan. Oleh karena itu, mereka berusaha memberangus pengaruh agama kepada rakyat Tibet melalui penghancuran perlahan-lahan kekuasaan dan pamor pemuka agama, biara, dan nilai-nilai budaya etnis Tibet. Pasca berdirinya Provinsi Otonomi Tibet pada tahun 1965, Mao segera mengaplikasikan *sinoisasi* dengan membuka wilayah Tibet bagi etnis Han, bahkan memberikan insentif bagi mereka yang mau bermigrasi ke Tibet. Selain itu, bahasa dan tata cara administrasi pemerintahan pun diubah menggunakan *ala* Cina, yang menggunakan bahasa Mandarin. Oleh karena itu, hanya mereka yang mampu berbahasa Mandarin, yang notabenehnya adalah etnis Han yang bermigrasi ke Tibet, yang duduk dalam susunan pemerintahan.⁶⁰

Kebijakan Revolusi Kebudayaan yang dikeluarkan tahun 1966–1967 bertanggung jawab penuh atas pembatasan waktu berdoa para penganut Budha, serta ditutupnya sekitar

⁶⁰ Lobsang Sangay. *China in Tibet: Forty Years of Liberation or Occupation?* Volume III, No. 3. Summer 1999 <http://www.asiaquarterly.com/content/view/34/> diakses pada 12 September 2007.

2500 biara yang diikuti pengusiran terhadap biarawan dan biarawati di dalamnya. Tercatat, 90% dari biara yang ada di Tibet, khususnya Tibet bagian timur, tutup dan hancur akibat kebijakan ini. Sebelumnya, jumlah biarawan atau biarawati yang tinggal di biara sangat banyak, biasanya setiap keluarga akan memiliki anggota keluarga yang menjadi biarawan atau biarawati. Oleh karena itu, pihak keluarga dengan sukarela menyumbangkan makanan maupun hasil ternak mereka kepada biara. Akan tetapi, Pemerintah Cina memandang hal ini sebagai pemaksaan dan penguasaan pihak biara terhadap rakyat Tibet sehingga merasa perlu untuk menghancurkan Biara.⁶¹

Cina juga menerapkan perubahan sistem pendidikan dari sistem Biara ke sistem pendidikan sekuler. Penggunaan bahasa Mandarin menjadi bahasa pengantar dalam sistem pendidikan tersebut, mulai dari tingkat dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi di universitas. Dengan demikian, anak-anak etnis Tibet dipaksa untuk bisa berbahasa Mandarin jika memang ingin mendapatkan pendidikan. Sudah tentu hal ini menyebabkan terkikisnya kemampuan bahasa Tibet bagi etnis Tibet yang lahir dan besar di era Mao dan sesudahnya. Padahal, bahasa merupakan instrument pertama dan utama dalam identifikasi diri serta dalam pelestarian sebuah budaya karena terkait erat bukan hanya kepada literatur dan gaya hidup, tetapi juga kepada nilai-nilai dan legenda di masyarakat.

⁶¹ Colin Mackerras, *China's Ethnic Minorities and Globalization*, New York: Routledge, 2003, pp.121–123.

Baru di era 1980-an, seiring dengan melunaknya kebijakan terhadap etnisnya, Pemerintah Cina memperbolehkan pembangunan kembali biara-biara yang telah hancur di tahun 1960-an. Selain itu, Cina juga memperbolehkan kembali penggunaan bahasa dan tulisan Tibet serta mendirikan sekolah menengah berbahasa Tibet di tahun 1988, namun dengan kurikulum yang sama dengan sekolah umum lainnya, hanya saja menggunakan bilingual, yaitu bahasa Tibet dan bahasa Mandarin. Seiring dengan hal tersebut, industri pariwisata pun berkembang pesat di Tibet pada era 1980-an dan era 2000-an. Hal ini berdampak pada perkembangan infrastruktur di Tibet, seperti hotel, restoran, dan pertunjukan budaya serta promosi pariwisata. Lebih lanjut, rakyat Tibet didukung oleh pemerintah untuk mengembangkan kembali keunikan budaya mereka, terutama dalam bentuk atraksi guna menarik para wisatawan. Dengan demikian, hal ini mengindikasikan bahwa budaya Tibet dipandang sebagai sebuah komoditas untuk memicu perkembangan ekonomi ketimbang sebagai sebuah representasi dan ekspresi identitas diri.⁶²

Selain di Tibet, etnis Tibet pun menyebar ke kota-kota besar lainnya di Cina, baik untuk tujuan menuntut ilmu maupun mencari pekerjaan, salah satunya adalah Beijing. Kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia, maupun mencari pendidikan yang lebih tinggi menjadi alasan banyaknya etnis Tibet bermigrasi ke Ibu kota tersebut. Berdasarkan pengamatan lapangan dan wawancara di Beijing pada tahun 2007, penulis menemukan berbagai representasi identitas

⁶² Devi Riskianingrum, "The Identity Dispute Continues:...", p. 80.

etnis Tibet tersebar di Kota Beijing, mulai dari rumah sakit yang diperuntukkan bagi Etnis Tibet, Pusat Penelitian Tibetologi, sebuah kuil Tibet—yang bukan saja berfungsi sebagai tempat berdoa, tetapi juga menjadi salah satu objek wisata—bernama *Yonghegong*, restoran, dan toko-toko buku. Kehadiran tempat-tempat tersebut di satu sisi menjadi simbol atas eksistensi identitas etnis Tibet, namun di sisi lain, hal ini menjadi sekadar konstruksi citra yang hendak dibangun oleh Pemerintah Cina dengan memberikan ruang bagi representasi etnis minoritas di Ibukota.

Kondisi terkini menunjukkan bahwa pada batas-batas tertentu, Pemerintah Cina memberikan keleluasaan bagi etnis Tibet untuk tetap eksis dengan identitas mereka, mulai dari kegiatan keagamaan sampai kepada pelestarian nilai-nilai tradisi dalam keluarga. Hal ini merupakan bentuk representasi kebijakan Pemerintah Cina yang peduli terhadap penguatan identitas kaum minoritas di Cina. Namun demikian, integrasi nasional tetap menjadi prioritas utama kebijakan Pemerintah Cina. Oleh karena itu, selama etnis Tibet tidak menggunakan agama dan identitas sebagai alat perlawanan dan perjuangan demi memperoleh kemerdekaan maka eksistensi identitas etnis Tibet akan tetap terjaga di bawah pengawasan Pemerintah Cina.

4.3.2 Representasi Etnis Mongol di Cina

Identitas etnis Mongol yang terbentuk merupakan peninggalan kejayaan masa lalu. Identitas mereka tertuang dalam bahasa, budaya makan, cara berpakaian, agama serta norma dan nilai dalam kehidupan. Jika ditinjau dari bahasanya, etnis Mongol terbagi atas suku-suku yang memiliki perbedaan bahasa di

antara suku-suku tersebut. Namun demikian, variasinya bersifat minor dan secara umum memiliki banyak kesamaan dalam budaya material, seperti tradisi lisan, cara berpakaian, kebiasaan dan pola makan, kepercayaan, musik dan pertunjukan seni—seperti lagu dan tari.⁶³

Secara garis besar, kebiasaan hidup sebagai pengembara dan penggembala memengaruhi budaya dan pola hidup etnis Mongol. Kemampuan mereka untuk beternak dan menggembalakan hewan ternak, terutama domba, kuda, dan yak, menjadikan mereka mahir dalam mendirikan tenda dan menggantungkan sumber makanan dari hasil ternak mereka, yaitu daging dan susu. Selain itu, pola berpakaian dan ornamen-ornamen yang dikenakan pun umumnya terbuat dari kulit hewan ternak mereka. Kehidupan mereka umumnya berkelompok, yang terdiri atas tiga sampai enam keluarga. Dengan sistem patrilineal, para lelaki Mongol berperan dalam menggembalakan ternak, sedangkan perempuannya berperan dalam pengurusan rumah tangga.⁶⁴

Seiring perkembangan zaman, etnis Mongol di Inner-Mongolia—terutama mereka yang hidup di perkotaan seperti di Huhhot—mengalami perubahan kehidupan yang pada akhirnya memaksa mereka untuk beradaptasi dengan keadaan sekitar. Sejak di bawah naungan Cina, etnis Mongol di Inner-Mongolia mulai meninggalkan kebudayaan *pastoral* dan tinggal di perumahan permanen dan hidup di wilayah perkotaan. Hal ini terkait dengan pemberlakuan kebijakan

⁶³ Erni Budiwanti, "Inner Mongolians Swinging in Dual Identities: A Dilemma of Creating a Multicultural Atmosphere" in *Multiculturalism and Nation State Building in China*, pp. 167–168.

⁶⁴ *Ibid*, pp. 169–170.

pembatasan lahan untuk penggembalaan di wilayah Inner Mongolia sehingga memaksa mereka berpindah ke pertanian menetap yang biasa dilaksanakan oleh etnis Han. Hal ini menyebabkan etnis Mongol meninggalkan kebiasaan berpindahnya.

Lebih lanjut, etnis Mongol menghadapi kebijakan yang mengharuskan mereka berbahasa Mandarin. Kebijakan yang mulai dijalankan pada tahun 1957 ini dilaksanakan dengan menghapus bahasa Mongol dalam kurikulum sekolah dan melarang berbagai penerbitan buku menggunakan bahasa Mongol. Selanjutnya, masa kebijakan Revolusi kebudayaan Pemerintah Cina melarang penggunaan bahasa Mongol di area publik dan penulisan serta penyebarluasan manuskrip Mongol.⁶⁵

Hasilnya, etnis Mongol yang lahir dan besar di era sesudah Mao berkuasa umumnya memiliki dua bahasa, yaitu Mandarin dan Mongol. Mereka secara berganti-ganti menggunakan kedua bahasa tersebut sesuai dengan lawan bicara dan kepentingannya. Umumnya jika berbicara dengan sesama etnis Mongol dan teman, mereka akan menggunakan bahasa Mongol, dan akan berbahasa Mandarin jika dalam urusan bisnis, di perkantoran, pasar, sekolah, dan area publik lainnya. Ironisnya, bahasa Mandarin mereka menjadi jauh lebih baik dan lebih fasih ketimbang bahasa ibu mereka. Alasannya, penguasaan bahasa Mandarin menjadi syarat utama bagi etnis Mongol untuk bisa berkompetisi mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang baik. Semakin

⁶⁵ Executive summary, *Multikulturalisme dan Pembangunan Negara Bangsa: ...*, pp. 216–219.

mahir mereka berbahasa Mandarin, semakin besar kesempatan mereka untuk duduk di posisi-posisi yang menguntungkan dalam aktivitas ekonomi dan pemerintahan.⁶⁶

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang dikembangkan di Inner-Mongolia. Saat ini, Pemerintah Cina giat mempromosikan kesenian wilayah ini sebagai salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Cina. Seiring hal tersebut, pembangunan hotel, restoran, dan pertunjukan budaya juga mulai berkembang. Hasilnya, komodifikasi budaya muncul, di mana budaya dikemas sedemikian rupa untuk sekadar kepentingan ekonomi. Hal ini memunculkan dampak positif dan negatif bagi etnis Mongol, yaitu di satu sisi menghidupkan kembali kebudayaan mereka, namun di sisi lain kebudayaan yang dimunculkan lebih bersifat ekonomis ketimbang sebagai aktualisasi dan identifikasi diri.⁶⁷

Hal ini juga diikuti dengan gerakan kebangkitan kembali kebudayaan Mongol yang dimotori oleh para aktivis yang peduli dengan identitas mereka. Gaung kegiatan ini

⁶⁶ Hasil pengamatan dengan beberapa nasasumber di Inner Mongolia pada bulan Mei 2006, di mana dari beberapa orang yang kami wawancarai, banyak diantara mereka lebih nyaman berbahasa Mandarin, bahkan mengakui tidak bisa berbahasa Mongol, di antaranya Ms. Xinna, walaupun ia istri dari seorang aktivis yang giat memperjuangkan kebangkitan budaya Mongol. Beberapa informant yang berprofesi pengusaha, yang tergabung dalam Mongolians Entrepreneurs Association, juga merasa lebih nyaman berbahasa Mandarin. Namun demikian, kami juga menemui dua informan akademisi yang lebih memilih menggunakan bahasa Mongol sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap bahasa ibu mereka, yaitu Profesor Tegusbayar, pengajar Ilmu Sejarah di Universitas of Inner Mongolia, dan Profesor Tochton, pengajar Linguistic di universitas yang sama.

⁶⁷ Robert Shepherd, "Commodification, Culture, and Tourism", in *Tourist Studies*, Volume 2 No. 2, August 2002, pp. 183–201. Diakses dari <http://tou.sagepub.com/content/2/2/183> pada 10 Maret 2010.

bukan hanya di wilayah Inner-Mongolia, tetapi juga disuarakan di seluruh dunia, seperti di Kanada, Amerika Serikat, dan lainnya. Mereka meminta kepada pemerintah agar diperbolehkan kembali memunculkan tulisan dan manuskrip Mongol serta penggunaan dua bahasa untuk fasilitas publik dan nama-nama jalan. Seiring dengan diubahnya kebijakan pemerintah yang lebih memfasilitasi eksistensi etnis minoritasnya, perjuangan ini membuahkan hasil sehingga saat ini jalan-jalan dan fasilitas umum di Huhhot telah menggunakan dua bahasa. Lebih lanjut, saat ini mulai berdiri berbagai sekolah dengan menggunakan bahasa Mongol sebagai pengantar walaupun tetap menggunakan kurikulum nasional. Hal ini diiringi dengan munculnya koran-koran, majalah, dan radio berbahasa Mongol dan penampilan seni budaya bercorak Mongol.⁶⁸

Saat ini, eksistensi etnis Mongol di Cina mulai terepresentasikan, terutama melalui bahasa dan budaya. Lebih lanjut, jika ditilik lebih dalam, etnis Mongol menerima keberadaan mereka di dalam naungan Cina, selama keberadaan dan aspirasi mereka sebagai penduduk asli tidak diabaikan dan tidak tergilas oleh kepentingan etnis mayoritas. Sebagian besar perjuangan mereka lebih difokuskan kepada eksistensi identitas mereka dan kebangkitan budaya Mongol, walaupun sebagian kecil dari mereka terutama yang berada di luar wilayah Cina, masih memperjuangkan sebuah independensi wilayah. Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah Cina sendiri memandang bahwa etnis Mongol di

⁶⁸ Devi Riskianingrum, "Inner Mongolia Under the Shelter of China: A Historical Review" in *Multiculturalism and Nation State Building in China:...*, pp. 52–54.

Inner-Mongolia merupakan kisah sukses pemerintah dalam mengasimilasikan etnis minoritasnya ke dalam budaya mayoritas.

4.4 Kesimpulan

Partai Komunis Cina berkuasa pada tahun 1949 telah mempersatukan berbagai wilayah di dataran Cina menjadi sebuah negara kesatuan, termasuk di dalamnya Tibet dan Inner Mongolia. Isu "minoritas nasional" pun muncul sebagai sebuah bentuk ideologi untuk mempersatukan wilayah yang luas ini, dengan mengembangkan kekuatan identitas Cina berbasis etnis mayoritas, dalam hal ini etnis Han. Kebijakan yang dikenal *Cinization* atau *sinoisasi* ini menekankan pentingnya asimilasi agar tercipta kebudayaan yang lebih homogen di Cina. Oleh karena itu, walaupun terdapat 55 etnis di dalamnya, pemerintah komunis mengabaikan hak atas determinasi dan identifikasi diri sehingga hanya menoleransi sebagian kecil dari munculnya perbedaan budaya. Hal ini dapat dilihat pada kasus migrasi etnis Han ke Tibet dan Inner Mongolia serta pelarangan budaya dan bahasa lokal yang digantikan dengan pemakaian bahasa Mandarin.

Sebagai sebuah wilayah yang pernah menikmati independensi, Tibet maupun Inner-Mongolia menjadi wilayah sensitif bagi Pemerintah Cina. Pada saat memutuskan Tibet menjadi bagian dari wilayah Cina, pemerintah Komunis akhirnya menggunakan kekuatan militer dalam rangka memutus mata rantai kekuatan tradisi keagamaan Tibet dan menempatkan kepemimpinan Han atas etnis Tibet. Oleh karena itu, berdirinya Provinsi Otonomi Tibet pada tahun 1965

mengandung arti dimulainya kaderisasi etnis Han dan sistem administrasi komunis di wilayah ini. Dengan pola serupa, hal ini juga terjadi di Inner-Mongolia terhadap etnis Mongol di tahun 1947. Walaupun pada kedua wilayah provinsi Tibet dan Inner Mongolia bertajuk “otonomi”, namun pada kenyataannya tujuan utama pemberian “otonomi” pada kedua wilayah ini adalah untuk memperkuat pengawasan pemerintah dan proses asimilasi kebudayaan Han di wilayah ini.

Seiring dengan modernisasi di berbagai bidang yang terjadi di Cina, pemerintah pun mulai melembut kepada kaum etnis minoritasnya, termasuk kepada etnis Tibet dan etnis Inner-Mongolia. Saat ini, dialog antara Pemerintah Cina dengan pimpinan etnis Tibet di India kembali terjalin, walaupun belum menunjukkan hasil yang positif. Lebih lanjut, izin pembukaan kembali sekolah berbahasa pengantar Mongol, penggunaan bahasa dan tulisan Mongol di area publik di Inner Mongolia mengindikasikan kebangkitan identitas dan budaya Mongol. Demikian juga halnya dengan etnis Tibet yang eksistensi identitasnya kini terepresentasikan, baik di Tibet sendiri maupun di Beijing. Hal ini terlihat dari berdirinya rumah sakit khusus Tibet, lembaga riset Tibetologi, berbagai toko, restoran, dan perpustakaan yang menjual pernak-pernik Tibet.

Saat ini, walaupun generasi muda etnis Tibet dalam level tertentu bisa mengekspresikan identitas keetnisan mereka, namun ikatan yang terjalin terhadap Budhisme, yang notabene adalah akar budaya mereka, tidak sedalam ikatan generasi sebelumnya, saat etnis Tibet belum terinkorporasi ke dalam Pemerintah Cina. Namun demikian, adanya perbedaan perlakuan pemerintah terhadap mereka dan sulitnya mengekspresikan diri dalam ranah politik, kecuali melalui

kegiatan partai Komunis, tetap memelihara kesadaran etnis bahwa bagaimanapun juga mereka tetap berbeda dari mayoritas Han.

Kondisi yang sama pun terjadi kepada etnis Mongol. Saat ini oleh Pemerintah Cina, etnis Mongol merupakan salah satu etnis yang mampu berasimilasi dengan baik dengan etnis mayoritas. Walaupun gerakan separatisme yang diusung etnis Mongol di Inner Mongolia tidak segenar etnis Tibet, bahkan Pemerintah Cina pun cenderung menganggap gerakan ini bukan suatu ancaman, etnis Mongol tetap merasakan adanya perbedaan perlakuan terhadap mereka. Bagi sebagian etnis Mongol, identitas dan budaya Mongol harus tetap dibangkitkan kembali dan diperjuangkan kelestariannya tanpa melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Cina. Saat ini, yang mampu mereka lakukan adalah menggiatkan kembali kegiatan kebudayaan, penerbitan koran, dan siaran radio berbahasa Mongol serta pembukaan sekolah-sekolah berpengantar bahasa Mongol sebagai bentuk representasi dan eksistensi identitas mereka.

Eksistensi identitas bukan semata pada bahasa dan pertunjukan budaya. Namun lebih jauh, merupakan representasi diri di dalam berbagai sektor kehidupan. Ke depan, Pemerintah Cina diharapkan mampu mengurangi ketimpangan sosial, politik, dan ekonomi antaretnis minoritas, dalam hal ini etnis Mongol dan etnis Tibet, dengan etnis mayoritas. Dengan demikian, bangunan kenegaraan Cina yang tersusun atas etnis minoritas ini bisa tetap terjaga keutuhannya.

Daftar Pustaka

- Anand, Dibyesh. 2002. "A Story to be Told: IR, Post Colonialism, and the Discourse of Tibetan (Trans) National Identity". In *Power, Post Colonialism and International Relations: Reading Race, Gender, and Class*. London: Routledge.
- Budiwanti, Erni. 2006. "Inner Mongolians Swinging in Dual Identities: A Dilemma of Creating a Multicultural Atmosphere". In *Multiculturalism and Nation State Building in China Case Study: Cultural Identity and Minority Conflict of the Mongolians*. Jakarta: Research Center for Regional Resources.
- Goldstein, Melvyn C. 1989. *A History of Modern Tibet, 1913–1951: The Demise of the Lamaist State*. Berkeley: University of California Press.
- Hall, Stuart. 1996. "Introduction: Who Needs Identity?". In Stuart Hall and Paul Du Gay (Eds.). *Questions of Cultural Identity*. London: Sage.
- Heaton, William. 1971. "Chinese Communist Administration And Local Nationalism in Inner Mongolia". *The Mongolia Society Bulletin*. Volume X, No.1.
- Hutheesing, Raja (Ed.) 1960. *A White Book: Tibet Fight For Freedom*. India: Orient Longmans.
- Jiawei, Wang and Nyima Gyaincain. 1997. *The Historical Status of China's Tibet*. Beijing: China Intercontinental Press.
- Lan, 2000. *Susahnya Jadi Orang Cina. Ke-Cina-an sebagai Konstruksi Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Mackerras, Colin. 2003. *China's Ethnic Minorities and Globalization*. New York: Routledge.

- Riskianingrum, Devi. 2007. "The Identity Dispute Continues: History of Tibet in China". In *The Tibetan Identity in China: History, Policy and Practice*. Jakarta: Research Center For Regional Resources LIPI.
- _____.2006. "Inner Mongolia Under The Shelter of China: A Historical Review". In *Multiculturalism and Nation State Building in China Case Study: Cultural Identity and Minority Conflict of The Mongolians*. Jakarta: Research Center For Regional Resources LIPI.
- Rossabi, Morris. 1975. *China and Inner Asia: From 1368 to the Present Day*. London: Routledge.
- Rupen, Robert A. 1964. *Mongols of The Twentieth Century*, Part I. Bloomington, Indiana: Indiana University Publications.
- Sechin Jagchid. Tanpa tahun. "The Inner Mongolia Response to The Chinese Republic 1911–1917" p. 102. In *Studies on Mongolia Proceedings of The First North American Conference on Mongolian Studies*. Western Washington.
- Tieh-Tseng Li. 1952. *The Historical Status of Tibet*. New York: King's Crown Press.
- Uradin E. Bulag. 2002. *The Mongols at China's Edge. History and The Politics of National Unity*. London: Rowman & Littlefield Publishers.
- Valliant, Robert B. 1977. "Inner Mongolia, 1912: The Failure of Independence". In *The Mongolia Society Bulletin*. Volume 4.

Sumber Internet:

"Cina Tingkatkan Tindakan Keras di Tibet" Edisi Jumat, 12 Maret 2010 02:22 WIB
(<http://www.antaraneews.com/berita/1268335321/Cina-tingkatkan-tindakan-keras-di-tibet>. diakses pada 10 Agustus 2010).

Dibyesh, Anand. 2000. 'Reimagining Nationalism: Identity and Representation in the Tibetan Diaspora of South Asia'. Paper presented to British Association of South Asian Studies (BASAS) Conference in London, and British International Studies Association (BISA) Conference in Manchester, in (<http://staff.bath.ac.uk/ecsd/DAnand-Reimagining%20nationalism.pdf> diakses pada 13 Juni 2007).

Gladney, Dru C. 1994. *Representing Nationality in China: Refiguring Majority and Minority Identities*, (<http://www2.hawaii.edu/~dru/exotic.htm>, diakses pada April 2006).

Khun, Robert Lawrence. 2010. *HU's Political Philosophies*, (pada www.esnips.com diakses pada 13 Maret 2010).

Lobsang Sangay. 1999, "China in Tibet: Forty Years of Liberation or Occupation?" in (<http://www.asiaquarterly.com/content/view/34/> diakses pada 12 September 2007).

Shepherd, Robert. 2002. "Commodification, Culture, and Tourism", in *Tourist Studies*, Volume 2 No. 2. (<http://tou.sagepub.com/content/2/2/183> Diakses pada 10 Maret 2010).

Tashey Rabgey and Tseten Wangchuk Sharlo., 2010. *Sino-Tibetan Dialogue In The Post-Mao Era: Lessons and*

Prospects, Policy Studies Vol. 12, Washington: East-West Center, 2004, pp. 31–38. pada (http://www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored/pdfs/P_S012.pdf diakses pada 12 Maret 2010).

Tenzin, Sönam. 1989. “The Historical Status of Tibet: A Summary”, in (<http://www.dharmakara.net/> diakses pada Desember 2007).

“Brief History of Tibet” (in www.friends-of-tibet.org/html accessed on 25 March 2007).

“Tibet: The Gap between Fact and Fabrication” in (<http://www.tibetanyouthcongress.org/publication/history%20Part1.html> accessed on 25 March 2007).

An Asia Watch Report. 1991. CRACKDOWN IN INNER MONGOLIA in (www.afn.org diakses pada agustus 2006).

V

Migrasi Tenaga Kerja Desa-Kota dan Implikasinya terhadap Tingkat Kemiskinan Kota di Cina

Upik Sarjiati

Abstrak

Keberhasilan Cina dalam menurunkan tingkat kemiskinan diakui oleh World Bank sebagai salah satu negara yang paling berhasil dalam pencapaian MDG's. Namun demikian, perubahan pola kemiskinan terjadi seiring dengan terjadinya urbanisasi di berbagai kota besar di Cina seperti Beijing, Shanghai, Guangdong, dan lain lain. Fenomena munculnya kemiskinan kota menjadi salah satu permasalahan yang menjadi perhatian berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah maupun akademisi. Artikel ini akan mengkaji mengenai seberapa jauh kontribusi migrasi tenaga kerja dari desa ke kota terhadap tingkat kemiskinan kota

Kata Kunci: *Kemiskinan, migrasi, Hukou System.*

5.1 Pendahuluan

Reformasi ekonomi sejak tahun 1978 menghasilkan kemajuan pesat bagi pembangunan Cina. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari jumlah *Gross Domestic Product* (GDP). Dengan menggunakan tingkat harga pada tahun 2000, GDP riil Cina pada tahun 1978 hanya mencapai US \$157,7 miliar. Jumlah tersebut meningkat sebesar 13 kali menjadi US\$2.100 miliar pada tahun 2006. Pada tahun 2008 jumlah GDP Cina dilihat dari Human Development Index mengalami perkembangan yang

signifikan. Menurut estimasi UNDP pada tahun 1978 HDI Cina adalah 0,530 dan meningkat lebih dari 30 persen menjadi 0,777 pada tahun 2005. Salah satu keberhasilan tersebut adalah menurunnya tingkat kemiskinan dari 250 juta (*poverty headcount rate*=30,7%) menjadi 125 juta (14%) pada tahun 1985 (berkurang sebesar 16,7% dalam waktu tujuh tahun).

Keberhasilan Cina dalam menurunkan tingkat kemiskinan diakui oleh World Bank sebagai salah satu negara yang paling berhasil dalam pencapaian MDG's. Meskipun tingkat kemiskinan semakin menurun, namun angka tersebut tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Perubahan pola kemiskinan terjadi seiring dengan terjadinya urbanisasi di berbagai kota besar di Cina seperti Beijing, Shanghai, Guangdong, dan lain lain. Fenomena munculnya kemiskinan kota menjadi salah satu permasalahan yang menjadi perhatian berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah maupun akademisi.

Artikel ini akan mengkaji mengenai seberapa jauh kontribusi migrasi tenaga kerja dari desa ke kota terhadap tingkat kemiskinan kota. Bagian awal artikel ini akan menjelaskan konteks migrasi tenaga kerja dalam proses pembangunan di Cina. Bagian kedua membahas mengenai *Hukou system* yang mengontrol migrasi pekerja migran dan implikasinya. Bagian ketiga akan menjelaskan trend dan pola migrasi dan karakteristik pekerja migran. Bagian selanjutnya akan menjelaskan mengenai kemiskinan kota. Bagian terakhir akan menganalisis permasalahan kemiskinan kota dalam pembangunan keberlanjutan sebagai sebuah tantangan bagi Cina untuk mengatasi persoalan tersebut.

5.2 Migrasi Tenaga Kerja dari Desa ke Kota dalam Proses Pembangunan di Cina

Migrasi tenaga kerja dari desa ke kota merupakan fenomena yang terjadi di negara-negara yang sedang berkembang seperti India, Indonesia, dan Cina. Teori pembangunan model migrasi Todaro menjelaskan bahwa migrasi tenaga kerja dipengaruhi oleh perbedaan tingkat upah riil antara desa dan kota. Lebih tingginya tingkat upah yang diharapkan menjadi salah satu daya tarik tenaga kerja di desa untuk mencari pekerjaan di kota yang dapat memberikan tingkat upah seperti yang diharapkan.

Di satu sisi perpindahan tenaga kerja mempercepat proses pembangunan, disisi lain menimbulkan masalah ekonomi dan sosial apabila lapangan kerja di kota tidak bisa lagi menampung tenaga kerja migran sehingga menurunkan tingkat upah dan terjadinya pengangguran (Todaro, 1999: 335). Migrasi tenaga kerja dari desa ke kota di menjadi bagian dari proses pembangunan Cina sejak dilaksanakannya reformasi ekonomi pada tahun 1978. Pembangunan industri yang telah dilakukan sejak tahun 1978 sampai dengan awal tahun 1990an belum memberikan hasil yang maksimal sehingga Cina belum bisa sejajar dengan negara maju. Pada tahun 1992 Pemerintah Cina menetapkan strategi percepatan pembangunan yang diinspirasi oleh Deng Xioping, yakni strategi *Gaige Kaifang* atau *reformation and opening up*. Strategi tersebut bertujuan untuk mereformasi perekonomian dan membuka diri agar bekerja sama dengan pihak luar negeri sehingga akan mempercepat pembangunan industri dan mendorong Cina dalam arus globalisasi.

Industrialisasi yang sedang dilaksanakan berdampak pada meningkatnya permintaan akan tenaga kerja.

Permintaan tenaga kerja tersebut terpenuhi dengan banyaknya pekerja dari desa yang bermigrasi ke perkotaan. Pentingnya keberadaan pekerja migran di perkotaan diakui oleh Pemerintah Cina sehingga urbanisasi ditetapkan sebagai salah satu strategi pembangunan yang tercantum dalam *10th Five Years Plan* pada tahun 2001. Hal ini memberikan keleluasaan kepada penduduk desa untuk bermigrasi ke kota.

Bergabungnya Cina dalam *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 2001, berdampak pada kenaikan jumlah *Foreign Direct Investment* (FDI) yang masuk ke Cina sehingga dapat mempercepat pembangunan di perkotaan. Di sisi lain, jumlah pekerja di perkotaan belum dapat memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja sehingga kekurangan tenaga kerja dipenuhi oleh pekerja dari desa yang bermigrasi ke kota.

5.3 *Hukou System (Household Registration System)* sebagai Alat Kontrol Migrasi Pekerja dari Desa ke Kota

Hukou system adalah sistem pencatatan status kependudukan berdasarkan tempat tinggal. Sistem ini dibuat pada tahun 1955 untuk perencanaan ekonomi dan mengontrol migrasi penduduk desa ke kota. Pencatatan kependudukan dibedakan menjadi *agricultural* (urban) dan *non agricultural* (rural). Status hukou diperoleh sejak lahir berdasarkan status hukou ibu, dan bersifat tetap seumur hidup dengan beberapa pengecualian. Kepemilikan status hukou berimplikasi pada hak-hak yang diperoleh pemegang hukou (DFID, 2004: 22; Hao: 2004).

Hukou system mengatur arus migrasi penduduk dari desa ke kota karena migrasi berpengaruh pada penyediaan

pangan dan kebutuhan lainnya. Penghuni *denwei*⁶⁹ tidak hanya mengalami ketergantungan terhadap pekerjaan, namun juga aspek sosial lainnya seperti ketersediaan pangan, fasilitas kesehatan dan perumahan. Pembatasan migrasi bertujuan untuk menyeimbangkan antara ketersediaan pangan dan fasilitas sosialisasi lainnya dengan jumlah penduduk kota. Kebijakan tersebut menciptakan *invisible wall* antara desa dan kota, dan pemegang *urban hukou* dan *rural hukou*. Penduduk desa mengalami kesulitan untuk bermigrasi dan mendapatkan fasilitas di perkotaan, dan hanya pemegang *urban hukou* saja yang berhak mendapatkan jaminan sosial (Hao: 2004).

Kebutuhan akan tenaga kerja di perkotaan dalam rangka pembangunan kota serta keterbatasan lapangan kerja di pedesaan sejak reformasi ekonomi menyebabkan Pemerintah Cina mulai melonggarkan *hukou system*. Pada tahun 1984, pekerja migran diizinkan untuk tinggal di kota kecil apabila mendapatkan pekerjaan. Pada tahun 1992, beberapa provinsi di Cina mengeluarkan kebijakan yang disebut *blue Hukou* yaitu kebijakan yang ditujukan untuk penduduk setempat yaitu *red Hukou*. Reformasi *hukou system* terus berlanjut dan pada tahun 1997 dewan negara menyetujui pendapat Menteri Keamanan Publik untuk mengizinkan para migran tinggal di kota kecil dan besar dengan syarat mendapatkan pekerjaan setidaknya selama dua tahun. Urbanisasi sebagai salah satu kebijakan pembangunan secara

⁶⁹ Organisasi yang terdiri atas para pekerja perusahaan yang tinggal dalam satu pemukiman yang dilengkapi berbagai fasilitas publik. Organisasi ini diakui oleh Pemerintah Cina dan dijadikan dasar untuk pemberian jaminan sosial. Keanggotaan *denwei* tergantung dari perusahaan dimana pekerja bekerja.

eksplisit tercantum dalam *10th Five-year-plan* (2001) sehingga pekerja migran dibebaskan untuk tinggal di kota-kota besar (DFID, 2004; Ping dan Shaohua, 2005).

5.4 Tren dan Pola Internal Migrasi

Arus internal migrasi tidak hanya dipengaruhi oleh ketidakseimbangan pasar tenaga kerja, namun juga dipengaruhi oleh *hukou system*. Reformasi *hukou system* yang dilakukan sejak tahun 1984 mempercepat proses migrasi penduduk desa ke kota. Jumlah tenaga kerja migran pada tahun 1982 hanya dua juta orang dan meningkat sebesar 93,33% pada tahun 1989 menjadi 30 juta tenaga kerja migran (CAI Fang and WANG).

Tabel 5.1 Jumlah Migran di Perkotaan tahun 2000–2007

Tahun	Jumlah Migran (juta)	Pekerja Kota (Juta)	Rasio Jumlah Migran/Pekerja Kota (%)
2000	78,49	212,74	36,9
2001	88,99	239,4	35,1
2002	104,7	247,8	43,3
2003	113,9	256,39	44,4
2004	118,23	264,76	44,7
2005	125,78	273,31	46,0
2006	132,12	283,1	46,7
2007	136,49	293,5	46,5

Sumber: National Bureau of Statistics (NBS), China Statistical Yearbook (various years), China Statistics Press; National Bureau of Statistics (NBS), China Yearbook of Rural Households Survey (various years), China Statistics Press dalam Cai Fang dkk, 2009, *Migration and Labor Mobility in China*, Human Development Research Paper 2009/09, UNDP

Data dari National Bureau of Statistics (NBS) menunjukkan tren peningkatan jumlah pekerja migran mencapai 136 juta orang pada tahun 2007. Secara proporsi, persentase jumlah pekerja migran dalam pasar tenaga kerja juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2007 mencapai 46,5% dari total pekerja di daerah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja migran mempunyai peran penting dalam perekonomian perkotaan.

Tabel 5.2 Provinsi Asal Tenaga Kerja Migran

1990-1995			2003
No	Provinsi	Persen	Provinsi
1	Sichuan	12.39	Sichuan
2	Anhui	6.33	Anhui
3	Hunan	5.99	Henan
4	Heilongjiang	5.22	Chongqing
5	Jiangxi	4.36	Guangzhou
6	Zhejiang	4.37	Guangxi
7	Jiangsu	3.82	Jiangsu
8	Hebei	3.54	Hubei
9	Guizhou	3.41	
10	Shandong	3.24	

Sumber: The 1995 China Population Statistic in Liang and Morrooko, Data 2003 dalam Shaohua, Zhan

Berdasarkan Data Statistik Populasi Cina, Tabel 5.2 antara tahun 1990–1995 tenaga kerja migran sebagian besar berasal dari provinsi bagian barat dan tengah. Sichuan merupakan provinsi yang paling banyak mengirim tenaga kerja migran sebesar 12,39%; diikuti oleh Provinsi Anhui sebesar 6,33%; Provinsi Hunan sebesar 5,99%; dan Provinsi Jiangxi

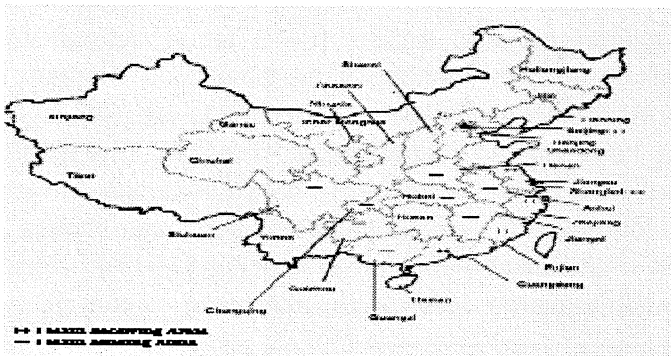
sebesar 4,36%. Studi yang dilakukan oleh Xiohan (2006) menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja migran berasal dari provinsi yang belum berkembang seperti Sichuan, Anhui dan Henan yang bermigrasi ke daerah perkotaan di daerah pantai tenggara dan kota-kota metropolis.

Daerah pantai masih menjadi daerah tujuan utama migrasi internal tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat di tabel 5.3 selama tahun 1985–1990 Guangdong menjadi daerah tujuan utama dan menyerap tenaga kerja migran sebesar 10,7%. Kemudian diikuti oleh Provinsi Jiangsu sebesar 7,8%; Provinsi Beijing sebesar 6,1%; Provinsi Shanghai sebesar 6,1%; dan Provinsi Shandong sebesar 5,6%. Pada periode tahun 1990-1995 Guangdong masih menjadi daerah tujuan utama tenaga kerja migran. Provinsi Guangdong menyerap tenaga kerja migran sebesar 18,3%; Provinsi Jiangsu sebesar 9,1%; Provinsi Shanghai sebesar 6,8%; Provinsi Beijing sebesar 6,5%; dan Provinsi Xinjiang sebesar 5,3%.

Tabel 5.3. Distribusi Tenaga Kerja Migran di Beberapa Provinsi Tujuan

No	1985-1990		1990-1995		2003	
	Provinsi	%	Provinsi	%	Provinsi	%
1	Guangdong	10.7	Guangdong	18.3	Guangdong	41
2	Jiangsu	7.8	Jiangsu	9.1	Zhejiang	9
3	Beijing	6.1	Shanghai	6.8	Shanghai	6
4	Shanghai	6.1	Beijing	6.5	Jiangsu	6
5	Shandong	5.6	Xinjiang	5.3	Beijing	5
6	Lianing	4.8	Shandong	4.9		
7	Henan	4.6	Hebei	4.7		
8	Hebei	4.3	Zhejiang	4.4		
9	Sichuan	4.1	Liaoning	4.1		
10	Hubei	3.8	Sichuan	3.7		

Sumber: 1990 and 1995 China Population Statistic in Liang and Morookoo data 2003 dalam Shaohua, Zhan, *Rural Labour Migration in China: Challenges for Policies*, Management of Social Transformation.



Gambar 5.1. Daerah Tujuan Internal Migrasi

Sumber: Huang Ping and Frank., Pieke, 2003 dalam Shaohua, Zhan, *Rural Labour Migration in China: Challenges for Policies*, Management of Social Transformation

Pada tahun 2003 lima daerah tujuan utama migrasi tenaga kerja adalah Provinsi Guangdong yang menyerap tenaga kerja sebesar 41%, Provinsi Zhejiang sebesar 9%, Provinsi Shanghai sebesar 6%; dan Provinsi Beijing sebesar 5% (Xiohan, 2006). Meningkatnya persentase tenaga kerja migran di Provinsi Guangdong merupakan dampak dari industrialisasi. Pada tahun 2003, jumlah tenaga kerja migran yang bermigrasi ke Provinsi Guangdong meningkat tajam menjadi sebesar 41%. Secara umum daerah pantai menjadi daerah tujuan para tenaga kerja migran karena di daerah tersebut terdapat banyak perusahaan industri seperti industri tekstil dan manufaktur. Selain di Provinsi Guangdong, para tenaga kerja migran bermigrasi ke kota metropolitan seperti Provinsi Beijing dan Provinsi Shanghai sebagai tenaga kerja informal di sektor konstruksi.

5.5 Karakteristik Pekerja Migran

Beberapa studi menunjukkan 70% karakteristik tenaga kerja migran berumur antara 16–19 tahun dengan tingkat pendidikan sekolah menengah pertama atau mereka yang sudah mengenyam pendidikan selama 9 tahun. Sebesar 18% tenaga kerja migran mendapatkan pelatihan keterampilan.⁷⁰ Menurut Huang dan Pieke (2003), hanya sepertiga dari tenaga kerja migran adalah perempuan karena kebutuhan tenaga kerja di sektor manufaktur mengutamakan pekerja laki-laki. Sebagian tenaga kerja migran berkerja di sektor yang disebut 3D, yakni

⁷⁰ Tunon, Max. 2006. "Internal Labour Migration in China: Features and Response".

(http://www.ilo.org/public/english/region/asro/beijing/download/training/lab_migra.pdf, diakses 26 Maret 2007)

dirty, dangerous, dan difficult. Sektor tersebut tidak diminati oleh penduduk lokal. Saat ini tenaga kerja migran di Cina secara signifikan berkontribusi pada pembangunan industri seperti sektor konstruksi, pedagang besar, retail, dan catering serta industri jasa (Shaohua, 2005; Tunon, 2006; Chan 1999; Zhao, 2004).

Berdasarkan hukou system, pekerja migran dapat dibedakan menjadi *hukou migrants* dan *non-hukou migrants*. Perbedaan status hukou berimplikasi pada hak-hak yang mereka peroleh. Secara umum, penduduk kota ber status *urban hukou* akan memperoleh jaminan sosial. Hal tersebut yang tidak dapat diperoleh oleh pekerja migran.

Tabel 5.4 Hukou dan non-Hukou Migrants

Karakteristik Migran	<i>Hukou migrants</i>	<i>Non-Hukou migrants</i>
Tipe dan status registrasi rumah tangga	Non-pertanian dan lokal	Pertanian dan non-lokal
Kesempatan mendapatkan manfaat sosial yang disediakan	Penuh	Tidak ada (hanya sementara)
Legalitas status tempat tinggal di kota Sektor sosial ekonomi	Status Penuh Sebagian besar di sektor pemerintah	llegal atau sementara Sebagian besar di sektor non pemerintah dan sebagai tenaga kerja sementara di sektor pemerintah.
Mekanisme proses migrasi	Ditentukan oleh keputusan birokrasi	Spontan didasarkan pada kontak personal dan informasi pasar
Stabilitas perpindahan	Permanen	Musiman atau semi permanen
Karakteristik tenaga kerja atau migran		

Karakteristik Migran	<i>Hukou migrants</i>	<i>Non-Hukou migrants</i>
Tingkat keterampilan	Tenaga kerja dengan tingkat keterampilan tinggi dan rendah	Sebagian besar tidak mempunyai keterampilan atau mempunyai keterampilan rendah
Jenis pekerjaan	Sebagian besar adalah pekerjaan tetap	Pekerjaan sementara atau semi sementara di perusahaan non pemerintah atau wiraswasta
Perumahan	Sama dengan tempat tinggal penduduk urban	Pemukiman dengan biaya yang rendah atau tidak punya tempat tinggal.

Sumber: Chan, Wing Kam, *Hukou and Non Hukou Migrations in China: Comparisons and Contrast*, *International Journal of Population Geography*, 5, 1999: 425–448.

Hukou migrant adalah orang yang bermigrasi dari tempat asal ke daerah perkotaan atas izin pemerintah. Para migran ini memperoleh fasilitas publik seperti asuransi kesehatan, pendidikan, asuransi pengangguran dari pemerintah lokal yang dituju. *Hukou migrant* yang berpendidikan tinggi (rata-rata lulus universitas) mempunyai pekerjaan tetap. Mereka mendapatkan informasi lowongan kerja dari pemerintah yang dituju, biasanya bekerja sama dengan universitas untuk merekrut lulusan universitas sebagai pekerja pemerintah.

Non-Hukou migrant adalah migran yang bermigrasi dari tempat asalnya ke daerah tujuan tanpa mendapatkan izin dari pemerintah lokal. Mereka mendapatkan informasi lowongan kerja dari media, teman maupun keluarga. Dalam hal ini jaringan sosial menjadi hal penting karena migran yang

ilegal memperoleh informasi dari teman yang telah bermigrasi lebih dahulu. Sebagian besar *non-Hukou migrant* bekerja di sektor informal karena tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki rendah. Biasanya *non-Hukou migrant* tinggal di kota hanya untuk sementara dan mereka tidak mendapatkan fasilitas dari pemerintah lokal. Tujuan para migran yang lebih muda adalah tidak semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi secara umum mereka ingin berpetualang dengan mengenal daerah yang baru. Mereka berani mengambil risiko untuk melakukan perjalanan yang jauh dengan dilengkapi lokal Hukou maupun tidak, dan ada kemungkinan mereka akan menjadi perintis yang membangun jaringan di daerah tujuan.⁷¹

⁷¹ Liang, Zai dan Hideki, Morooka. 2006. "Migration Networks, Hukou and Destination Choices in China", (<http://paa2006.princeton.edu/download.aspx?submissionId=61444>, diakses 28 Oktober 2008)

Tabel 5.5 Distribusi Jenis Pekerjaan (%)

Pekerjaan	Migrasi Pekerjaan			Pekerjaan Non Migrasi	Total Pekerjaann (%)
	Jumlah	Intra-Provinsi	Antar-Provinsi		
I. Kepala Birokrasi, Partai atau Kelompok Sosial, Pengusaha dan Institusi	3,16	4,06	1,38	1,48	1,67
II. Pekerja Teknis Profesional	11,76	15,63	4,04	4,93	5,70
III. Staf Administrasi dan sejenisnya	7,16	8,87	3,74	2,58	3,10
IV. Bisnisman	22,29	23,57	19,74	7,50	9,18
V. Petani dan pekerja irigasi	15,93	18,76	10,28	70,65	64,46
VI. Operator bidang manufaktur dan transportasi	39,58	28,97	60,73	12,8	15,83
VII. Lain-lain	0,12	0,14	0,09	0,06	0,07
Total	100	100	100	100	100

Sumber: PSST (Population and Social Science Technology), 2004 in Xiaohan, Zhong, Labour Migration and Wage Inequality, 2006

Tabel 5.5 menunjukkan tenaga kerja migran sebagian besar bekerja sebagai operator di sektor manufaktur dan transportasi sebesar 39,58%. Sedangkan tenaga kerja migran yang menjadi bisnisman dan penjual jasa sebesar 22,29%, sebagai petani dan tenaga kerja di sektor irigasi sebesar 15,93%. Meningkatnya permintaan tenaga kerja di sektor manufaktur merupakan dampak dari meningkatnya ekspor setelah Cina masuk ke dalam WTO.

Studi yang dilakukan oleh DFID (2004) menjelaskan bahwa pekerja migran bekerja di sektor yang tidak diminati oleh pekerja lokal. Di sisi lain, pengusaha memilih

mempekerjakan pekerja migran karena lebih muda dan murah seperti pekerja migran muda banyak dipekerjakan di hotel dan restoran. Sebagian pekerja migran menjadi pedagang jalanan, membuka usaha daur ulang, bekerja di sektor domestik rumah tangga dan pekerja di sektor industri (DFID, 2004).

5.6 Migrasi dan Kemiskinan Kota

Fenomena meningkatnya jumlah penduduk miskin kota pada pertengahan tahun 1990-an dilihat sebagai *new urban poverty* yang disebabkan oleh migrasi desa ke kota tenaga kerja dan pengangguran sebagai akibat restrukturisasi perusahaan negara. Faktor inilah yang membentuk pola kemiskinan kota baru yang berbeda dengan pola kemiskinan kota sebelumnya dengan karakteristik masyarakat miskin yang tergolong dalam kategori *three withouts*, yakni golongan penyandang cacat, sakit, dan yatim piatu (Wong, 1998). Beberapa studi mengategorikan masyarakat miskin kota menjadi tiga golongan, yakni pengangguran dan pekerja yang di PHK, masyarakat miskin karena tiga hal, yakni tidak mampu bekerja, tidak mempunyai tabungan, dan tidak mempunyai keluarga untuk bergantung (sebagian besar dari kelompok ini adalah orang tua dan penyandang cacat), dan kategori ketiga, yakni pekerja migran (DFID, 2004).

Tingkat kemiskinan kota menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 1981 tingkat kemiskinan kota hanya mencapai 1,9% dengan garis kemiskinan RMB 171, dan menurun pada tahun 1985 mencapai 0,4% dengan garis kemiskinan RMB 215 (Hao, 2004). World Bank (2009) melaporkan tingkat *national urban income poverty headcount* mencapai 2,7% dengan menggunakan garis kemiskinaan \$ 2

per hari dan 9,7% dengan menggunakan garis kemiskinan \$ 3 per hari.

Tabel 5.6 Indikator Kemiskinan Kota Tahun 1981–2002

Tahun	Garis Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan (%)	Headcount Kemiskinan Kota (Juta)
	1	2		
1991	752		5,8	14,2
1992	837		4,5	11,3
1993	993		5,1	13,3
1994	1.300		5,7	15,3
1995	1.547		4,4	12,4
1996	1.671	1.850	4,2	11,8
1997		1.890	4,1	11,7
1998		1.880	4,1	11,9
1999		1.860	3,1	10,0
2000		1.875	3,4	10,5

Sumber: Hussain, A (2001) dalam ADB (2004)

5.7 Pekerja Migran dan Pelayanan Sosial

Pemahaman atas pengertian kemiskinan kota telah bergeser. Definisi lama mengategorikan penduduk miskin kota berdasarkan pada tingkat pendapatan, pengeluaran, dan konsumsi. Namun, penduduk miskin kota harus dilihat sebagai kemampuan masyarakat untuk memenuhi hak dasarnya untuk bertahan hidup. World Bank (2004) mengajukan lima dimensi untuk melihat kemiskinan kota yakni pendapatan/konsumsi, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan pemberdayaan (Hao, 2004).

Definisi tersebut dapat menggambarkan kondisi kemiskinan pekerja migran di perkotaan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan kota. *Urban*

hukou memberikan akses penduduk kota untuk mengakses jaminan kesejahteraan dan berbagai layanan sosial untuk memenuhi standar hidup minimum. Di sisi lain, keberadaan pekerja migran di perkotaan menciptakan permasalahan sosial baru, yakni ketiadaan akses terhadap jaminan kesejahteraan dan berbagai fasilitas sosial yang hanya diperuntukkan bagi pemegang *urban hukou*. Pendapatan pekerja migran yang cenderung rendah dan ketiadaan akses terhadap jaminan kesejahteraan tersebut menyebabkan pekerja migran hidup lebih rentan.

5.7.1 Keterbatasan akses terhadap Jaminan Sosial

Karena bukan pemegang urban hukou, pekerja migran tidak bisa mendapatkan jaminan sosial seperti *unemployment insurance*, *medical insurance*, layanan pendidikan, dan *minimum living allowance*. Fasilitas-fasilitas tersebut hanya diberikan kepada penduduk kota yang memegang hukou urban (DFID, 2004; Hao, 2004; Tunon, 2006; dan Wei, 2006).

Urban market survey (CULS) yang dilakukan oleh Institute Population and Labor Economics, Chinese Academy of Social Sciences pada tahun 2005 menunjukkan bahwa kondisi pekerja migran di pasar tenaga kerja tidak lebih baik dibandingkan dengan pekerja lokal. Tabel 5.8 menunjukkan pekerja migran bekerja lebih lama dibandingkan dengan pekerja lokal meskipun penghasilan yang diperoleh lebih rendah, yakni 1094 yuan per bulan bagi pekerja lokal dan 976 yuan per bulan bagi pekerja lokal di sektor informal pada tahun 2005. Jaminan sosial yang diterima oleh pekerja migran juga lebih rendah dibandingkan dengan pekerja lokal seperti asuransi pengangguran (0,4%), asuransi kecelakaan

kerja (1,2%) dan asuransi kesehatan (1,3%) (Cai Fang dkk., 2009).

Tabel 5.7 Kondisi Pekerja Migran dalam Pasar Tenaga Kerja

Jenis Pekerjaan	2001		2005	
	Pekerja Lokal	Pekerja Migran	Pekerja Lokal	Pekerja Migran
Pekerjaan informal				
Jumlah hari kerja per minggu	6,4	6,8	6,0	6,8
Jumlah jam kerja per hari	9,3	10,8	8,9	10,6
Pendapatan per bulan (yuan)	968	991	1094	976
Pensiun	-	-	54,8	2,1
Asuransi pengangguran	-	-	12,6	0,4
Asuransi kecelakaan kerja	-	-	6,0	1,2
Asuransi kesehatan	-	-	32,6	1,3
Pekerjaan formal				
Jenis Pekerjaan	Pekerja Lokal	Pekerja Migran	Pekerja Lokal	Pekerja Migran
Jumlah jam kerja per hari	8,3	9,5	8,2	8,7
Pendapatan per bulan (yuan)	1001	776	1387	1247
Pensiun	-	-	82,1	29,0
Asuransi pengangguran	-	-	39,7	17,8
Asuransi kecelakaan kerja	-	-	29,1	31,7
Asuransi kesehatan	-	-	71,4	29,7

Sumber: Cai Fang dkk, 2009, *Migration and Labor Mobility in China*, Human Development Research Paper 2009/09, UNDP

5.7.2 Terbatasnya Akses terhadap Layanan Kesehatan

Health care insurance merupakan salah satu fasilitas yang diberikan kepada setiap penduduk sesuai dengan status hukou. *Health care insurance* diperoleh melalui perusahaan pekerja. Sejak reformasi *health care system* pada tahun 1991, asuransi kesehatan dikelola oleh pemerintah lokal bekerja sama dengan perusahaan swasta. Kebijakan tersebut tergantung dari pemerintah daerah, sebagai contohnya pemerintah lokal Shanghai menetapkan setiap perusahaan mengalokasikan 3% dari total upah untuk asuransi kesehatan (Dong, 2001).

Ad hoc health allowance hanya dinikmati oleh pemegang *urban hukou*, sedangkan pemegang *agricultural hukou* atau *rural hukou* tidak memiliki akses untuk mendapatkan subsidi layanan kesehatan di kota. Hal ini menyebabkan pekerja migran harus membayar penuh biaya kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan di kota seperti yang diterapkan oleh pemerintah lokal Beijing (Dong, 2001; Hao, 2004; Sarjiati, 2008: 50). Mahalnya biaya kesehatan di perkotaan menyebabkan pekerja migran tidak mencari pengobatan di perkotaan. Sebagian dari mereka memilih untuk pulang ke daerah asal untuk mendapatkan biaya pengobatan yang lebih murah (Turnon, 2006; Sarjiati, 2008: 52). Selain itu, pekerja migran juga mendapatkan informasi yang terbatas mengenai kesehatan reproduksi dan seksual. Dua pertiga kematian ibu di perkotaan terkait dengan pekerja migran, meskipun jumlahnya hanya 10% dari total kehamilan (Turnon, 2006).

Kondisi lingkungan kerja di sektor 3D, keterbatasan pendapatan dan keterbatasan akses untuk memperoleh subsidi rumah menyebabkan pekerja migran hidup di

lingkungan yang tidak memadai. Pada umumnya pekerja migran tinggal di pemukiman padat yang tidak dilengkapi dengan sanitasi dan saluran air bersih yang baik. Menurut survei yang dilakukan oleh National Bureau Statistic pada tahun 2006, 6,5% pekerja migran tinggal di gubug, 7,8% tinggal pemukiman di lingkungan tempat kerja, 30,4% tinggal di asrama, 23% tinggal di rumah yang tidak dilengkapi dengan dapur dan kamar mandi dan hanya 21% yang tinggal di rumah yang dilengkapi dengan dapur dan kamar mandi (Hao, 2004; dan Cay dkk. 2009). Studi lain menunjukkan bahwa pengeluaran pekerja migran untuk perumahan mencapai 40% dari total pengeluaran, sedangkan penduduk tetap hanya mengeluarkan 5% dari total pengeluaran untuk perumahan (DFID, 2004).

5.7.3 Terbatasnya Akses terhadap Pendidikan

Kesulitan dalam mengakses pendidikan juga dialami oleh anak-anak pekerja migran. Pekerja migran harus membayar uang pendidikan sebesar RMB 500–2.000 per tahun jika menyekolahkan anaknya di sekolah umum. Oleh karena itu, sebagian pekerja migran menyekolahkan anaknya di daerah asal atau memilih sekolah swasta khusus keluarga migran dengan fasilitas yang sangat minim. Sebagian anak-anak pekerja migran memilih keluar dari sekolah (DFID, 2004). Xue (2004) menyatakan bahwa tingkat *drop out* anak-anak berumur 18-14 tahun cukup tinggi yang mencapai 15,4% dan 60% dari kelompok umur tersebut berstatus pekerja anak (Hao, 2004). Selain itu, adanya hambatan bagi anggota pekerja migran untuk meneruskan pendidikan yang lebih seperti perguruan tinggi karena mereka tidak tercatat sebagai penduduk permanen (DFID, 2004 dan Turnon, 2006).

5.8 Reformasi *Hukou System*: Sebuah Tantangan Bagi Cina

Seperti yang telah diungkapkan di bagian awal tulisan, migrasi penduduk dari desa ke kota menjadi faktor penting dalam proses pembangunan ekonomi. Namun, percepatan arus migrasi penduduk desa ke kota yang melebihi kapasitas pasar tenaga kerja telah menciptakan permasalahan baru seperti peningkatan kemiskinan di daerah perkotaan. Ketiadaan akses terhadap layanan kebutuhan dasar bagi pekerja migran telah memperburuk kondisi pekerja migran.

Tren arus migrasi dari desa ke kota akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pembangunan ekonomi perdesaan yang tidak seimbang dengan pembangunan di perkotaan mendorong penduduk desa untuk mencari pendapatan yang lebih besar di perkotaan. Seperti permasalahan yang sering dihadapi oleh negara berkembang, para pemuda di desa enggan untuk bekerja di sektor pertanian dan memilih di sektor lainnya seperti industri jasa, perdagangan, dan perhotelan.

Hukou system atau *Household Responsibility* yang awalnya bertujuan untuk mengontrol arus migrasi dari desa ke kota mulai diperdebatkan keberadaannya. Berbagai kalangan menilai Pemerintah Cina perlu untuk mengkaji ulang sistem ini karena menghambat perpindahan penduduk dan memarginalkan keberadaan pekerja migran. Berbagai studi terkait dengan migrasi dan kemiskinan kota menyimpulkan bahwa *hukou system* menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi pekerja migran yang akhirnya berpengaruh pada tingkat kemiskinan kota (DFID, 2004; Hao, 2004; Turnon, 2006).

Generasi baru pekerja migran yang lebih berpendidikan dan kaya informasi menuntut diperlakukan sama dengan penduduk lokal. Salah satu tuntutan adalah reformasi atau penghapusan *hukou system*. Han Chanfu, Menteri Pertanian Cina, menyatakan bahwa pekerja migran yang lahir pada akhir tahun 1980an dan 1990an mulai mengembangkan semangat persamaan dan demokrasi sehingga menolak diperlakukan berbeda dengan penduduk kota dalam pekerjaan, pelayanan publik, dan hak politik.⁷²

Reformasi *hukou system* menjadi salah satu perhatian Pemerintah Cina untuk menjamin persamaan hak antara pekerja migran dan penduduk lokal. Persoalan pekerja migran juga menjadi perhatian China Communist Party (CCP) yang tertuang dalam *No. 1 Central Committee Document* yang dirilis pada akhir bulan Januari 2010. Dokumen tersebut menyebutkan akan mereformasi *hukou system* yang berlaku di kota kecil dan menengah (penduduknya kurang dari 500.000 orang) sehingga pekerja migran diizinkan untuk tinggal permanen dan mendapatkan fasilitas publik seperti dengan penduduk tetap kota.⁷³

⁷² Junting, Lu “ New Generation Migrant Worker Demanding the Same Education and Welfare Rights as City Dwellers”, China Daily, 3 Maret 2010, (http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2010-03/03/content_9527917.htm, diakses 27 September 2010).

⁷³ Ran, Tao. 2009. “Debate: Hukou Abolition”.China Daily (http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2010-03/03/content_9528510.htm, diakses 2 Oktober 2010).

Reformasi *hukou system* yang hanya dilakukan di kota kecil tidak akan berpengaruh secara signifikan karena sebagian besar pekerja migran bekerja di kota besar. Reformasi *hukou system* yang pernah dilakukan sebelumnya pada tahun 2001 dan 2004 tidak memberikan keuntungan yang besar bagi pekerja migran karena hanya mengizinkan terjadinya migrasi pekerja migran dari desa ke kota, tetapi tidak diiringi dengan persamaan hak dalam mendapatkan jaminan sosial.

Di sisi lain, penghapusan *hukou system* secara menyeluruh akan mempercepat arus migrasi dari desa ke kota sehingga akan terjadi sentralisasi perekonomian di daerah perkotaan. Apabila kesempatan kerja di perkotaan tidak dapat menampung arus migrasi dari desa ke kota maka akan memperbanyak jumlah pengangguran di perkotaan. Selain itu, penghapusan *hukou system* berimplikasi pada penyediaan fasilitas sosial bagi penduduk kota sebesar 1,3 juta orang, sedangkan pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya.

Berdasarkan estimasi kasar yang dilakukan oleh Paul Kong, *Chinese visiting scholar in Australia*, penghapusan *hukou system* akan berimplikasi pada penyediaan anggaran sebesar 1,65 triliun yuan per tahun untuk menjamin seluruh penduduk kota menikmati jaminan sosial. Anggaran tersebut terdiri dari beberapa aspek, yakni jaminan kesehatan, pensiun, *subsistence allowance*, dan pendidikan.

Terdapat perbedaan antara *Urban Resident Medicare Security* dan *New Rural Cooperative Medicare Scheme*. Untuk menjamin pekerja migran mendapatkan akses jaminan kesehatan yang sama seperti penduduk kota, pemerintah perlu menambah anggaran. Sebagai contohnya apabila pemerintah pada tahun 2009 mengalokasikan anggaran

sebesar 2,5–3 triliun yuan untuk memenuhi pengeluaran kesehatan maka anggaran tambahan yang dibutuhkan adalah sebesar 250 miliar yuan. Anggaran pensiun untuk penduduk desa dan kota juga berbeda. Penduduk kota mendapatkan pensiun per bulan sebesar 500 yuan, sedangkan pensiun bagi penduduk desa mendapatkan lebih rendah. Apabila pemerintah memberikan pensiun yang sama antara penduduk desa dan kota maka jumlah anggaran tambahan yang dibutuhkan adalah sebesar 300 yuan per tahun.

Subsistence allowance yang diberikan kepada penduduk kota mencapai 300 yuan per bulan lebih dari setengah pendapatan rata-rata penduduk desa. Hal ini berarti pemerintah membutuhkan tambahan anggaran sebesar 400 yuan untuk menyamakan *subsistence allowance* penduduk desa dan kota. Biaya pendidikan di perkotaan pada dasarnya gratis, namun pemerintah perlu menambah anggaran pendidikan sebesar 700 miliar yuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan keluarga migran. Oleh karena itu, pemerintah harus mengalokasikan biaya pendidikan sebesar 10.000 yuan per anak per tahun.

Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah Pemerintah Cina mampu untuk menyediakan tambahan anggaran apabila *hukou system* dihapus? Jawabannya adalah tidak. Penerimaan pemerintah pada tahun 2009 adalah 6,8 triliun yuan dengan penerimaan dari jaminan sosial kurang dari 1,6 triliun per tahun. Apabila terdapat pendapatan dari *land transfer* jumlah pendapatan nasional mencapai 12 triliun yuan. Reformasi *hukuo system* menjadi sebuah tantangan bagi Pemerintah Cina untuk mengontrol arus migrasi pekerja migran dari desa ke kota, namun juga dapat menjamin kesejahteraan bagi pekerja migran. Reformasi *hukuo system*

yang dilaksanakan di kota Shanghai dan Guangdong merupakan kemajuan bagi kesejahteraan pekerja migran. Kedua kota tersebut mengganti *Temporary Residential Permit* dengan *Residential Permit* pekerja migran yang memenuhi beberapa kriteria sehingga dapat menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah lokal. *Residential Permit* hanya akan diberikan kepada pekerja migran yang telah tinggal selama tujuh tahun, membayar pajak, membayar asuransi sosial, pekerjaan yang legal, menaati *one child policy*, dan bebas dari tindakan kriminal.

Dengan memiliki *residential permit* pekerja migran dapat memanfaatkan fasilitas publik seperti penduduk kota lainnya, yakni sebagai berikut:

1. *Official endorsement* untuk perjalanan bisnis ke Hongkong dan Makau.
2. Registrasi kendaraan dan izin mengemudi.
3. Persamaan akses terhadap sekolah umum bagi anak pekerja migran.
4. Bebas biaya pendidikan.
5. Bebas untuk menyewa rumah dalam jangka waktu yang lama.
6. Bantuan sosial untuk penduduk kota.
7. Layanan pengobatan untuk penyakit menular dan vaksinasi anak.

Persamaan hak untuk mengakses layanan publik merupakan salah satu bentuk penghargaan bagi pekerja migran yang berkontribusi besar terhadap perekonomian kota. Di sisi lain, masih banyak pertentangan dari penduduk lokal karena akan mengancam hak-hak istimewa mereka sebagai penduduk tetap. Selain itu, pemerintah lokal harus

menyediakan anggaran yang lebih besar untuk menyediakan layanan publik yang sama dengan penduduk kota.

5.9 Penutup

Migrasi internal tenaga kerja dari desa-kota di Cina masih akan berlangsung ke depan. Pembangunan di kota dan industrialisasi mempercepat proses migrasi yang menyebabkan meningkatnya penduduk di daerah perkotaan. *Hukou system* saat ini perlu direformasi untuk memfasilitasi keberadaan pekerja migran di perkotaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan diperlakukan yang sama seperti dengan penduduk kota lainnya, akan mempermudah pekerja migran dan keluarganya untuk mengakses fasilitas publik seperti pendidikan, jaminan sosial, dan asuransi sosial. Hal ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi tingkat kemiskiskinan di daerah perkotaan.

Di sisi lain, pemerintah lokal harus mengalokasikan anggaran yang lebih banyak untuk menyediakan fasilitas publik bagi pekerja migran. Peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Shanghai dan Guangdong menjadi salah satu contoh reformasi *hukou system*. Pekerja migran akan mendapatkan haknya apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan termasuk kewajiban untuk membayar pajak sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah. Pemerintah Cina mempunyai tugas yang berat untuk mendorong pemerintah lokal mereformasi *hukou system* karena terkait dengan ketersediaan dana.

Daftar Pustaka

- ADB. 2004. "Poverty Profile of the People's Republic of China".
(http://www.adb.org/documents/reports/poverty_profile_PRC/PRC.pdf diakses 27 September 2010).
- Aguninas, Dovelyn. 2009. "Guiding the Invisible Hand: Making Migration Intermediaries Work for Development". *Human Development Research Paper*. 2009/22. UNDP.
- Bao, Shuming dkk. 2007, "Interprovincial Migration in China: The Effects of Investment and Migrant Network". IZA DP No. 2924. July. (www.iza.org, diakses 23 Juli 2007).
- Cai Fang dan Wang Dewen. "Impacts of Internasl Migration on Economic Growth and Urban Development in China". (http://iple.cass.cn/file/Impacts_of_Internal_Migration_on_Economic_Growth%20_and_Urban_Development.pdf, diakses 3 Oktober 2010).
- Chan, Kam Wing, Ta Liu, dan Yunyan Yang. 1999. "Hukou and non-Hukou Migrations in China: Comparisons and Contrast". *International Journal of Population Geography*, 5: 425-448.
- China Statistical Yearbook 2006. (www.stats.gov.cn, diakses 26 Juli 2007).
- Chow, Gregory C. 2004. "Economic Reform and Economic Growth". *Annals of Economics and Finance*. 5: 127-152, 2004, Peking.
- DFID. 2004. "China Urban Poverty Studies, Final Report". Hongkong, (www.dfid.gov.uk/countries/asia/China/urban-poverty-study-english.pdf, akses 26 Juni 2006).
- Fang, Cai dan Dewen, Wang. "Impact of Internal Migration on Economic Growth and Urban Development in China, China".
(http://iple.cass.cn/file/Impacts_of_Internal_Migration_on

- _Economic_Growth%20_and_Urban_Development.pdf, diakses 26 Juni 2006).
- Hao, Yan. 2004. "Emerging Urban Poverty." (<http://www.eadn.org/reports/urbanweb/u09.pdf>, diakses 2 Oktober 2010).
- , 2009. "Poverty and Exclusion in Urban China". (<http://bibliothek.wz-berlin.de/pdf/2009/i09-202.pdf>, diakses 2 Oktober 2010).
- Junting, Lu. 2010. "New Generation Migrant Worker Demanding the Same Education and Welfare Rights as City Dwellers", *China Daily*, 3 Maret 2010, (http://www.Chinadaily.com.cn/cndy/2010-03/03/content_9527917.htm, diakses 27 September 2010).
- Liang, Zai dan Hideki, Morooka. 2006. "Migration Networks, Hukou and Destination Choices in China". (<http://paa2006.princeton.edu/download.aspx?submissionId=61444>, diakses 28 Oktober 2008).
- Park, Albert dan Dewen Wang. 2010. "Migration and Urban Poverty and Inequality in China". *Discussion Paper Series*. IZA DP No. 4877. (<http://ftp.iza.org/dp4877.pdf>, diakses 2 Oktober 2010).
- Ping, Huang and Mr. Zhan Shaohua. 2005. "Internal Migration in China: Linking it to Development, DFID, Lanzhou". (www.hdr.undp.org/docs/network/hdr_net/China_internal_%, diakses 25 Juni 2006).
- , 2009. "Migrant Worker's Remittances and Rural Development in China". (<http://essays.ssrc.org/acrossborders/wp-content/uploads/2009/08/ch10.pdf>, diakses 3 November, 2010).

- Ran, Tao. 2009. "Debate: Hukou Abolition". *China Daily*. 3 Maret 2010 (http://www.Chinadaily.com.cn/opinion/2010-03/03/content_9528510.htm, diakses 2 Oktober 2010).
- Shaohua, Zhan. "Rural Labour Migration in China: Challenges for Policies". *Management of Social Transformation*. www.unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140242e.pdf, diakses 24 April 2007).
- Todaro. 1999. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Tunon, Max. 2006. "Internal Labour Migration in China: Features and Response". Beijing. (http://www.ilo.org/public/english/region/asro/beijing/download/training/lab_migra.pdf, diakses 26 Maret 2007)
- Wu, Jinglian. 2005. *Understanding and Interpreting Economic Reform*, Singapore: Seng Lee Press. p. 292–294.
- Xiaohan, Zhong. 2006. "Labour Migration and Wage Inequality", (http://www.ccwe.org.cn/ccweold/papers/Xiao-Han%20Zhong/Labor_migration.pdf, diakses 5 Januari 2007)
- Zhang, Mei. 2003. *China's Poor Regions: Rural-Urban Migration, Poverty, Economic Reform, and Urbanisation*. London: Routledge Curzon.
- Zhao, Zhong. 2005. "Migration, Labour Market Flexibility, and Wage Determination in China: A Review". *The Developing Economics*, XLIII-2, June 2005, p. 285–312.

